

Abdul Qodir Jailani
Ireng Maulana
M. Hermayani Putera
Yusdi Usman

LAPORAN PENELITIAN

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KALIMANTAN BARAT



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT



yayasan inisiatif
dagang hijau



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

Laporan Penelitian

Percepatan

**Pembangunan Desa
di Kalimantan Barat**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, IDH dan Penabulu

2021

Abdul Qodir Jailani

Ireng Maulana

M. Hermayani Putera

Yusdi Usman

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan desa merupakan sebuah proses transformasi desa dan masyarakatnya menuju kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera. Sejak tahun 2014, pembangunan desa menjadi lebih terarah setelah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini juga memberi landasan legal bagi adanya transfer fiskal ke desa dalam bentuk dana desa. Kondisi ini membawa banyak perubahan di tingkat desa. Transfer fiskal ke desa dalam jumlah yang cukup besar menjadi akselerator pembangunan desa. Namun demikian, berbagai tantangan juga dihadapi oleh desa yang menyebabkan transfer fiskal ini tidak banyak berdampak pada kemajuan desa.

Karena itu, pemerintah kemudian membuat strategi dalam menilai pembangunan desa melalui konsep yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Konsep ini mencakup tiga dimensi utama tentang ketahanan desa, yakni ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Secara keseluruhan, terdapat 52 indikator yang dinilai dalam pembangunan desa. Penelitian ini menambahkan 14 indikator untuk menyempurnakan konsep IDM yang sudah ada, sehingga menjadi 66 indikator penilaian. Karena penelitian ini merupakan riset kualitatif, maka ke-66 indikator tersebut dianalisis secara mendalam kodisinya pada semua desa yang diteliti.

Secara umum, kondisi desa-desa di Kalimantan Barat sangat bervariasi, baik dari sisi letak geografis, kondisi sosial ekonomi, maupun keberadaan berbagai industri ekstraktif di wilayah desa. Kondisi desa-desa yang beragam ini merupakan sebuah kekuatan yang akan menjadi modal pembangunan desa ke depan. Dalam menghadapi keragaman kondisi desa ini, pemerintah daerah diharapkan bisa merumuskan strategi percepatan pembangunan desa yang juga beragam, jangan seragam.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mencatat sejumlah hal penting untuk ditindaklanjuti dalam percepatan pembangunan desa di provinsi ini.

Pertama, desa-desa urban menghadapi masalah dalam percepatan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, dan lain-lain. Kondisi ini bisa mengancam keamanan pangan desa dan juga kota. Sebagai wilayah penyangga kota, dibutuhkan adanya kebijakan untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian di desa-desa urban ini. Pembangunan di desa-desa urban perlu dilakukan dengan memanfaatkan potensi sosial dan ekonomi yang sudah ada, dan memperkuat keterhubungan wilayah dan kemitraan dengan kota.

Kedua, desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif menghadapi tantangan akses dan keterbukaan wilayah desa. Terbatasnya akses layanan kesehatan dan pendidikan juga menjadi masalah di desa ini. Ketimpangan penguasaan lahan antara perusahaan dan warga desa menjadi ancaman ketahanan pangan masyarakat desa pada masa yang akan datang. Karena itu, perlu ada upaya untuk mempertahankan lahan-lahan masyarakat desa yang masih tersisa supaya tidak beralih kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaannya kepada korporasi. Desa-desa pedalaman ini juga masih menghadapi berbagai ancaman ekologis dalam bentuk banjir.

Ketiga, desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif cenderung beragam kondisinya. Desa-desa yang mempunyai aset ekonomi desa, umumnya bisa mengembangkan ekonomi desa dan warganya dengan baik. Sementara desa-desa yang tidak mempunyai aset ekonomi desa, cenderung bergantung pada perusahaan ekstraktif yang ada di desa. Meskipun sebagian warga desa menjadi buruh di sejumlah industri ekstraktif, mayoritas warga desa bergantung hidupnya pada alam: ladang dan tembawang. Untuk itu, perlu ada upaya untuk memastikan lahan-lahan masyarakat ini tidak beralih kepemilikan, yang berpotensi mengancam sumber penghidupan warga desa ke depan.

Keempat, desa-desa pesisir dan berada dalam kawasan industri strategis nasional (KISN) umumnya menghadapi ketidakpastian masa depan. Proses industrialisasi yang sedang berlangsung menghasilkan keterkejutan budaya (*cultural shock*) dalam masyarakat. Pemerintah juga belum mempersiapkan masyarakat desa untuk bisa beradaptasi dan menjadi bagian dari proses industrialisasi ini. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka masyarakat desa-desa ini akan tersisih dari pembangunan wilayah. Kehadiran pendatang dengan ketrampilan yang lebih baik membuat warga desa semakin termarginalkan. Karena itu, perlu ada upaya sejak dini untuk mempersiapkan warga desa dalam menghadapi proses industrialisasi di wilayah ini.

Kelima, desa-desa terpencil dan perbatasan tidak mudah dibangun karena keterisolasian yang cukup tinggi. Akses ke desa-desa terpencil ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya transportasi air/sungai yang sangat mahal. Desa-desa terpencil ini menghadapi berbagai keterbatasan akses kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menghadapi kondisi ini, pemerintah perlu memastikan bahwa sumber penghidupan subsisten masyarakat desa terpencil dan perbatasan ini tetap terjaga. Jika ladang dan tembawang mereka terjaga, maka meskipun terisolasi, mereka tetap bisa hidup normal dan bergantung pada sumberdaya alam di desa. Ancaman bagi desa-desa ini adalah jika ada perusahaan ekstraktif masuk ke wilayah ini.

Keenam, CSR di Kalimantan Barat mempunyai potensi yang cukup besar untuk mendorong percepatan pembangunan desa. Sayangnya, sampai saat ini pengelolaan CSR oleh berbagai perusahaan ekstraktif masih belum bagus. Pendekatan CSR umumnya masih bersifat karitatif atau sinterklas, yakni pendekatan bagi-bagi hadiah. Karena itu, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya untuk mentransformasi pendekatan CSR ke arah pemberdayaan dan terintegrasi dengan perencanaan dan pembangunan desa.

Selain itu, pembangunan desa di Kalimantan Barat bisa diarahkan untuk mendukung pertumbuhan hijau (*green growth*), dengan pendekatan seperti PPI (Produksi, Proteksi, dan Inklusi) berbasis lansekap dan yurisdiksi wilayah. Khusus untuk desa-desa yang berada dalam kawasan industri ekstraktif berbasis lahan, maka pendekatan PPI ini menjadi penting dilaksanakan untuk memastikan adanya keseimbangan antara produksi dan proteksi di satu sisi, dan penerapan prinsip inklusi kepada masyarakat desa dan petani di sisi lain dalam rantai pasok komoditas berbasis lansekap.

KATA PENGANTAR

Akhirnya, penelitian ini selesai dilaksanakan dengan baik. Dalam kondisi pandemi covid-19, proses penelitian memang tidak mudah dilakukan. Tim peneliti seringkali menemukan kendala lapangan, berupa penolakan untuk diskusi dan wawancara dengan sejumlah narasumber di tingkat desa. Namun demikian, secara umum, penelitian ini berjalan dengan baik, di enam desa dan empat kabupaten.

Kami, tim peneliti, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan penelitian ini. Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan kepada penelitian ini. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kerjasamanya selama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada IDH atas dukungannya sehingga kegiatan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua kepala desa dan tokoh-tokoh desa di enam desa yang diteliti. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendorong percepatan pembangunan desa di wilayah ini.

Tim Peneliti

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAU	: Business as Usual
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CPO	: Crude Palm Oil
CSR	: Corporate Sosial Responsibility
CU	: Credit Union
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: Focus Group Discussion
FOLU	: Forestry and Other Land Use
GRK	: Gas Rumah Kaca
HCV	: High Conservation Value
HCS	: High Carbon Stock
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
IDH	: <i>Initiatief Duurzame Handel</i>
IDM	: Indeks Desa Membangun
KIE	: Kawasan Industri Ekstraktif
KISN	: Kawasan Industri Strategis Nasional
KK	: Kepala Keluarga
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MA	: Madrasah Aliyah
MCAI	: Millennium Challenge Account MCA Indonesia
MCK	: Mandi, Cuci, Kakus
MI	: Madrasah Ibtidayah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
PADes	: Pendapatan Asli Desa
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PETI	: Penambangan Emas Tanpa Izin
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PLBN	: Pos Lintas Batas Negara
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
Poskesdes	: Pos Kesehatan Desa
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PPI	: Produksi, Proteksi, dan Inklusi
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	: Puskesmas Pembantu
RKPDDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumberdaya Alam
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDM	: Sumberdaya Manusia
Siskamling	: Sistem Keamanan Lingkungan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMU/A	: Sekolah Menengah Umum/Atas
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UU	: Undang-Undang
VSA	: Verified Source Area

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
KATA PENGANTAR.....	6
DAFTAR SINGKATAN.....	7
DAFTAR ISI	9
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	11
BAB 1 PENDAHULUAN	12
1.1 PENGANTAR	12
1.2 TUJUAN.....	13
1.3 PROSES PENELITIAN.....	14
1.3.1 Metode Penelitian	14
1.3.2 Limitasi Penelitian.....	14
1.4 LOKASI PENELITIAN.....	15
BAB 2 SEKILAS KALIMANTAN BARAT	16
2.1 KONDISI GEOGRAFIS KALIMANTAN BARAT	16
2.2 KONDISI DEMOGRAFIS KALIMANTAN BARAT	19
2.3 KONDISI EKONOMI KALIMANTAN BARAT	20
BAB 3 PENDEKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA.....	22
3.1 PENDEKATAN DESA MEMBANGUN	23
3.2 PENDEKATAN SDGs DESA	27
3.3 PENDEKATAN PRODUKSI, PROTEKSI, DAN INKLUSI	28
BAB 4 KONDISI KETAHANAN DESA DI KALIMANTAN BARAT	31
4.1 KONDISI KETAHANAN DESA URBAN	32
4.1.1 Kondisi Desa Urban.....	32
4.1.2 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Urban	36
4.2 KONDISI KETAHANAN DESA PEDALAMAN DAN KIE	38
4.2.1 Kondisi Desa Pedalaman dan KIE.....	38
4.2.2 Revitalisasi CSR untuk Pembangunan Desa Pedalaman dan KIE	42
4.2.3 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pedalaman dan KIE.....	46
4.3 KONDISI KETAHANAN DESA PESISIR DAN KIE	50
4.3.1 Kondisi Desa Pesisir dan KIE	50
4.3.2 Revitalisasi CSR untuk Pembangunan Desa Pesisir dan KIE	53
4.3.3 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pesisir dan KIE	55
4.4 KONDISI KETAHANAN DESA PESISIR DAN KISN	58
4.4.1 Kondisi Desa Pesisir dan KISN.....	58
4.4.2 Revitalisasi CSR untuk Pembangunan Desa Pesisir dan KISN.....	62
4.4.3 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pesisir dan KISN.....	63
4.5 KONDISI KETAHANAN DESA TERPENCIL DAN PERBATASAN	66
4.5.1 Kondisi Desa Terpencil dan Perbatasan	66

4.5.2 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Terpencil dan Pedalaman	69
BAB 5 PERTUMBUHAN HIJAU, PPI, DAN PEMBANGUNAN DESA	72
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	77
6.1 KESIMPULAN	77
6.2 REKOMENDASI.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

<i>Tabel 1. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 2. Dimensi, aspek, variabel dan indikator dalam konsep desa membangun</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 3. Isu strategis pembangunan desa urban</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 4. Isu strategis pembangunan desa pedalaman dan KIE.....</i>	<i>421</i>
<i>Tabel 5. Perbedaan pendekatan CSR perusahaan BUMN dan swasta nasional.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 6. Isu strategis pembangunan desa pesisir dan KIE</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 7. Strategi pembangunan desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif</i>	<i>56</i>
<i>Tabel 8. Isu strategis pembangunan desa pesisir dan KISN.....</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 9. Isu strategis pembangunan desa terpencil dan perbatasan.....</i>	<i>68</i>
<i>Tabel 10. Saling keterhubungan antara pertumbuhan hijau dan pembangunan desa</i>	<i>75</i>
<i>Gambar 1. Persentase etnis di Kalimantan Barat</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 2. Pendekatan Membangun Desa</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 3. Pendekatan IDH berbasis Yurisdiksi.....</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 4. Pendekatan PPI.....</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 5. Strategi dalam Percepatan Pembangunan Desa Urban.....</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 6. Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pedalaman dan KIE.....</i>	<i>47</i>
<i>Gambar 7. Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pesisir dan KIE.....</i>	<i>56</i>
<i>Gambar 8. Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pesisir dan KIE.....</i>	<i>64</i>
<i>Gambar 9. Strategi Percepatan Pembangunan Desa Terpencil dan Perbatasan</i>	<i>70</i>
<i>Gambar 10. Skenario Pertumbuhan Hijau Kalimantan Barat</i>	<i>73</i>
<i>Gambar 11. Proyeksi Emisi Karbon Kalimantan Barat, 2015-2035</i>	<i>74</i>
<i>Gambar 12. Kontribusi Desa Pengurangan Emisi GRK untuk Pertumbuhan Hijau</i>	<i>76</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 PENGANTAR

Pembangunan desa merupakan sebuah proses yang dinamis. Pembangunan desa juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Dinamika pembangunan desa ini terkait dengan berbagai perubahan sosial ekonomi dan ekologi yang terjadi di desa di satu sisi, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kemajuan desa itu sendiri. Faktor-faktor eksternal ini umumnya lebih cepat mempengaruhi perubahan di desa dibandingkan dengan faktor internal masyarakat desa itu sendiri.

Kebijakan pemerintah tentang desa, perkembangan teknologi informasi, masuknya investasi ke desa, adalah contoh bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi perkembangan desa. Tidak semua desa mempunyai kapasitas adaptif terhadap perubahan ini. Namun banyak desa yang mampu cepat belajar dari kondisi yang ada, lalu membangun kekuatan internal untuk bisa beradaptasi dan memanfaatkan faktor eksternal untuk kemajuan desa dan masyarakat desa.

Salah satu faktor eksternal yang mempercepat pembangunan desa adalah lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini menjadi payung hukum bagi pembangunan desa, di mana desa kini mempunyai tingkat otonomi yang lebih besar dalam mengelola rumah tangganya. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari UU Desa, pemerintah sejak tahun 2015 mulai melakukan transfer fiskal kepada pemerintah desa, yang dinamakan dengan dana desa (DD).¹ Bagaimanapun, dana desa ini menjadi kekuatan eksternal yang mampu mempercepat pembangunan desa dalam berbagai arena.

Selain itu, alokasi dana desa (ADD) sangat membantu desa untuk membangun kemandirian keuangan di tingkat desa. Dalam APBN 2021, jumlah dana desa secara keseluruhan adalah sebesar 72 Triliun rupiah.² Jumlah ini masih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 72 Triliun rupiah tahun 2020 dan 70 Triliun rupiah tahun 2019.³ Dengan jumlah ini, rata-rata setiap desa bisa memperoleh dana sekitar 1 Miliar rupiah, di mana jumlah desa di Indonesia menurut data BPS tahun 2018 mencapai 75.436 desa.

¹ Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan tentang dana desa ini terdapat dalam pasal 71 sampai 75 yang mengatur tentang keuangan desa. Pasal 72 ayat b menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan desa lainnya yang bersumber dari APBN diatur dalam pasal 72 ayat d, bahwa alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota.

² Lihat publikasi Kemenkeu: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17307>, diunduh 15 Januari 2021.

³ Buka juga sebagai pembandingan: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=13692>, diunduh 15 Januari 2021.

Di Kalimantan Barat, jumlah desa tahun 2018 menurut BPS adalah sebanyak 1.979 desa. Sementara menurut sumber lain, jumlah desa di provinsi ini adalah sebanyak 2.031 desa.⁴ Tahun 2021, jumlah transfer dana desa ke Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp. 2.061.328.499,-.⁵ Dana lebih dari 2 Triliun rupiah ini, jika dibagi dengan jumlah desa yang ada di provinsi ini, maka setiap desa akan menerima dana desa rata-rata sebesar 1 Miliar rupiah.

Namun demikian, selama tujuh tahun pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan enam tahun transfer fiskal dana desa yang dikelola pemerintah desa, pembangunan desa tidak serta merta menjadi berkembang pesat. Demikian juga upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat Indeks Desa Membangun (IDM) adalah salah satu cara untuk mengukur secara kuantitatif tentang kondisi dan perkembangan desa. Namun demikian, angka-angka IDM saja tidak menggambarkan kondisi desa secara mendalam, serta kompleksitas yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa.

Karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, perlu memahami dinamika dan kondisi desa secara lebih mendalam untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi desa dalam proses pembangunan. Penelitian ini adalah salah satu cara dalam rangka memperkuat kebijakan pemerintah, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, berbasis pada data penelitian ilmiah (*evidence-based policy*). Dengan demikian, hasil penelitian ini akan memperkuat strategi intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat dalam percepatan pembangunan desa ke depan.

1.2 TUJUAN

1. Melakukan analisis tentang tantangan (masalah, hambatan, solusi, dan sebagainya) dalam pembangunan desa. Penelitian sosial ini dilakukan berbasis pada konsep Desa Membangun yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk merumuskan naskah akademik untuk Perda atau Pergub tentang percepatan pembangunan desa, dan Perda atau Pergub tentang Implementasi CSR untuk percepatan pembangunan desa di Kalimantan Barat.

⁴ Sumber lain memberikan data berbeda, yakni: <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah>, diunduh tanggal 15 Januari 2021.

⁵ Lihat dokumen Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Barat, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI tahun 2021.

1.3 PROSES PENELITIAN

1.3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.⁶ Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan analisis yang mendalam tentang kondisi desa-desa di Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun menggunakan metode kualitatif, namun kerangka penelitian ini menggunakan konsep IDM, yang terdiri dari tiga dimensi, yakni dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi dalam masyarakat desa.

Dalam penelitian kualitatif, Creswell (2014) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melibatkan proses pengumpulan data melalui empat tipe, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengumpulan data audio visual. Karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan, yakni:

1. FGD (*Focus Group Discussion*)
2. Wawancara mendalam
3. Observasi lapangan
4. Analisis dokumen
5. Analisis data audio visual

1.3.2 Limitasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 6 desa yang terletak di 4 kabupaten. Pemilihan desa-desa ini dilakukan berdasarkan status desa, yakni tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Selain itu, pemilihan desa juga berdasarkan beberapa tipologi desa yang ada di Kalimantan Barat, yaitu: desa urban, desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif, desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif, desa pesisir dan kawasan industri strategis nasional, serta desa terpencil dan pedalaman.

Khusus untuk desa terpencil dan perbatasan — karena beberapa limitasi — tidak dilakukan penelitian lapangan dan hanya menggunakan data sekunder yang sudah ada untuk keperluan analisisnya. Di samping itu, penelitian ini juga mendapat hambatan dalam interaksi antara peneliti dengan informan di desa-desa karena kondisi pandemi Covid-19. Meskipun demikian, sejumlah FGD dan wawancara bisa kami lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

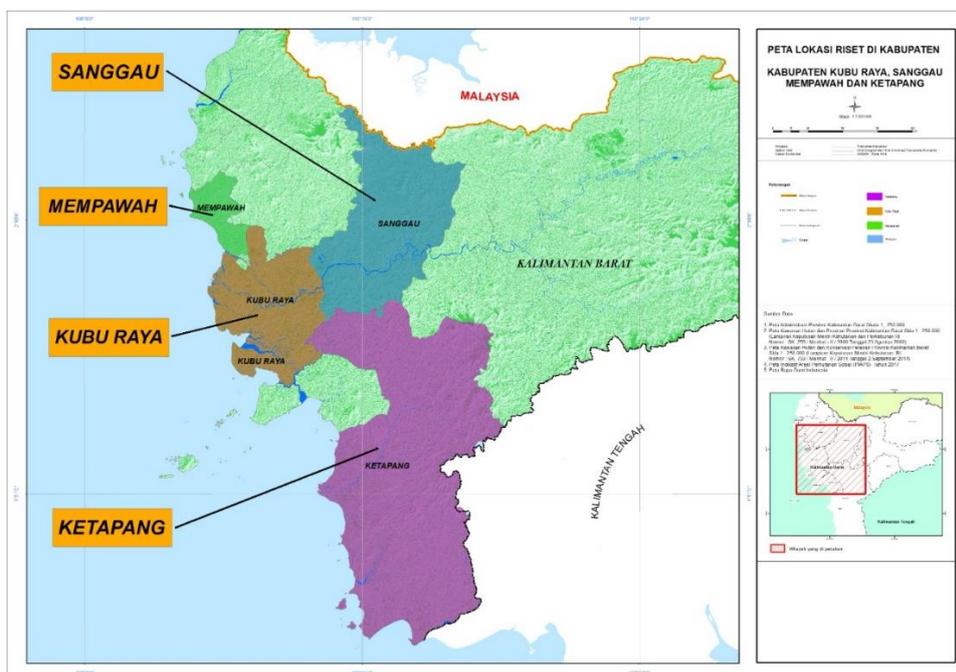
Secara keseluruhan, penelitian ini hanya fokus pada lima tipologi desa yang berkaitan dengan industri ekstraktif. Karena itu, ada sejumlah tipologi desa lainnya yang tidak tercakup dalam penelitian ini. Kami berharap, penelitian ini dapat memperkaya perspektif dalam percepatan

⁶ Lihat lampiran 2 tentang metodologi penelitian secara lebih detail.

pembangunan desa di provinsi ini, dan menginspirasi penelitian-penelitian selanjutnya tentang tipologi-tipologi desa lainnya yang belum dilakukan. Dengan demikian, upaya memperkuat proses perencanaan untuk percepatan pembangunan desa akan bisa dilakukan secara lebih baik oleh pemerintah dan semua pihak di Kalimantan Barat.

1.4 LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di 6 desa, di 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Desa-desa yang diteliti ini merupakan desa-desa yang bisa mewakili tipologi desa-desa yang ada di provinsi ini, yakni desa urban, desa pedalaman, desa pesisir, desa kawasan industri ekstraktif, desa kawasan industri strategis nasional, serta desa terpencil perbatasan. Keempat kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan penelitian ini adalah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Ketapang, seperti terlihat dalam peta di bawah ini.



Desa-desa yang diteliti dan mewakili tipologi desa-desa yang ada di Kalimantan Barat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Botuh Bosi, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang
2. Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang
3. Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Mempawah
4. Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
5. Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya
6. Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau

BAB 2

SEKILAS KALIMANTAN BARAT

2.1 KONDISI GEOGRAFIS KALIMANTAN BARAT

Provinsi Kalimantan Barat⁷ merupakan salah satu provinsi yang terletak di sebelah Barat Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat secara resmi berdiri pada tahun 1956 berdasarkan UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.⁸ UU No. 25 tahun 1956 tersebut secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Januari 1957, berdasarkan Putusan Menteri Dalam Negeri No. Des.52/10/50 tanggal 12 Desember 1956. Namun demikian, peringatan hari ulang tahun provinsi ini dilakukan setiap tanggal 28 Januari, karena secara faktual, kelengkapan perangkat pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat baru terjadi pada tanggal 28 Januari 1957.⁹

Proses berjalannya pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat ditandai oleh serah terima jabatan Gubernur Kalimantan, Milano, kepada tiga orang Residen Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur di Banjarmasin tanggal 10 Januari 1957. Pejabat Gubernur Kalimantan Barat yang ditunjuk adalah Residen Adji Pangeran Afloes. Tanggal 24 April 1958 dilakukan serah terima pejabat gubernur kepada Djenal Asikin Joedadibrata. Lalu, DPRD Kalimantan Barat hasil pemilu tahun 1958 menetapkan JC. Oevang Oeray sebagai Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. JC. Oevang Oeray dilantik secara resmi tanggal 30 Januari 1960.¹⁰

Dalam UU No. 25 Tahun 1956, wilayah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari tujuh kabupaten/kota, yakni Kota Besar Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.¹¹

⁷ Sebelum terbentuk Provinsi Kalimantan Barat, wilayah ini berada dalam satu provinsi di Kalimantan dengan nama Provinsi Kalimantan, sesuai dengan UU Darurat No. 2 Tahun 1953.

⁸ Lembaran Negara No. 65 Tahun 1956. Berdasarkan UU No. 25/1956 ini, maka Provinsi Kalimantan Barat dibentuk bersamaan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan disahkannya UU No. 25/1956 ini, pemerintah sekaligus mencabut UU sebelumnya, yakni UU Darurat No. 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan, yang ditetapkan tanggal 7 Januari 1953. Lihat <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52685/uudrt-no-2-tahun-1953>, diunduh tanggal 30 Januari 2021.

⁹ Kelengkapan perangkat pemerintahan ini seperti terpilihnya Kepala Daerah, terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan perangkat lainnya. Lihat <https://pontianak.tribunnews.com/2017/01/26/sejarah-singkat-pemerintah-provinsi-kalimantan-barat>, diunduh tanggal 30 Januari 2021.

¹⁰ JC. Oevang Oeray dipilih oleh DPRD Kalimantan Barat dalam sidang tanggal 14 November 1959, dan ditetapkan sebagai Gubernur Kalimantan Barat berdasarkan Keppres No. 465/M tahun 1959 tanggal 24 Desember 1954. Ia mulai bekerja setelah dilantik oleh Mendagri Roehadi Winardja tanggal 30 Januari 1960. Lihat <https://pontianak.tribunnews.com/2017/01/26/sejarah-singkat-pemerintah-provinsi-kalimantan-barat>, diunduh tanggal 25 Januari 2021.

¹¹ Sumber: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-tentang-pembentukan-provinsi-kalimantan-barat-kalimantan-selatan-dan-kalimantan-timur>, diunduh tanggal 18 Januari 2021.

Dalam perjalanannya, saat ini Provinsi Kalimantan Barat mempunyai empat belas kabupaten/kota.

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis $2^{\circ}08'$ LU serta $3^{\circ}02'$ LS serta di antara $108^{\circ}30'$ BT dan $114^{\circ}10'$ BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°), tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.¹²

Provinsi ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara dari Pontianak, Entikong, Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.¹³

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai batas dengan sejumlah wilayah, termasuk dengan negara tetangga Malaysia, yakni sebagai berikut:

- Utara : Sarawak (Malaysia)
- Selatan : Laut Jawa dan Kalimantan Tengah
- Timur : Kalimantan Timur
- Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

Di sebelah Utara Provinsi Kalimantan Barat, terdapat lima kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara Jiran yaitu: Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang-Kapuas Hulu. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 147.307 km^2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur. Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia.¹⁴

Kalimantan Barat, seperti banyak provinsi-provinsi lain di Indonesia, memiliki populasi etnis yang beragam. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2018, dua kelompok etnis yang paling besar di Kalimantan Barat adalah etnis Dayak dan Melayu, kemudian disusul oleh etnis Jawa, Cina, Madura, Bugis. Kita hanya mendiskusikan etnis Dayak dan Melayu. Kelompok etnis "asli" penting lainnya, etnis Cina, Madura, dan Jawa, yang telah lama berperan, berkontribusi dan

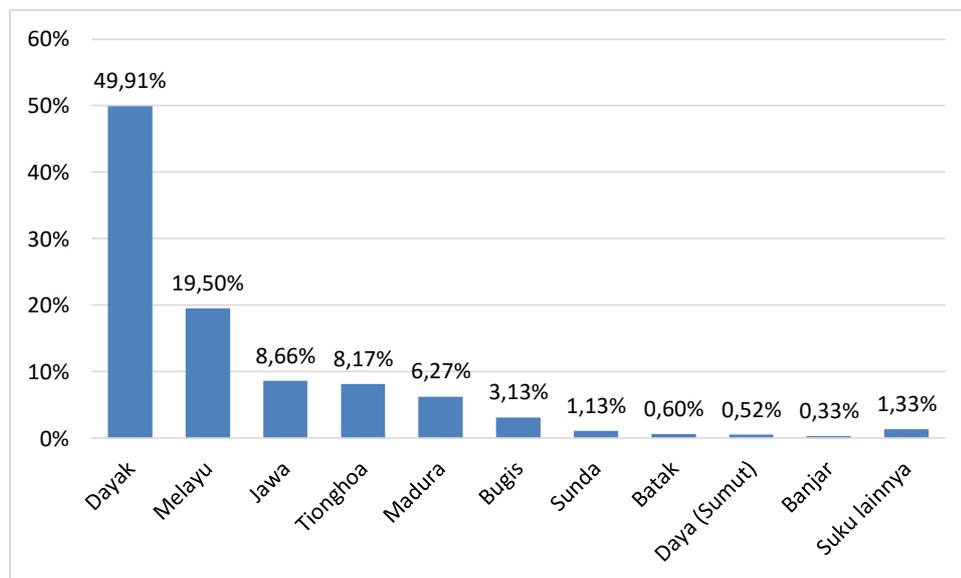
¹² Buka website: <https://kalbarprov.go.id/page/geografis>, diunduh tanggal 12 Desember 2020.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

berkiprah di provinsi ini, tidak akan dibahas, karena meski sudah mempunyai basis gerakan etnis yang terkonsolidasi di provinsi ini di masa kini, masih belum cukup mampu menggeser panggung politik identitas antara dayak dan melayu.

Gambar 1. Persentase etnis di Kalimantan Barat



Sumber: BPS Kalimantan Barat (2018)

Sebagai etnis mayoritas, Dayak dan Melayu¹⁵ tak hanya menjadi bagian penting bagi pemerintah pusat dalam pengaturan politik di Kalimantan Barat, namun seringkali dihadapkan pada kontestasi politik berdasarkan simbol-simbol etnis. Kedua etnis tersebut merasa sebagai penduduk asli Kalimantan Barat yang berhak menduduki berbagai posisi penting, misalnya pemimpin partai politik, anggota DPRD, kepala daerah, dan jabatan lainnya di birokrasi pemerintah daerah. Dalam catatan sejarah kepemimpinan di daerah, secara sosial dan politik orang-orang Melayu memang lebih dominan, karena para sultan dan raja yang pernah berkuasa di sejumlah kabupaten dan kota di Kalbar mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok etnis Melayu.¹⁶

¹⁵ Di Kalimantan Barat istilah Melayu seringkali merujuk kepada orang-orang Sumatera dan Semenanjung Malaysia, mereka pada masa lalu datang ke Kalbar untuk berdagang dan mengajarkan agama Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Dayak yang masuk agama Islam pun disebut sebagai orang Melayu. Di pedalaman Kalimantan Barat, orang Dayak yang masuk Islam mereka sebut dengan Senganan, yaitu kelompok masyarakat asli yang telah mengalami asimilasi dengan orang-orang Melayu melalui perdagangan dan kemudian menerima Islam menjadi agamanya. Di Kalbar setidaknya terdapat dua belas Kerajaan/Kesultanan Melayu yang pernah berkuasa.
¹⁶ Lihat analisis Yuver Kusnoto, (2016), Eksistensi Istana Kerajaan di Kalimantan Barat sebagai Sumber Belajar Sejarah, *Jurnal Historia*, Vol. 4, No. 1, hal. 19-28.

2.2 KONDISI DEMOGRAFIS KALIMANTAN BARAT

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berjumlah sekitar 5,07 juta jiwa, di mana sekitar 2,58 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,49 juta jiwa adalah perempuan.¹⁷ Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 147.307 km² atau lebih besar dari Pulau Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 35 Jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini tentunya kurang menguntungkan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah, khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya.

Tabel 1. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%)	
	2010	2019	2000-2010	2010-2019
Kabupaten Sambas	496.120	535.725	0,90	0,82
Kabupaten Bengkayang	215.277	255.261	2,01	1,87
Kabupaten Landak	329.649	377.305	1,59	1,48
Kabupaten Mempawah	234.021	264.225	1,42	1,32
Kabupaten Sanggau	408.468	470.224	1,65	1,54
Kabupaten Ketapang	427.460	512.783	2,15	2,00
Kabupaten Sintang	364.759	418.785	1,62	1,51
Kabupaten Kapuas Hulu	222.160	263.207	2,00	1,86
Kabupaten Sekadau	181.634	201.578	1,22	1,13
Kabupaten Melawi	178.645	208.417	1,81	1,68
Kabupaten Kayong Utara	95.594	112.715	1,94	1,80
Kabupaten Kubu Raya	500.970	579.331	1,69	1,59
Kota Pontianak	554.764	646.661	1,81	1,68
Kota Singkawang	186.462	222.910	2,11	1,96
Kalimantan Barat	4.395.983	5.069.127	1,66	1,56

Sumber: BPS, Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata antar wilayah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, maupun antar wilayah kawasan pantai dan bukan pantai atau perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang mencakup Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, dan Kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50 persen dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan rata-rata mencapai 43 jiwa lebih per kilometer persegi. Sebaliknya, tujuh kabupaten lain (bukan pantai) selain Kota

¹⁷ Kalimantan Barat dalam Angka 2020, hal. 89.

Pontianak secara rata-rata tingkat kepadatan penduduknya relatif lebih jarang. Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah 29.842 km² atau sekitar 20,33 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata sembilan jiwa per kilometer persegi.

Tabel di atas juga memperlihatkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat dan semua kabupaten/kota di provinsi ini untuk tahun 2010 dan 2019. Ditampilkan juga laju pertumbuhan penduduk di provinsi ini dan masing-masing kabupaten/kota untuk periode 2000-2010 dan 2010-2019. Terlihat bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2019, terjadi laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,56%, sebuah laju pertumbuhan yang cukup rendah, karena pertumbuhan penduduk dalam sembilan tahun tidak sampai 1 juta jiwa.

2.3 KONDISI EKONOMI KALIMANTAN BARAT

Ekonomi Kalimantan Barat tumbuh mengikuti pola ruang yang berisi sumberdaya alam yang berlimpah. Sumberdaya alam ini menjadi tulang punggung utama dalam pengembangan ekonomi wilayah, yang ditopang oleh berbagai daya dukung ekonomi lainnya. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tahun 2019 adalah 5%.¹⁸ Mengikuti kondisi nasional, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami kontraksi selama tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi provinsi ini juga bisa dilihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, PDRB Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku terus meningkat, yakni 161,35 Triliun rupiah tahun 2016, naik menjadi 177,49 Triliun rupiah tahun 2017, naik lagi menjadi 194,19 Triliun rupiah tahun 2018, dan PDRB tahun 2019 sebesar 212,32 Triliun rupiah.¹⁹

Menurut lapangan usaha, beberapa sektor menjadi *leading* dalam pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada tahun 2019, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,18%, industri pengolahan 19,51%, perdagangan 14,29%, konstruksi 12,31%, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial sebesar 8,44%, serta pertambangan dan penggalian 6,1%.²⁰ Sementara sektor-sektor lainnya cenderung berkontribusi lebih kecil dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat ini.

Sementara jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2015, provinsi ini mempunyai angka kemiskinan sebesar 8,03%, tahun 2016 menurun menjadi 7,87%, tahun 2017 naik sedikit menjadi 7,88%, dan tahun 2018

¹⁸ Kalimantan Barat dalam Angka 2020, hal. 513.

¹⁹ Kalimantan Barat dalam Angka 2020, hal. 521. Angka PDRB tahun 2019 merupakan sementara dan proyeksi yang dibuat oleh BPS.

²⁰ Kalimantan Barat dalam Angka 2020, hal. 527-530.

turun kembali menjadi 7,77%. Sedangkan angka kemiskinan provinsi ini tahun 2019 sebesar 7,49%.²¹

Dalam dua tahun terakhir, yakni tahun 2018 dan 2019, garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp. 409.287,- dan Rp. 438.555,-. Dari sisi jumlah penduduk miskin dalam dua tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Barat mempunyai penduduk miskin tahun 2018 sebesar 387.080 jiwa (7,77%) dan tahun 2019 sebanyak 378.410 jiwa (7,49%).²²

²¹ Kalimantan Barat dalam Angka 2020, hal. 296.

²² Kalimantan Barat dalam Angka 2020, hal. 297.

BAB 3

PENDEKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah menggunakan berbagai pendekatan. Sejak diundangkannya UU Desa tahun 2014, pembangunan desa dilakukan secara lebih terarah dengan dukungan yang cukup besar dari APBN. Di sisi lain, pembangunan desa ini juga perlu diukur keberhasilannya dengan berbagai indikator yang berbasis pada pendekatan tertentu.

Pemerintah menggunakan pendekatan Desa Membangun untuk mendorong percepatan desa. Pendekatan ini menghasilkan sebuah indeks yang dinamakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari 52 indikator untuk tiga dimensi, yakni dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Sejak tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) mulai menggunakan pendekatan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dengan 18 indikator yang berbasis pada SDGs.

Kalau kita melihat pendekatan Desa Membangun yang dibangun dari tiga dimensi, yakni ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi, maka pendekatan ini dikonstruksi dari konsep keberlanjutan (*sustainability*) yang juga berbasis pada tiga dimensi tersebut. Dengan kata lain, pendekatan Desa Membangun yang digunakan pemerintah dalam percepatan pembangunan desa sudah memperhatikan keseimbangan dalam pembangunan.

Di sisi lain, pendekatan keberlanjutan yang sudah menjadi trend dalam pembangunan juga diintroduksi oleh IDH dalam memperkuat pertumbuhan hijau (*green growth*), khususnya di Kalimantan Barat. Pendekatan IDH disebut dengan PPI atau Produksi, Proteksi dan Inklusi. Pendekatan berbasis lansekap ini mencoba mencari keseimbangan antara produksi komoditas, proteksi lingkungan hidup yang mempunyai nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/HCV*) atau Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HSC*), serta memastikan adanya inklusi kepada petani dan masyarakat desa.

Kalau kita bandingkan dengan pendekatan Desa Membangun dan SDGs, terdapat saling keterhubungan antara ketiganya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembangunan desa. Jika pendekatan Desa Membangun dan SDGs lebih mengarah pada pembangunan desa secara keseluruhan, pendekatan PPI fokus pada komoditas dan potensi lingkungan hidup di tingkat lansekap.

Pendekatan Desa Membangun digunakan secara keseluruhan dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan PPI akan dianalisis untuk melihat keterhubungan dengan pembangunan desa. Keterhubungan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan akan mendukung keseimbangan antara produksi dan proteksi di satu sisi, dan memperkuat inklusi masyarakat desa di sisi lain.

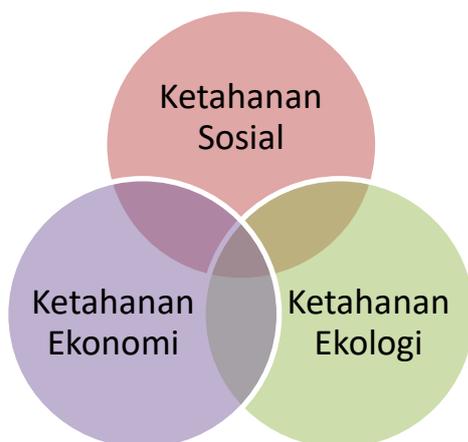
3.1 PENDEKATAN DESA MEMBANGUN

Pendekatan Desa Membangun merupakan sebuah pendekatan yang digunakan oleh Kementerian Desa PDTT untuk menilai pembangunan desa. Konsep ini sudah digunakan sejak tahun 2016 yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Konsep ini sebenarnya berakar dari pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang berlandaskan pada tiga aspek utama dalam menilai keberlanjutan: sosial, ekonomi, dan ekologi.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep yang dikembangkan dalam Brundtland report tahun 1987. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa "*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*" Intinya adalah bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah pembangunan yang mencoba memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.²³

Konsep ini kemudian berkembang dan dikerucutkan dalam tiga aspek, yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perlindungan lingkungan hidup (*environmental protection*), dan keadilan sosial (*social equality*). Dalam perkembangannya, konsep ini menjadi landasan bagi pengembangan kerangka global yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2015-2030.

Gambar 2. Pendekatan Membangun Desa



Berbasis pada konsep pembangunan berkelanjutan ini, pemerintah tahun 2015 merumuskan konsep Indeks Desa Membangun, yang terdiri dari 52 indikator untuk tiga dimensi, yakni dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan IDH, ditambah 14

²³ Lihat <https://www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development>, diunduh tanggal 1 Pebruari 2021.

indikator lagi untuk melengkapi 52 indikator yang sudah ada. Penambahan indikator ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi pembangunan desa dengan konteks lokal Kalimantan Barat.

Semua dimensi, aspek, variabel, dan indikator yang digunakan dalam konsep Indeks Desa Membangun yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT adalah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Dimensi, aspek, variabel dan indikator dalam konsep desa membangun

	DIMENSI/ASPEK/VARIABEL	INDIKATOR
D1	KETAHANAN SOSIAL	
A1	KESEHATAN	
V1	<i>Pelayanan kesehatan</i>	1. Waktu tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit 2. Tersedia tenaga kesehatan, bidan, dokter, dan nakes lainnya.
V2	<i>Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan</i>	3. Akses ke Poskesdes, Polindes, dan Posyandu 4. Tingkat aktivitas Posyandu
V3	<i>Jaminan kesehatan</i>	5. Tingkat kepesertaan BPJS
A2	PENDIDIKAN	
V4	<i>Akses pendidikan dasar dan menengah</i>	6. Akses pendidikan dasar SD/MI < 3 km 7. Akses ke SMP/MTS < 6 km 8. Akses ke SMU/SMK < 6 km
V5	<i>Akses pendidikan non formal</i>	9. Kegiatan pemberantasan buta aksara 10. Kegiatan PAUD 11. Kegiatan PKBM/Paket ABC
V6	<i>Akses ke pengetahuan</i>	12. Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa
A2	MODAL SOSIAL	
V7a	<i>Kohesifitas sosial dan institusi sosial²⁴</i>	Saling membantu antar individu/keluarga/kelompok Peran institusi sosial desa (adat dan agama)
V7	<i>Memiliki solidaritas sosial</i>	13. Kebiasaan gotong-royong di desa 14. Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar 15. Ketersediaan fasilitas/lapangan olah raga 16. Terdapat kegiatan kelompok olah raga

²⁴ Variabel dan indikator yang tidak mempunyai nomor merupakan variabel dan indikator tambahan oleh tim peneliti.

V8	Toleransi	17. Warga desa menerima adanya perbedaan suku/etnis di desa
		18. Warga desa terbiasa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda
		19. Warga desa menerima adanya perbedaan agama yang dianut oleh warga di desa
V9	Rasa aman penduduk	20. Warga desa membangun pemeliharaan poskamling
		21. Partisipasi warga mengadakan siskamling
		22. Tingkat kejadian perkelahian massal di desa
		23. Penyelesaian/perdamaian perkelahian massal yang sering terjadi
V10	Kesejahteraan sosial	24. Terdapat akses ke sekolah luar biasa
		25. Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial, dan pengemis)
		26. Terdapat penduduk yang bunuh diri
V10a	Partisipasi dan kesetaraan gender	Tingkat partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan desa
		Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki di desa sesuai dengan budaya lokal
A3	PEMUKIMAN	
V11	Akses air bersih dan air minum layak	27. Mayoritas penduduk desa mempunyai akses air minum layak
		28. Akses penduduk desa memiliki air untuk mandi dan cuci
V12	Akses ke sanitasi	29. Mayoritas penduduk desa memiliki jamban
		30. Terdapat tempat pembuangan sampah
V13	Akses ke listrik	31. Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik
V14	Akses informasi dan komunikasi	32. Penduduk desa mempunyai telepon seluler dan sinyal kuat
		33. Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing
		34. Terdapat akses internet
D2	KETAHANAN EKONOMI	
V15	Keragaman produksi masyarakat desa	Adanya potensi ekonomi desa (sumberdaya alam, lahan, teknologi, dsb)
		35. Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk
		Adanya industri rumah tangga untuk nilai tambah komoditas ekonomi
V16	Tersedianya Pusat Pelayanan	36. Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan,

	Perdagangan	pasar permanen dan semi permanen)
		37. Terdapat sektor perdagangan di pemukiman (warung dan minimarket)
		Akses pasar online
V17	Akses distribusi/logistic	38. Terdapat kantor pos dan jasa logistic
V18	Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan	39. Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta)
		40. Tersedianya BPR
		Tersedianya lembaga keuangan mikro di desa
		41. Akses penduduk ke kredit
V19	Lembaga ekonomi	42. Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)
		43. Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan
		Kapasitas BUMDes dalam pengembangan bisnis
		Kapasitas SDM desa untuk mempercepat pengembangan ekonomi desa
V20	Keterbukaan wilayah	44. Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek regular dan jam operasi angkutan umum)
		45. Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu)
		46. Kualitas jalan desa (jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah)
D3 KETAHANAN EKOLOGI		
V21	Potensi pencemaran lingkungan	47. Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara
		48. Terdapat sungai yang terkena limbah
V22	Potensi rawan bencana alam	49. Pencemaran air, tanah dan udara
		50. Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan)
		51. Upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini, dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)
		52. Upaya antisipasi dan mitigasi bencana alam yang ada di desa
V22a	SDA dan tata guna lahan	Pola kepemilikan lahan
		Ada tidaknya konflik lahan di desa
		Peran adat dalam perlindungan hutan dan lingkungan

hidup di desa
Potensi perdagangan karbon

Dalam konsep Desa Membangun tersebut, selain terdapat 52 indikator, tim peneliti juga menambah 14 indikator lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokalitas Kalimantan Barat. Ke 14 indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saling membantu antar individu/keluarga/kelompok
2. Peran institusi sosial desa (adat dan agama)
3. Tingkat partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan desa
4. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki di desa sesuai dengan budaya lokal
5. Adanya potensi ekonomi desa (sumberdaya alam, lahan, teknologi, dsb)
6. Adanya industri rumah tangga untuk nilai tambah komoditas ekonomi
7. Akses pasar online
8. Tersedianya lembaga keuangan mikro di desa
9. Kapasitas BUMDes dalam pengembangan bisnis
10. Kapasitas SDM desa untuk mempercepat pengembangan ekonomi desa
11. Pola kepemilikan lahan
12. Ada tidaknya konflik lahan di desa
13. Peran adat dalam perlindungan hutan dan lingkungan hidup di desa
14. Potensi perdagangan karbon

3.2 PENDEKATAN SDGs DESA

Pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga berakar dari kerangka sustainable development yang berkembang dalam Brundtland report tahun 1987. Secara global, SDGs ini dideklarasikan September 2015. Konsep SDGs ini merupakan hasil dari negosiasi pada agenda pembangunan setelah 2015 atau *post 2015 development agenda*. Proses ini menghasilkan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau *2030 agenda for sustainable development* dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2015. KTT inilah yang menghasilkan apa yang kita kenal sekarang dengan Sustainable Development Goals (SDGs).²⁵

Indonesia meratifikasi SDGs dalam pendekatan pembangunan melalui Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan Peraturan Presiden ini, pemerintah kemudian menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan untuk

²⁵ Lihat <https://sdgs.un.org/goals>, diunduh tanggal 2 Pebruari 2021.

pencapaian SDGs secara strategis. Dalam RPJMN 2020-2024, pendekatan SDGs ini sudah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.

Karena itu juga, sejak tahun 2020, Kementerian Desa PDTT mengembangkan konsep SDGs Desa yang berbasis pada 17 tujuan SDGs ini. SDGs Desa ini diatur dalam Permendesa No. 13 tahun 2020, yang memuat 18 tujuan²⁶, yakni:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

3.3 PENDEKATAN PRODUKSI, PROTEKSI, DAN INKLUSI

Pendekatan PPI²⁷ atau Produksi, Proteksi, dan Inklusi merupakan sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh IDH (*Initiatief Duurzame Handel*) untuk mendukung pertumbuhan hijau dan keberlanjutan berbasis bentang alam (*lanscape*). IDH percaya bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas yang terpisah dan tidak terintegrasi cenderung gagal dalam mengatasi/mengurangi permasalahan lingkungan hidup, seperti deforestasi, di tingkat lansekap. Pengelolaan di tingkat lansekap merupakan pengelolaan berbasis pada kesepakatan semua pihak.

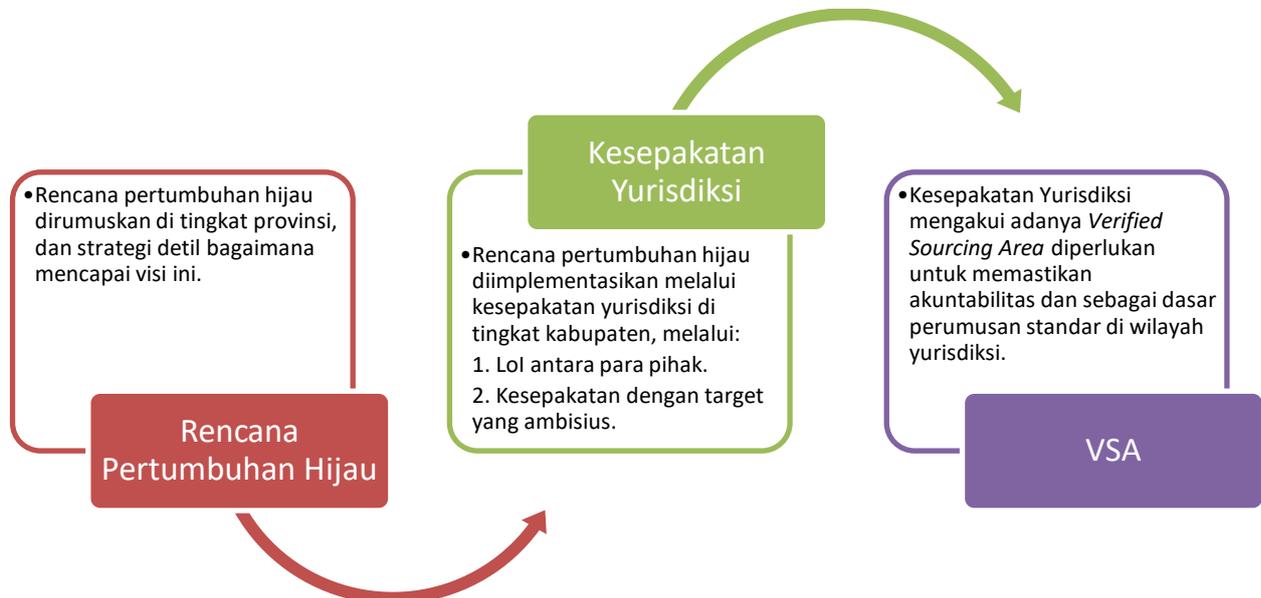
²⁶ Sumber: <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/>, diunduh tanggal 30 Januari 2021.

²⁷ Penjelasan dalam bagian ini diambil dari sejumlah presentasi (ppt) dari tim IDH Indonesia tentang pendekatan PPI dalam mendukung pertumbuhan hijau di Kalimantan Barat.

Pendekatan PPI yang dikembangkan oleh IDH diimplementasikan berbasis yurisdiksi atau wilayah hukum tertentu. PPI mencoba mencari keseimbangan antara produksi dan proteksi/konservasi dan memastikan keterlibatan petani/warga desa dalam rantai nilai, sehingga tidak tereksklusi dari rantai nilai yang ada dalam wilayah yurisdiksi tertentu.

Untuk memastikan berjalannya keseimbangan antara produksi, proteksi, dan inklusi (PPI), IDH merumuskan kerangka sebagai berikut:

Gambar 3. Pendekatan IDH berbasis Yurisdiksi

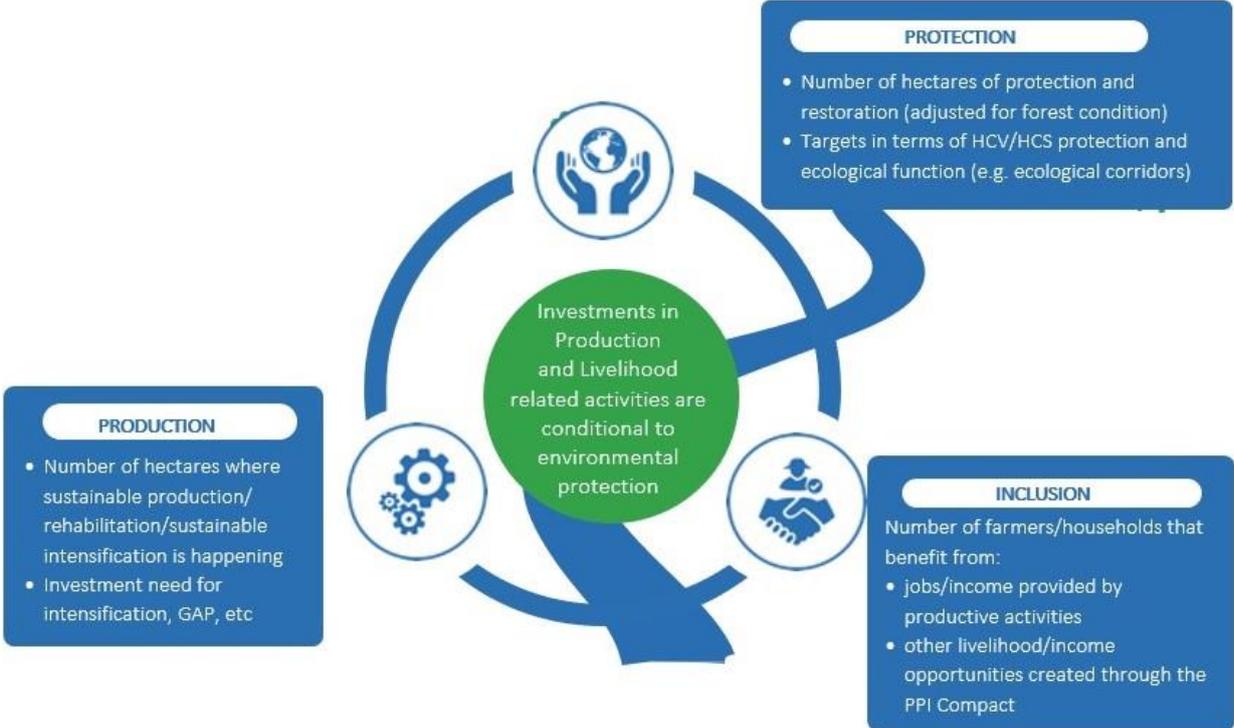


Seperti sudah disebutkan di atas bahwa Kesepakatan PPI (PPI Compact) dibangun di tingkat yurisdiksi atau kabupaten. Untuk membangun kesepakatan PPI, para pihak yang terlibat memperkuat komitmen bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan hijau sesuai target pemerintah provinsi bisa dicapai di tingkat wilayah yurisdiksi. Karena itu, investasi hijau dan pengembangan sumber penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) di tingkat lansekap menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari pendekatan PPI ini, yang secara langsung akan mendukung proteksi hutan dan lingkungan hidup.

PPI harus dibangun dengan target yang jelas dan *smart*. PPI ini juga harus merumuskan pembagian peran dan tanggung jawab antar pihak, bagaimana tatakelolanya, pendanaan, jangka waktu pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi di tingkat lansekap.

Dalam skema PPI, pertumbuhan hijau bisa dicapai dengan cara menyeimbangkan produksi proteksi di tingkat lansekap. Produksi komoditas harus berada dalam wilayah yang terverifikasi dan tidak merusak kawasan hutan. Dalam wilayah yang terverifikasi ini, berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, bisa dikembangkan HCV/HCS untuk meningkatkan proteksi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pelibatan masyarakat desa dan petani, serta peningkatan pendapatan mereka akan memperkuat inklusi dalam rantai nilai komoditas ini. Gambar di bawah ini menjelaskan ruang lingkup pendekatan PPI.

Gambar 4. Pendekatan PPI



BAB 4

KONDISI KETAHANAN DESA DI KALIMANTAN BARAT

Ketahanan masyarakat desa merupakan faktor penting yang bisa menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Mengacu pada konsep Indeks Desa Membangun (IDM), ketahanan masyarakat desa ini bisa dilihat dari tiga dimensi, yakni ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Ketiga dimensi ketahanan masyarakat desa ini bersifat saling berhubungan. Permasalahan yang terjadi dalam dimensi yang satu akan berpengaruh pada dimensi lainnya. Karena itu, ketiga dimensi ini perlu diperhatikan secara seimbang untuk memastikan bahwa masyarakat desa mempunyai ketahanan yang bagus dalam menjalani kehidupannya di berbagai arena.

Strategi pembangunan desa merupakan cara yang digunakan dengan memperhatikan kondisi, kecenderungan, dan potensi yang ada di desa, baik dari sisi sosial, ekonomi dan ekologi, untuk mempercepat pembangunan desa. Percepatan pembangunan desa bisa dimaknai dalam beberapa perspektif. *Pertama*, percepatan pembangunan untuk meningkatkan status desa dari status lebih rendah menjadi status lebih tinggi. Misalnya, perubahan dari status sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, atau status desa maju menjadi mandiri, dan sebagainya.

Kedua, percepatan pembangunan untuk menangani dan menyelesaikan berbagai tantangan di tingkat desa. Misalnya, percepatan pembangunan untuk membuka akses isolasi wilayah bagi desa-desa terpencil, atau memperkuat akses masyarakat desa kepada layanan kesehatan dan pendidikan, atau bagaimana meningkatkan peran CSR untuk pembangunan desa, dan sebagainya. Dengan kata lain, tujuan percepatan pembangunan desa adalah dalam rangka menangani berbagai tantangan di tingkat desa.

Ketiga, percepatan pembangunan desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, sekaligus menangani kemiskinan di tingkat desa. Percepatan pembangunan ekonomi desa akan fokus pada upaya untuk peningkatan kapasitas SDM dalam ekonomi dan kewirausahaan, akses pada pasar, lembaga keuangan, dan teknologi pendukung produksi serta berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa-desa tersebut.

Tentu saja, strategi percepatan pembangunan desa seharusnya diarahkan untuk pembangunan secara menyeluruh, secara utuh, di mana semua dimensi, aspek, variabel, dan indikator yang ada dalam konsep IDM harus ditangani dan ditingkatkan kualitas pencapaiannya secara keseluruhan.

Namun demikian, karena pembangunan desa bukanlah pembangunan yang dimulai dari nol, maka strategi pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan berbagai dimensi, aspek, variabel, dan indikator yang masih lemah. Sementara yang sudah kuat harus tetap dijaga dan dipertahankan sebagai dasar untuk penguatan semua hal yang masih lemah di tingkat desa.

Karena itu, dibutuhkan proses pemetaan isu-isu strategis desa yang akan dijadikan landasan perumusan strategi percepatan pembangunan desa untuk semua tipologi desa yang berbeda-beda. Isu strategis adalah isu-isu penting menyangkut masalah, tantangan, dan dinamika di dalam masyarakat desa yang perlu ditangani dan diselesaikan untuk jangka panjang. Jadi, isu strategis ini menyangkut isu penting, baik dari sisi:

- kompleksitas masalah yang dihadapi;
- urgensi untuk ditangani segera oleh masyarakat desa;
- berdampak luas pada kehidupan masyarakat desa; maupun
- mempunyai pengaruh untuk jangka panjang pada kehidupan masyarakat desa.

Karena itu, pada bagian ini, analisis akan dilakukan dengan pemetaan kondisi dan kecenderungan untuk masing-masing tipologi desa, lalu dilakukan pemetaan terhadap isu-isu strategis desa, dan diakhiri dengan perumusan strategi percepatan pembangunan desa-desa sesuai dengan tipologinya.

Dari sisi tipologi desa, penelitian ini menemukan beberapa tipologi sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni:

1. Desa urban;
2. Desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif;
3. Desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif;
4. Desa pesisir dan kawasan industri strategis nasional; dan
5. Desa terpencil dan perbatasan.²⁸

4.1 KONDISI KETAHANAN DESA URBAN

4.1.1 Kondisi Desa Urban

Desa urban²⁹ merupakan desa-desa yang secara geografis terletak dekat dengan kota, baik kota yang menjadi ibukota provinsi maupun kota-kota yang menjadi ibukota kabupaten. Desa urban biasanya juga mengalami proses urbanisme yang sangat kuat, yakni transformasi budaya kota ke dalam budaya dan gaya hidup masyarakat desa urban. Kedekatan secara wilayah membuat gaya hidup masyarakat kota dan desa urban cenderung hampir sama. Bahkan, sebagian warga kota menetap di desa-desa urban, atau sebagian warga desa urban bekerja di kota.

Desa-desa urban menghadapi tantangan pembangunan yang berkaitan dengan kompleksitas perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah urban. Kompleksitas ini mengharuskan warga dan

²⁸ Untuk desa terpencil dan perbatasan, karena sejumlah limitasi, tidak dilakukan penelitian lapangan. Karena itu, analisis strategi dalam bab ini akan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang sudah diperoleh peneliti yang pernah melakukan penelitian sebelumnya di desa-desa wilayah ini pada tahun 2017 dan 2018.

²⁹ Dalam penelitian ini, desa urban yang diteliti adalah Desa Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya.

pemerintah desa urban untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang berlangsung cepat. Serbuan informasi dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memaksa warga desa urban untuk membangun strategi yang lebih kuat, sehingga tetap bisa bertahan dalam berbagai arena perubahan di wilayah urban.

Berbeda dengan tipologi desa-desa lainnya, desa-desa urban diuntungkan oleh letaknya yang dekat dengan kota. Kondisi ini membawa dampak positif kepada warga desa. Warga desa-desa urban bisa mengakses semua fasilitas yang dimiliki warga kota seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, pasar, lembaga keuangan, dan fasilitas lainnya di kota. Selain itu, desa-desa urban sendiri berkembang menjadi wilayah penyangga dan perluasan kota. Dengan berbagai kondisi yang menguntungkan, desa-desa urban umumnya mempunyai status IDM sebagai desa maju atau mandiri.

Berbagai keterbatasan akses yang dialami oleh desa-desa terpencil, pedalaman, dan desa pesisir yang ada di Kalimantan Barat, cenderung tidak banyak dialami oleh warga desa urban ini. Karena itu, tantangan dalam membangun desa urban juga berbeda dengan desa-desa dengan tipologi lainnya.

Tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa urban di Kalimantan Barat adalah kompleksitas perubahan yang sangat cepat di perkotaan yang berdampak secara langsung kepada desa-desa urban ini, mencakup serbuan budaya dan gaya hidup kota (*urbanisme*)³⁰, tekanan perkembangan kota terhadap desa-desa urban, serta beban ekonomi kota yang berdampak pada dinamika di desa-desa urban. Menghadapi kompleksitas perubahan sosial dan ekonomi kota yang berdampak pada desa-desa urban, memaksa desa-desa urban untuk beradaptasi terhadap perubahan ini. Desa-desa yang bisa beradaptasi dengan baik, maka akan cepat berkembang dalam berbagai aspek. Sebaliknya, desa-desa urban yang tidak mampu beradaptasi terhadap kompleksitas kota, maka ia akan menjadi “pinggiran” bagi kota itu sendiri.

Menyadari bahwa desa-desa urban merupakan wilayah penyangga bagi kota, maka desa-desa urban seharusnya menjadi wilayah yang mampu memproduksi kebutuhan ekonomi kota di satu sisi, sambil terus mempertahankan dinamika ketahanan sosial dan ekologi desa yang tentu saja berbeda dengan kota. Desa-desa urban ini cenderung tidak menghadapi persoalan sosial yang serius dibandingkan dengan desa-desa dengan tipologi lain, misalnya desa terpencil dan desa pedalaman. Akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, dan kondisi modal sosial, cenderung cukup kuat di desa-desa urban ini. Satu-satunya tantangan utama yang dihadapi oleh warga desa urban (kasus Desa Sungai Rengas), adalah akses air bersih dari PDAM yang masih terbatas. Namun demikian, warga desa urban masih mempunyai alternatif lain sumber air bersih dari sumur gali, tampungan air hujan, dan lain-lain.

³⁰ Urbanisme berbeda dengan urbanisasi. Dalam Sosiologi, urbanisme adalah berkembangnya gaya hidup dan budaya kota (urban) di desa-desa. Sedangkan urbanisasi adalah perpindahan penduduk desa ke kota

Sebagai wilayah penyangga, desa-desa urban harus diarahkan untuk menjadi lumbung pangan bagi wilayah perkotaan. Karena itu, konversi lahan pertanian yang berlangsung sangat cepat menjadi berbagai areal perumahan, pertokoan, dan bangunan lainnya, perlu ditinjau kembali oleh pemerintah. Berkurangnya lahan-lahan pertanian ini akan berdampak pada kontribusi desa-desa urban sebagai penyangga perkotaan di satu sisi, dan mengurangi lapangan kerja di sektor pertanian ke depan di sisi lain. Tekanan terhadap lahan pertanian ini memang tidak bisa dihindari tatkala kebutuhan lahan untuk pembangunan berbagai infrastruktur berjalan dengan cepat. Namun, pemerintah seharusnya memikirkan keamanan pangan jangka panjang, baik untuk warga desa maupun untuk perkotaan. Kebutuhan lahan untuk infrastruktur bisa diarahkan untuk dikembangkan di wilayah yang bukan pertanian, sehingga lahan-lahan pertanian tetap terjaga.

Desa urban merupakan desa yang secara wilayah sudah terbuka dan sangat dekat dengan kota. Desa-desa urban juga cenderung sudah terhubung dengan baik antar wilayah dengan desa-desa lain, kecamatan lain, dan bahkan kota-kota lain. Karena itu, keterhubungan ini berdampak pada terjadinya konektivitas kegiatan ekonomi antar wilayah, baik antar wilayah desa, dan antar wilayah desa dan kota. Kondisi ini juga menciptakan saling ketergantungan antar wilayah desa dengan kota. Saling keterhubungan ini perlu diperkuat untuk saling mengisi dalam pengembangan potensi ekonomi masing-masing wilayah desa dan kota, sehingga bisa saling melengkapi kebutuhan ekonomi urban.

Karena itu, kerjasama kolaboratif antara desa dan kota, dan antara desa-desa urban di sekitar kota menjadi sebuah kebutuhan untuk saling melengkapi potensi ekonomi masing-masing desa urban untuk menyangga kota. Kolaborasi antara desa dan kota ini tidak bisa dibiarkan terjadi secara alami mengikuti dan tunduk pada sistem ekonomi pasar, melainkan juga harus diarahkan melalui kolaborasi formal untuk saling memperkuat kerjas sama antar desa-desa urban, dan antara desa urban dengan kota. Kolaborasi formal ini termasuk misalnya dengan transfer fiskal dari kota ke desa-desa urban dalam rangka memperkuat penyangga ekonomi kota.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan di desa-desa urban sudah berkembang lebih maju. Produk-produk desa urban dalam berbagai ragam mulai dipasarkan secara online sehingga bisa menjangkau pembeli yang lebih luas. Kewirausahaan yang lebih inovatif ini umumnya dikembangkan oleh generasi muda milenial yang mempunyai literasi lebih bagus dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sayangnya, di tingkat desa, kelembagaan ekonomi desa dalam bentuk BUMDes belum banyak berkembang, khususnya di Desa Sungai Rengas. Ada beberapa kemungkinan mengapa BUMDes belum berkembang di desa urban. *Pertama*, perkembangan ekonomi warga yang jauh lebih maju dengan akses ke lembaga keuangan dan pasar yang lebih mudah, menyebabkan kelembagaan ekonomi BUMDes tidak menjadi prioritas perhatian warga dan pemerintah desa. *Kedua*, bisnis yang dikembangkan oleh individu di desa-desa urban lebih cepat berkembang dibandingkan dengan bisnis kelompok dalam BUMDes dan sejenisnya.

Dari sisi ketahanan ekologi, tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa urban adalah konflik sosial berbasis lahan, di mana terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan warga. Banyak beredar sertifikat tanah ganda di desa ini. Jika tumpang tindih ini tidak ditangani oleh pemerintah dengan baik, akan berpotensi terjadinya konflik sosial berbasis lahan yang lebih luas di desa-desa urban pada masa mendatang. Ada kecenderungan lahan-lahan di desa urban diminati oleh banyak pihak sebagai wilayah pengembangan kota. Karena itu, potensi konflik lahan ini harus dimitigasi sedini mungkin sebelum menjadi konflik sosial yang lebih besar di masa yang akan datang.

Tantangan ekologis lain bagi desa-desa urban adalah bencana banjir yang terjadi setiap tahun, khususnya desa-desa urban yang terletak di dataran rendah dan di pinggir sungai atau laut. Tentu saja, bencana banjir ini terkait dengan tata ruang yang perlu diperbaiki untuk mitigasi banjir di masa yang akan datang. Banjir tidak saja mendatangkan kerugian material, melainkan juga memperlihatkan ketidakmampuan kita dalam mengelola ruang dan sumberdaya alam secara baik. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan upaya mitigasi bencana banjir secara serius ke depan.

Tabel 3. Isu strategis pembangunan desa urban

No.	Dimensi Isu	Isu Strategis Desa Urban
1.	Dimensi Ketahanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> – Berkembangnya gaya hidup kota (urbanisme) di desa-desa urban. – Akses terhadap air bersih dari PDAM yang masih sangat terbatas di desa urban.
2.	Dimensi Ketahanan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> – Desa urban harus diperkuat sebagai desa-desa penyangga ekonomi kota, khususnya pertanian. Karena itu, konversi lahan pertanian harus dihentikan. – Keterhubungan dan saling ketergantungan antar wilayah secara ekonomi yang harus diperkuat. – Penguatan kolaborasi antar wilayah desa-desa urban dan perkotaan, termasuk peluang transfer fiskal dari kota ke desa-desa urban. – Kewirausahaan masyarakat desa urban mulai tumbuh dan berkembang dalam berbagai sektor ekonomi. – Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses pasar bagi produk ekonomi desa urban. – Kelembagaan ekonomi desa (BUMDes) belum berkembang.
3.	Dimensi Ketahanan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> – Potensi konflik berbasis lahan di wilayah pemukiman desa urban karena tumpang tindih kepemilikan lahan. – Bencana banjir yang masih menjadi tantang desa-desa urban, karena umumnya terletak di pinggir sungai atau pinggir laut.

4.1.2 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Urban

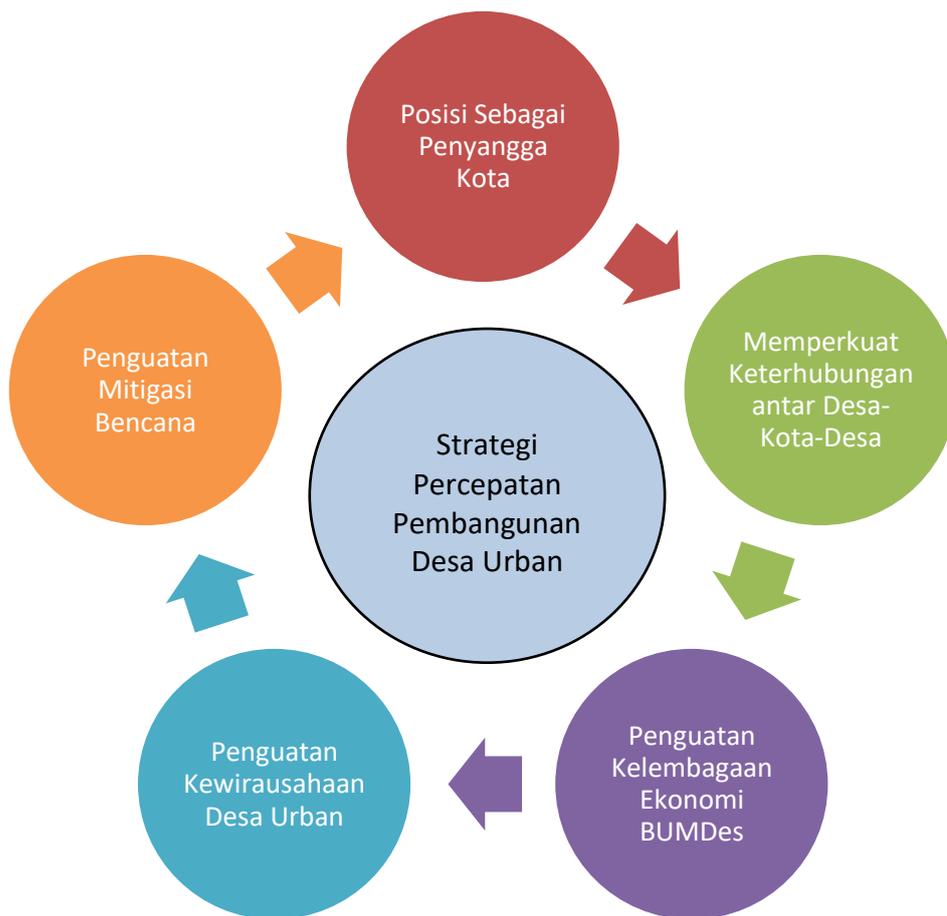
Berdasarkan berbagai isu strategis desa-desa urban di Kalimantan Barat, maka dibutuhkan strategi percepatan pembangunan kawasan desa urban, yakni sebagai berikut:

1. Dari sisi status desa, sebagian besar desa-desa urban mempunyai status sebagai desa mandiri atau desa maju. Berdasarkan kondisi ini, maka percepatan pembangunan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki berbagai kondisi yang masih lemah, baik dari sisi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Meskipun sudah berstatus mandiri, namun banyak indikator IDM yang masih perlu diperkuat. Di desa Sungai Rengas misalnya, akses air bersih melalui PDAM masih belum ada.
2. Tantangan utama yang dihadapi desa urban adalah bagaimana menempatkan desa-desa urban sebagai penyangga ekonomi kota, khususnya penyangga pertanian. Desa-desa urban harus diarahkan menjadi desa penyangga yang memproduksi berbagai komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan kota. Karena itu, konversi lahan pertanian di desa-desa urban yang berlangsung cepat harus dihentikan oleh pemerintah. Kebutuhan pembangunan infrastruktur dan lainnya harus diarahkan pada lahan-lahan non-pertanian.
3. Pemerintah perlu memperkuat keterhubungan antar wilayah, baik keterhubungan antar desa-desa urban dan antara desa urban dengan kota. Keterhubungan antar wilayah ini membuka ruang kerjasama kolaboratif antar desa-desa urban dengan kota sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing. Pemerintah kota juga bisa menggunakan mekanisme transfer fiskal ke desa-desa urban untuk memperkuat kerjasama ini. Misalnya, untuk memperkuat produksi beras, pemerintah kota melalui dinas pertanian atau BUMD melakukan kerjasama dan transfer fiskal ke petani di wilayah desa urban.
4. Kelembagaan ekonomi desa urban dalam bentuk BUMDes sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan, meskipun saat ini belum berjalan di Desa Sungai Rengas. BUMDes bisa memanfaatkan potensi dana desa untuk menggerakkan roda ekonomi desa, menyerap lapangan kerja di desa urban, serta membangun berbagai inovasi dalam pengembangan ekonomi desa berbasis sumberdaya yang ada di desa. Selain itu, BUMDes juga bisa berkolaborasi dengan berbagai sektor swasta yang ada di kota untuk pengembangan bisnis di desa-desa urban.
5. Kewirausahaan dalam masyarakat desa urban sudah mulai tumbuh dan menguat. Kewirausahaan ini berkembang dalam berbagai sektor, baik perdagangan, jasa, dan sektor riil. Kewirausahaan ini umumnya digerakkan oleh kaum muda dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemasaran untuk perluasan pasar. Menghadapi kondisi ini, pemerintah perlu menciptakan iklim dan

ekosistem kewirausahaan yang sehat melalui kebijakan ekonomi lokal dan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi.

6. Dari sisi ketahanan ekologis, pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi bencana banjir yang setiap tahun melanda desa-desa urban. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan perbaikan tata ruang kota dan desa-desa urban, karena secara ekologis desa-desa urban dan kota saling terhubung. Perbaikan tata ruang memang membutuhkan proses politik yang rumit dan panjang. Namun demikian, jika pemerintah tidak memulainya dari sekarang, maka pelanggaran tata ruang yang berdampak pada berbagai risiko ekologis akan semakin membesar di masa yang akan datang.

Gambar 5. Strategi dalam Percepatan Pembangunan Desa Urban



4.2 KONDISI KETAHANAN DESA PEDALAMAN DAN KIE

4.2.1 Kondisi Desa Pedalaman dan KIE

Desa pedalaman³¹ dan kawasan industri ekstraktif (KIE) merupakan desa-desa yang terletak di pedalaman Kalimantan Barat dan dikelilingi oleh berbagai industri ekstraktif berbasis lahan, baik pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan berbagai industri ekstraktif lainnya. Kondisi desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini cukup beragam. Dari sisi status IDM, sebagian besar desa-desa pedalaman dan di kawasan industri ekstraktif ini adalah desa tertinggal. Hanya sebagian kecil yang merupakan desa dengan status mandiri dan maju.³²

Sebagai desa-desa pedalaman yang dikelilingi oleh berbagai industri ekstraktif berbasis lahan, maka keberadaan industri ekstraktif ini tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa dan kehidupan masyarakat desa. Kehadiran industri ekstraktif ini secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat desa, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan ekologi. Kehadiran industri ekstraktif seharusnya membawa manfaat bagi perbaikan kehidupan secara signifikan bagi warga desa.

Sayangnya, belum ada evaluasi menyeluruh mengenai dampak kehadiran perusahaan ekstraktif bagi perbaikan ekonomi dan kesejahteraan warga desa-desa pedalaman dan dikelilingi oleh berbagai industri ekstraktif ini. Penelitian ini akan membuat analisis umum tentang kontribusi industri ekstraktif di desa-desa pedalaman, namun tidak bisa mendalam karena fokus penelitian ini bukan pada industri ekstraktifnya, melainkan pada berbagai dimensi pembangunan desa yang merujuk pada konsep membangun desa, yakni dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi.

Tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif di Kalimantan Barat adalah akses menuju desa yang cukup jauh dari perkotaan, baik ibukota provinsi maupun ibukota kabupaten. Sebagian desa bisa diakses dengan lebih mudah karena terletak di jalur lintas Trans Kalimantan, namun sebagian besar lagi tidak bisa diakses dengan mudah, dan harus menggunakan kombinasi transportasi darat dan air/sungai. Namun demikian, akses ke desa-desa pedalaman ini masih lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan akses ke desa-desa terpencil dan perbatasan, seperti Desa Nanga Jelundung di Kabupaten Sintang.³³

Bagaimanapun, akses ke lokasi desa dan keterbukaan wilayah desa-desa pedalaman ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan desa-desa pedalaman dan dikelilingi oleh berbagai industri ekstraktif ini, yang akan mempengaruhi strategi pembangunan desa secara

³¹ Dalam penelitian ini, desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif yang diteliti adalah Desa Teraju di Kabupaten Sanggau, Desa Sungai Deras di Kabupaten Kubu Raya, dan Desa Botuh Bosi di Kabupaten Ketapang.

³² Sebagai contoh, dari 7 desa yang ada di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, hanya 1 desa yakni Desa Teraju yang mempunyai status IDM sebagai desa mandiri sejak tahun 2019. Sisanya merupakan desa tertinggal dan berkembang.

³³ Untuk analisis desa terpencil dan perbatasan, lihat bagian 7.6 laporan ini.

keseluruhan. Karena itu, untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan, kita perlu memahami bagaimana kondisi dan kecenderungan ketahanan desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini, baik dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi.

Seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa tantangan utama pembangunan desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif di Kalimantan Barat adalah (1) akses ke wilayah desa (keterbukaan wilayah desa), dan (2) kontribusi industri ekstraktif kepada pembangunan desa. Kedua tantangan ini akan berpengaruh pada keseluruhan proses pembangunan desa, baik dari sisi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi di desa. Sebagian kecil desa-desa pedalaman sudah bisa diakses dengan mudah karena terletak di jalur Trans Kalimantan. Namun, sebagian besar desa-desa pedalaman di Kalimantan Barat masih mengalami kendala akses dan keterbukaan wilayah desa.³⁴

Jika dua tantangan utama ini bisa ditangani oleh pemerintah dan semua pihak, maka upaya percepatan pembangunan desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini akan bisa berjalan dengan lebih bagus. Tentu saja, tantangan lain juga cukup banyak dihadapi oleh desa-desa pedalaman, baik dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Karena itu, kita akan memulai analisis dengan melihat sejumlah tantangan dari tiga dimensi dalam konsep IDM tersebut, dengan mengacu pada tiga desa yang diteliti, yakni Desa Teraju di Kabupaten Sanggau, Desa Sungai Deras di Kabupaten Kubu Raya, dan Desa Botuh Bosi di Kabupaten Ketapang.

Dari sisi ketahanan sosial, tantangan yang dihadapi oleh desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif adalah akses ke layanan kesehatan Puskesmas atau Pustu, terutama desa-desa yang letaknya cukup jauh dari layanan kesehatan ini. Demikian juga akses ke layanan kesehatan yang lebih lengkap, yakni RSUD yang terletak di ibukota kabupaten, umumnya bisa diakses dalam waktu antara 2 jam sampai lebih dari 3 jam. Kondisi ini cukup menantang bagi desa-desa pedalaman. Seperti di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya misalnya, keluarga yang mempunyai perempuan hamil dan akan melahirkan, biasanya menjelang melahirkan akan dititipkan di keluarga mereka yang dekat dengan ibukota kecamatan untuk memudahkan akses ke Puskesmas yang jaraknya sekitar 2 jam dari desa.

Tantangan akses kesehatan yang dialami masyarakat desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini adalah akses BPJS yang sebagian besar masih sangat terbatas. Desa-desa yang sudah mandiri seperti Teraju, warganya mempunyai akses BPJS Kesehatan sampai 70%, sementara desa-desa sangat tertinggal seperti Desa Botuh Bosi, akses BPJS Kesehatan masih di bawah 20%. Penyebab rendahnya akses BPJS Kesehatan ini adalah literasi masyarakat yang

³⁴ Sebagai contoh di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Desa-desa di kabupaten ini umumnya merupakan desa pedalaman. Dari 7 desa yang ada di kecamatan ini, hanya Desa Teraju yang paling dekat dengan dan menjadi ibukota kecamatan, serta berada di jalur lintas Trans Kalimantan. Lima desa di kecamatan ini bisa dijangkau dengan jarak 17 sampai 36 km dengan jalan darat. Sebanyak 2 desa, yakni Desa Kampung Baru dan Desa Sansat hanya bisa diakses dengan kombinasi jalur darat dan air/sungai. Lihat dokumen BPS: Toba Dalam Angka 2020, hal. 7.

masih rendah, di samping mekanisme pendaftaran BPJS Kesehatan yang bersifat pasif, di mana masyarakat diminta mendaftar sendiri ke kantor-kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Akses pendidikan sudah cukup bagus untuk pendidikan dasar. Semua desa terpencil umumnya mempunyai Sekolah Dasar untuk warganya. Namun, untuk akses ke SMP dan SMA, tergantung pada lokasi SMP dan SMA. Untuk desa-desa yang jauh dari pusat pendidikan, biasanya akan kesulitan mengakses pendidikan menengah. Sementara di sebuah kecamatan, biasanya hanya ada satu atau dua SMA saja. Kondisi ini, tentu saja, akan menyulitkan bagi warga desa-desa pedalaman yang letak desanya sangat jauh dari lokasi SMA di wilayahnya.³⁵

Namun demikian, desa-desa pedalaman ini mempunyai kekuatan modal sosial yang cenderung kuat, baik kohesifitas sosial, peran institusi sosial seperti lembaga adat, solidaritas sosial, dan toleransi yang terjaga dengan baik dalam kondisi masyarakat majemuk secara etnis dan agama. Modal sosial yang kuat ini tentu saja akan sangat berperan dalam mempercepat pembangunan desa-desa pedalaman ini. Namun demikian, perubahan pola kerja sebagian warga masyarakat di desa-desa pedalaman ini, di mana sebagian warga desa menjadi buruh di perusahaan sawit, menyebabkan kebersamaan dan gotong royong masyarakat menjadi lemah. Di Desa Botuh Bosi di Kabupaten Ketapang justru lebih memprihatinkan, di mana lebih dari 90%³⁶ warga desa bekerja sebagai buruh perusahaan sawit, yang berdampak pada perubahan kehidupan sosial dan relasi sosial dalam masyarakat desa.

Dari sisi ketahanan ekonomi, tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini adalah ketimpangan penguasaan lahan di desa. Mayoritas lahan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif, baik sawit maupun pertambangan. Di Desa Teraju, Kabupaten Sanggau penguasaan lahan oleh perusahaan ekstraktif mencapai 84%, sementara di Desa Sungai Deras, Kubu Raya mencapai 65,77% lahan yang dikuasai oleh perusahaan sawit.³⁷ Ketimpangan penguasaan lahan ini akan berpengaruh pada kebutuhan lahan masyarakat untuk pengembangan ekonomi seiring dengan pertumbuhan penduduk desa di masa yang akan datang.

Apalagi, sumber mata pencaharian mayoritas penduduk desa-desa pedalaman adalah sebagai petani, baik petani sawah tadah hujan, petani sawah ladang, maupun petani yang mengelola lahan tembakawang/*agroforestry*. Sebagian lagi mempunyai mata pencaharian dari perikanan darat/sungai. Pengecualian dalam hal ini adalah Desa Botuh Bosi di mana sekitar 90% warganya sudah menjadi buruh di perusahaan-perusahaan sawit yang ada di desa ini. Karena lahan pertanian dan ladang/kebun warga yang semakin terbatas, dan ketimpangan penguasaan yang

³⁵ Desa Sungai Deras di Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya misalnya, kecamatan ini hanya mempunyai 2 SMA yang terletak di Desa Teluk Pakedai I dan Desa Teluk Pakdai II. Kedua SMA ini bisa diakses dalam jarak lebih dari 10 km dari Desa Sungai Deras. Lihat Kecamatan Teluk Pakedai Dalam Angka 2019, hal. 4 dan 46.

³⁶ Profil Desa Botuh Bosi tahun 2020 (data update tahun 2017).

³⁷ Profil Desa Teraju tahun 2020 dan Profil Desa Sungai Deras tahun 2020.

sangat lebar dengan pihak industri ekstraktif, perlu ada upaya bagi masyarakat desa untuk mempertahankan lahan-lahan ini dalam rangka ketahanan pangan di wilayah desa.³⁸

Desa-deso pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini umumnya belum mandiri secara ekonomi. Ketergantungan kepada industri ekstraktif yang ada di desanya masih sangat tinggi, meskipun dalam bentuk karitatif dan penyerapan tenaga kerja lokal. BUMDes umumnya sudah berdiri dan belum melakukan pengembangan ekonomi yang bisa menghasilkan PADes untuk desa. Di Desa Teraju³⁹ misalnya, BUMDes hanya mengelola usaha fotokopi dan 4 ruko desa untuk disewakan. BUMDes Desa Sungai Deras saat ini baru mengembangkan bisnis pengelolaan dan limbah sawit perusahaan. Sementara BUMDes di Desa Botuh Bosi belum berjalan. Padahal akses kepada lembaga keuangan di desa-deso pedalaman ini cenderung bagus yang dilayani oleh berbagai Credit Union.⁴⁰

Sedangkan dari sisi ketahanan ekologi, tantangan yang dihadapi oleh desa-deso pedalaman kawasan industri ekstraktif adalah potensi pencemaran tanah dan air yang bersumber dari kegiatan industri ekstraktif di wilayah ini, baik perusahaan sawit maupun tambang. Selain itu, bencana banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun hadir di desa-deso pedalaman ini. Perubahan tata guna lahan, di mana hutan alam dataran rendah banyak berubah menjadi areal sawit dan pertambangan, berdampak pada bencana banjir di wilayah desa-deso pedalaman ini. Bencana lainnya adalah kebakaran hutan.

Masalah besar lain yang sudah dan kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang adalah konflik lahan antara masyarakat desa dengan perusahaan ekstraktif. Di Desa Teraju, sampai saat ini masih terjadi konflik lahan antara sebuah perusahaan sawit dengan masyarakat yang memperebutkan lahan seluas 300 ha. Kasus yang sudah berlangsung beberapa tahun ini, belum ada penyelesaiannya meskipun sudah masuk ke ranah hukum. Di Desa Botuh Bosi, konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan sawit juga masih terjadi. Tahun 2000 merupakan konflik terbesar yang menyebabkan perusahaan sawit harus membayar denda adat dalam jumlah besar kepada masyarakat desa ini.

Dari analisis isu strategis untuk desa-deso pedalaman dan kawasan industri ekstraktif di atas, dapat diringkas dalam tabel di bawah ini.

³⁸ Di Desa Teraju, proses jual beli lahan masyarakat kepada perusahaan sawit dan tambang terus terjadi. Masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan biasanya menjual atau menyewakan lahannya kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif yang ada di desa ini.

³⁹ BUMDes Desa Teraju mempunyai lahan sawit seluas 3,7 ha yang ditanam dengan bantuan PT SAP di lahan desa. Sawit ini belum berproduksi dan diharapkan menjadi sumber PADes ke depan.

⁴⁰ Desa Teraju dan Desa Botuh Bosi mempunyai sejumlah Credit Union. Sementara di Desa Sungai Deras, akses lembaga keuangan mikro dilayani oleh Koperasi Mitra Kencana.

Tabel 4. Isu strategis pembangunan desa pedalaman dan KIE

No.	Dimensi Isu	Isu Strategis Desa Pedalaman dan KIE
1.	Dimensi Ketahanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> – Akses ke layanan kesehatan Puskesmas cukup mudah tergantung jarak desa dengan Puskesmas, namun banyak desa yang membutuhkan waktu sampai 2 jam menuju Puskesmas, seperti Desa Sungai Rengas di Kubu Raya. – Akses ke layanan RSUD di ibukota kabupaten membutuhkan waktu antara 2 jam sampai lebih dari 3 jam. – Sebagian desa pedalaman sudah mempunyai akses BPJS Kesehatan sampai 70%. Sebagian lagi baru sekitar 20%. – Akses pendidikan menengah (SMP dan SMA) menjadi tidak mudah untuk sebagian desa pedalaman. Bahkan ada yang jaraknya lebih dari 10 km dari desa. – Modal sosial masyarakat desa-desa pedalaman cenderung kuat (kohesifitas sosial, peran institusi sosial, solidaritas sosial, dan toleransi), yang bisa menjadi modal untuk pembangunan desa. – Namun demikian, keterlibatan sebagian warga desa dalam industri sawit menyebabkan interaksi sosial di desa berubah. Kegiatan gotong royong di sebagian warga desa mulai melemah. – Akses air bersih masih menjadi masalah di desa-desa pedalaman.
2.	Dimensi Ketahanan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> – Ketimpangan penguasaan lahan di desa. Sebagian besar lahan desa sudah dikuasai oleh perusahaan ekstraktif, baik sawit, pertambangan, dan kehutanan. Di Desa Teraju, 84% lahan dikuasai perusahaan ekstraktif, sementara di Desa Sungai Deras seluas 65,77% dikuasai oleh perusahaan sawit. – Kegiatan utama ekonomi masyarakat desa adalah pertanian/ladang, perkebunan, dan perikanan. – Akses keuangan mikro di desa-desa pedalaman umumnya dilayani oleh Credit Union. – Kelembagaan ekonomi umumnya dalam bentuk BUMDes dan Koperasi, namun belum berjalan bagus.
3.	Dimensi Ketahanan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> – Pencemaran tanah dan sungai terjadi di desa-desa pedalaman karena aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit. – Bencana yang sering terjadi adalah banjir dan kebakaran hutan. – Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan ekstraktif masih terjadi dan cenderung belum ada pola mediasi dan resolusi konflik yang komprehensif.

4.2.2 Revitalisasi CSR untuk Pembangunan Desa Pedalaman dan KIE

Perusahaan-perusahaan ekstraktif yang beroperasi di desa-desa pedalaman Kalimantan Barat umumnya adalah pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan kehutanan. Perusahaan-perusahaan ini cenderung menguasai lahan yang cukup luas di desa-desa sehingga berdampak pada ketimpangan penguasaan lahan dengan warga desa. Seluas 84% lahan di Desa Teraju, Kabupaten Sanggau dikuasai oleh perusahaan ekstraktif sawit dan pertambangan. Demikian

juga sekitar 65,77% lahan di Desa Sungai Deras, Kabupaten Kubu Raya menjadi kawasan industri ekstraktif. Dengan penguasaan lahan yang sangat luas di desa-desa, harapannya tentu saja kehadiran berbagai industri ini membawa manfaat bagi penguatan ekonomi dan kesejahteraan warga desa.

Secara umum, pendekatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) semua perusahaan di desa-desa pedalaman ini masih bersifat karitatif, memberi bantuan namun belum memberdayakan. Selain itu, perusahaan-perusahaan ekstraktif masih melihat CSR sebagai bagian dari alat untuk keamanan investasi dan menggugurkan kewajiban saja. Perusahaan belum menempatkan CSR sebagai strategi untuk pemberdayaan masyarakat desa.⁴¹

Meskipun secara umum masih bersifat karitatif, namun terdapat perbedaan dalam implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan swasta nasional. Tabel di bawah ini memperlihatkan kecenderungan pendekatan CSR kedua tipe BUMN ekstraktif tersebut di desa-desa pedalaman Kalimantan Barat.⁴²

Tabel 5. Perbedaan pendekatan CSR perusahaan BUMN dan swasta nasional

No.	Dimensi Pendekatan	BUMN Ekstraktif	Perusahaan Swasta Nasional
1.	Perspektif tentang CSR	CSR sebagai instrumen investasi dan tanggung jawab moral sebagai perusahaan negara.	CSR sebagai instrumen keamanan investasi.
2.	Pendekatan proses	Karitatif, tapi sudah lebih terencana untuk pemberdayaan dan keberlanjutan.	Masih karitatif, sekadar memberi bantuan kepada desa dan warga desa.
3.	Perencanaan CSR	Sudah direncanakan dengan baik.	Belum direncanakan dengan baik.
4.	Integrasi CSR dengan perencanaan desa	Belum terintegrasi.	Belum terintegrasi
5.	Partisipasi desa dalam	Partisipasi desa dalam perencanaan masih rendah dan	<i>Top down</i> dan tidak ada

⁴¹ Di sejumlah desa pedalaman yang diteliti, terdapat perusahaan BUMN tambang, yakni PT Antam yang bekerja di wilayah Desa Teraju dan sejumlah desa lainnya. Saat ini PT Antam belum melakukan eksploitasi di Desa Teraju, namun kegiatan CSR mereka di desa ini dan desa-desa lain sudah dilakukan.

⁴² Pendekatan ini dipetakan berdasarkan perspektif dari tim CSR perusahaan di lokasi penelitian. Untuk BUMN pertambangan, diskusi mendalam dilakukan dengan tim CSR PT. Antam Kalbar di Sanggau, tanggal 25 Nopember 2020. Sedangkan dengan perusahaan swasta nasional dilakukan wawancara mendalam dengan tim CSR PT. Surya Agro Palma (SAP) tanggal 24 Nopember 2020. Sejumlah perusahaan nasional swasta lainnya di Desa Teraju (Kabupaten Sanggau), Desa Sungai Deras (Kabupaten Kubu Raya) dan Desa Botuh Bosi (Kabupaten Ketapang) tidak berhasil ditemui selama proses penelitian, karena perusahaan-perusahaan tersebut menolak mengadakan pertemuan tatap muka untuk mengurangi penularan Covid-19 kepada karyawannya. Perusahaan yang bisa kami wawancara karena mereka mempunyai fasilitas kesehatan (klinik) untuk tes rapid dan tes PCR untuk tamunya.

	perencanaan	cenderung <i>top down</i> .	partisipasi desa sama sekali.
6.	Unit kerjasama	Kelompok masyarakat dan desa secara parsial.	Kelompok masyarakat.
7.	Penguatan BUMDes	Sudah mulai direncanakan.	Tidak dilakukan, kecuali membantu penanaman sawit desa seluas 3,7 ha.
8.	Kemitraan multipihak	Ada di tingkat kecamatan.	Tidak ada.

Dari tabel di atas terlihat beberapa kecenderungan penerapan CSR oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif di wilayah pedalaman Kalimantan Barat. *Pertama*, semua perusahaan ekstraktif di desa-desa pedalaman, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta nasional masih menganggap CSR sebagai instrumen investasi. Perusahaan-perusahaan tersebut melihat CSR perlu diterapkan di masyarakat desa supaya memberi dampak kepada kedua belah pihak, baik perusahaan maupun masyarakat desa. Namun, kepentingan utama dari CSR adalah untuk memastikan keberlanjutan investasi. Untuk itu, perusahaan akan melakukan apapun untuk mengamankan investasi yang sudah berjalan di desa-desa pedalaman tersebut.

Bedanya adalah bahwa selain untuk keamanan investasi, perusahaan BUMN cenderung mempunyai tanggung jawab moral kepada masyarakat desa untuk memberdayakan mereka secara sosial dan ekonomi. Tim CSR perusahaan BUMN ini merasa bertanggung jawab secara moral karena perusahaan ini milik negara, yang tentu saja merupakan perusahaan milik rakyat. Karena itu, pendekatan dalam CSR cenderung mencoba mengimbangi antara kepentingan keamanan investasi di satu sisi dan upaya untuk memberi dampak positif kehadiran perusahaan ekstraktif ini kepada masyarakat desa di sisi lain.

Kedua, pendekatan proses dalam implementasi CSR masih bersifat karitatif, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta nasional. Perusahaan-perusahaan ini masih menganggap masyarakat desa sebagai pihak yang perlu dibantu. Ada relasi kuasa (*power relation*) yang tidak seimbang, dan tidak ada upaya untuk mengimbangi relasi kuasa ini. Pendekatan karitatif ini menganggap perusahaan sebagai pihak yang mempunyai kuasa (*powerful*) dan desa/masyarakat desa sebagai pihak yang perlu dibantu karena tidak mempunyai sumberdaya (*powerless*). Meskipun demikian, perusahaan BUMN sudah mulai membangun hubungan yang memberdayakan dan memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat desa.⁴³

Ketiga, perencanaan CSR sudah dilakukan dengan bagus oleh perusahaan BUMN. Perusahaan-perusahaan BUMN ini juga sudah menggunakan pendekatan sejumlah standar internasional

⁴³ Untuk perusahaan sawit, keterlibatan masyarakat sebagai plasma dianggap sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi ini yang menyebabkan perusahaan-perusahaan ini merasa tidak memerlukan kerjasama yang lebih terintegrasi dengan desa, karena secara aturan sudah dilaksanakan, yakni kerjasama plasma ini. Meskipun dalam pelaksanaannya, kerjasama plasma ini dilakukan secara keseluruhan oleh perusahaan. Masyarakat yang menjadi plasma hanya menerima bagi hasil dari usaha yang dijalankan perusahaan.

dalam implementasi CSR, seperti ISO 26000, indikator SDGs, dan berbagai indikator keberlanjutan lainnya. Hal ini diperlukan untuk membangun *branding* perusahaan terkait dengan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) kepada publik setiap tahun. Sementara perusahaan-perusahaan swasta nasional cenderung belum mempunyai perencanaan CSR secara bagus. Perencanaan CSR perusahaan-perusahaan swasta ini masih berbasis permintaan/permohonan masyarakat, dan belum menjadi rencana pemberdayaan dengan target perubahan yang terarah.⁴⁴

Keempat, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta nasional belum menerapkan strategi CSR yang terintegrasi dengan perencanaan desa. Perusahaan-perusahaan ini menerapkan CSR sesuai dengan strategi masing-masing. Perusahaan BUMN misalnya, menerapkan CSR tidak berbasis desa secara keseluruhan, melainkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Demikian juga perusahaan-perusahaan swasta nasional yang menerapkan CSR berdasarkan permintaan masyarakat, bukan berbasis kebutuhan dan perencanaan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat desa.

Kelima, tidak ada partisipasi desa dalam perencanaan CSR perusahaan-perusahaan ekstraktif di desa-desa pedalaman. Baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta nasional masih merencanakan dan menerapkan CSR secara *top down*. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan tersebut belum membangun mekanisme perencanaan secara partisipatif dengan warga desa dan pemerintah desa.

Keenam, perusahaan-perusahaan ekstraktif di pedalaman umumnya membangun kerja sama CSR dengan kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini bisa dimaklumi karena perencanaan CSR belum dilakukan secara partisipatif dengan desa. Perusahaan BUMN misalnya, mereka mempunyai kelompok masyarakat binaan yang terlibat dalam berbagai kegiatan CSR. Kelompok masyarakat binaan ini diperkuat berbagai aspek, baik keahlian dalam pertanian, pemasaran dan

⁴⁴ Salah satu contoh adalah PT. Surya Agro Palma (SAP) yang beroperasi di Desa Teraju, Kabupaten Sanggau. Perusahaan ini masih menerapkan CSR berbasis permintaan masyarakat desa. Untuk tahun 2020 (sampai bulan Juli), PT. SAP sudah melaksanakan 23 kegiatan sesuai dengan permohonan/permintaan masyarakat Desa Teraju dengan total dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 620.240.973,-. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan antara lain: (1) normalisasi sungai dan parit; (2) pembangunan kebun kelapa sawit di tanah kas desa seluas 3,7 ha; (3) bantuan honor guru PAUD dan guru SDN; (4) bantuan kepada 7 posyandu; (5) bantuan dana pembangunan gereja Katolik Santo Agustinus; (6) bantuan pembelian material pembangunan WC SDN 16 Teraju; (7) bantuan dana untuk kegiatan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan dan kabupaten; (8) bantuan dana untuk kegiatan wisuda PAUD Ananda III Dusun Mangkup; (9) bantuan dana wisuda PAUD Kaseh Ka'Onak; (10) bantuan dana untuk kegiatan pengukuhan pengurus adat Dusun Nek Cikam; (11) bantuan dana untuk ritual adat ngumpan kampung; (12) bantuan dana pembelian komputer/laptop dan printer untuk PAUD Utari; (13) bantuan pembelian pupuk untuk kelompok tani; (14) bantuan penyelesaian pembangunan gereja Pantekosta di Indonesai (GPDI) Desa Teraju; (15) bantuan HUT RI ke 75 Kecamatan Toba; (16) bantuan kegiatan ritual tolak bala untuk mencegah covid19 di Desa Teraju; (17) bantuan kegiatan ritual tolak bala untuk mencegah covid19 di Kecamatan Toba; (18) penimbunan jalan di RT 03 Bawang Kecil; (19) perbaikan dan pemasangan gorong-gorong jalan menuju kantor Camat Toba; (20) kegiatan pembagian masker kepada pengendara bermotor dalam rangka pencegahan penyebaran covid19; (21) bantuan cairan disinfektan sebanyak 150,65 liter kepada Gugus Tugas pencegahan covid 19 Kecamatan Toba; (22) kegiatan penyemprotan disinfektan di 7 desa wilayah kerja PT. SAP; dan (23) kegiatan pembagian sembako, peralatan semprot, APD dan cairan disinfektan kepada 7 desa di wilayah kerja PT. SAP yang terkena dampak covid19. Sumber: laporan CSR PT. SAP tahun 2020 (sampai Juli 2020).

akses pasar, dan sebagainya. Sementara perusahaan-perusahaan swasta nasional juga membangun kerjasama dengan kelompok masyarakat, namun bersifat murni karitatif (memberi bantuan sesuai permintaan).

Ketujuh, karena kerjasama perusahaan-perusahaan ekstraktif di wilayah ini berbasis kelompok masyarakat (BUMN) dan berbasis permintaan (perusahaan swasta), maka upaya penguatan BUMDes belum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini. Namun demikian, peluang kerja sama bisnis yang menjanjikan tetap diinisiasi bersama antara BUMDes dan perusahaan-perusahaan. PT Antam, misalnya, sudah mulai mendorong BUMDes untuk mengembangkan beberapa produk unggulan desa. Salah satunya adalah pengembangan madu desa. Selama ini, madu Teraju masih dijual di wilayah setempat secara tradisional. PT Antam mencoba membantu BUMDes dalam pengembangan madu ini secara lebih bagus, baik pengolahan, kemasan, dan pemasaran ke wilayah yang lebih luas. Sementara PT SAP sudah membantu penanaman kebun sawit desa seluas 3,7 ha yang diharapkan menjadi salah satu sumber PADes ke depan.

Kedelapan, perusahaan-perusahaan ekstraktif di desa-desa pedalaman ini belum membangun kemitraan strategis dengan para pihak di tingkat desa. Perusahaan BUMN sudah membangun kemitraan strategis di tingkat kecamatan. Kemitraan strategis ini mengadakan pertemuan rutin membahas berbagai tantangan dalam implementasi CSR di tingkat kecamatan di wilayah kerja perusahaan.

Melihat kecenderungan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif di desa-desa pedalaman Kalimantan Barat ini, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta nasional, terlihat bahwa pendekatan CSR masih jauh dari harapan ideal untuk memberdayakan masyarakat desa. Karena itu, perlu ada upaya untuk mengubah semua kelemahan dalam penerapan CSR ini ke arah pemberdayaan masyarakat desa dan terintegrasi dengan perencanaan desa.

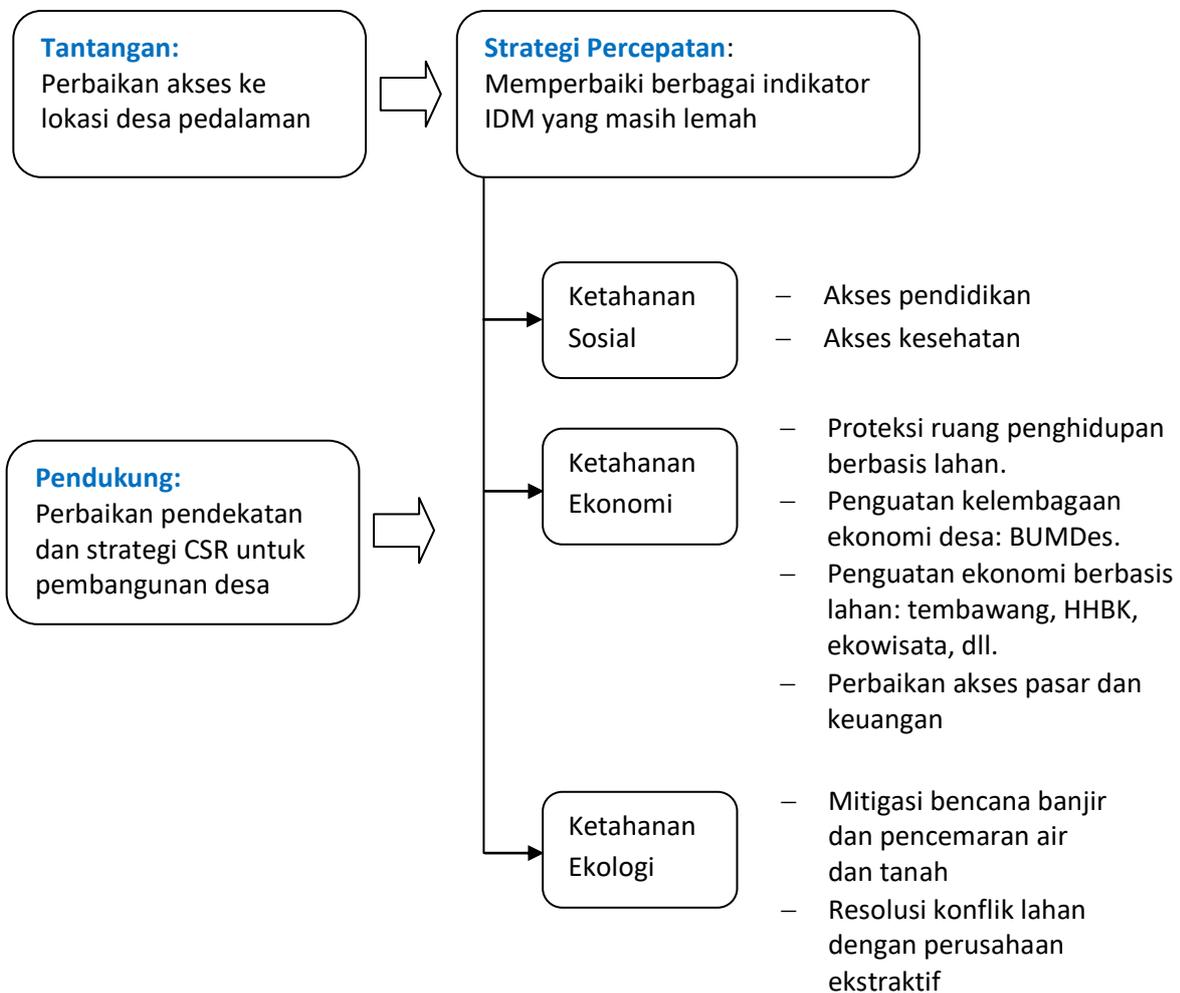
Karena penerapan CSR yang bersifat *top down*, karitatif, dan tidak terintegrasi dengan desa ini, pemerintah desa cenderung tidak bisa mengukur sejauh mana dampak perbaikan masyarakat secara sosial dan ekonomi dari kehadiran berbagai industri ekstraktif di desa-desa pedalaman ini. Di sisi lain, pendekatan ini akan membuat desa dan masyarakat desa tidak menjadi mandiri secara ekonomi untuk jangka panjang. Jika perusahaan-perusahaan ekstraktif ini selesai beroperasi, khususnya tambang, maka masyarakat akan kembali ke kehidupan masa lalu dalam kondisi sumberdaya alam yang semakin habis. Di sinilah diperlukan upaya perbaikan pendekatan dalam pelaksanaan CSR di desa-desa pedalaman ini.

4.2.3 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pedalaman dan KIE

Membangun desa secara holistik memang tidak mudah. Berbagai tantangan akan dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat desa, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada

di desa-desa pedalaman. Karena tantangan utama desa-desa pedalaman ini adalah akses dan keterbukaan wilayah desa, maka jika hambatan ini ditangani dengan baik, akan berdampak pada percepatan pembangunan desa secara keseluruhan. Di sisi lain adalah kontribusi perusahaan-perusahaan ekstraktif untuk pembangunan desa yang masih belum memadai, menjadi tantangan tersendiri di wilayah pedalaman ini.

Gambar 6. Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pedalaman dan KIE



Berangkat dari dua tantangan yang dihadapi oleh desa-desa pedalaman ini, maka strategi percepatan pembangunan harus diarahkan untuk memecahkan berbagai hambatan yang masih dihadapi, sebagai berikut:

Pertama, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu membuka akses wilayah kepada desa-desa pedalaman yang masih tidak mudah diakses. Dua desa yang diteliti, yakni Desa Teraju di Kabupaten Sanggau dan Desa Botuh Bosi di Kabupaten Ketapang bisa diakses lebih mudah karena terletak di dekat jalur jalan raya Trans Kalimantan. Sementara Desa Sungai Deras di Kabupaten Kubu Raya mewakili desa-desa pedalaman yang lebih sulit diakses dari luar. Desa ini harus diakses dengan kombinasi jalan darat dan air/sungai.

Untuk desa-desa pedalaman yang masih tidak mudah diakses, pemerintah perlu membantu penguatan berbagai sisi infrastruktur, termasuk membangun jalan dan jembatan menuju desa. Tentu saja, jika cara ini masih mahal, maka keberadaan transportasi air yang layak dan aman menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Di desa Sungai Deras yang terbatas akses dan mengandalkan transportasi air/sungai, pemerintah desa melalui BUMDes mulai mencoba untuk membangun bisnis transportasi sungai ini. Jika usaha transportasi sungai ini berjalan, maka bukan saja menambah PADes Desa Sungai Deras dan lapangan kerja bagi warga desa, tetapi juga akan berdampak pada kehidupan warga desa yang lebih luas, termasuk kemudahan akses ke layanan kesehatan, dan memotong biaya transportasi barang dan jasa yang termasuk tinggi di wilayah ini.

Kedua, desa-desa pedalaman masih menghadapi berbagai tantangan dari sisi ketahanan sosial, terutama akses layanan kesehatan dan pendidikan menengah (SMA). Pemerintah bisa meringankan beban warga desa-desa pedalaman untuk mengakses layanan kesehatan melalui penyediaan ambulans desa yang siap sedia untuk keperluan darurat di desa.⁴⁵ Sejauh ini, sejumlah desa yang diteliti tidak mempunyai ambulans desa, sehingga warga desa mengusahakan sendiri kebutuhan transportasi untuk mengakses layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD.

Demikian juga untuk akses ke sekolah menengah, pemerintah perlu menjembatani dengan penyediaan transportasi sekolah, misalnya bus sekolah gratis, yang melayani kebutuhan warga pedalaman. Jika bantuan transportasi sekolah ini disediakan, maka akan sangat membantu angka putus sekolah di desa-desa pedalaman yang akses transportasinya sangat terbatas.

Ketiga, dari sisi ketahanan ekonomi, tantangan utama di desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini adalah ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat desa dan perusahaan-perusahaan ekstraktif.⁴⁶ Ketimpangan penguasaan lahan ini akan berdampak pada ketersediaan ruang penghidupan (*livelihood*) masyarakat desa seiring dengan penambahan penduduk desa di masa yang akan datang. Di sisi lain, di desa-desa pedalaman ini, sebagian besar warga desa merupakan petani dan peladang yang kehidupannya sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian dan ladang/hutan. Untuk itu, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa perlu melakukan sejumlah hal sebagai berikut:

1. Memastikan sumber-sumber penghidupan masyarakat desa-desa pedalaman yang berbasis lahan dan hutan (sawah, ladang, kebun *agroforestry*/tembawang, dan lain-lain) bisa dijaga secara berkelanjutan sebagai sumber pangan masyarakat untuk jangka panjang.

⁴⁵ Di Desa Sungai Deras, Kabupaten Kubu Raya, untuk keperluan melahirkan, karena akses menuju Puskesmas mencapai waktu lebih dari 2 jam, maka untuk mengurangi resiko, terpaksa mencari penginapan di dekat Puskesmas atau tinggal bersama keluarga yang dekat dengan Puskesmas.

⁴⁶ Penguasaan lahan di Desa Teraju, Kabupaten Sanggau oleh industri ekstraktif mencapai 84%. Sedangkan di Desa Sungai Deras, Kabupaten Kubu Raya, sebanyak 65,77% lahan dikuasai oleh beberapa perusahaan ekstraktif.

2. Mengatur, membatasi, dan menghentikan proses penjualan/penyewaan lahan-lahan produktif masyarakat kepada perusahaan-perusahaan ekstraktif di desa-desa pedalaman ini. Penjualan lahan-lahan produktif akan berdampak pada penyusutan lahan untuk kebutuhan (*livelihood*) masyarakat desa. Jika penyusutan lahan masyarakat ini terus terjadi, maka ketergantungan masyarakat kepada perusahaan ekstraktif akan sangat tinggi, sehingga kemandirian ekonomi masyarakat sulit terwujud.⁴⁷
3. Membangun kesepahaman dan kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan ekstraktif di wilayah desa untuk menghentikan proses jual beli dan sewa-menyewa lahan masyarakat. Perusahaan-perusahaan ekstraktif ini perlu ditingkatkan pemahamannya tentang pentingnya mengamankan sumber penghidupan masyarakat desa untuk jangka panjang. Karena, tidak selamanya perusahaan-perusahaan ekstraktif tersebut bekerja di wilayah desa.
4. Desa-desa pedalaman ini mempunyai potensi ekonomi yang bagus dan belum dikembangkan dengan baik. Produk madu, hasil hutan bukan kayu (HHBK), pariwisata, penginapan, dan lain-lain, bisa dikembangkan untuk meningkatkan PADes di satu sisi, dan penguatan ekonomi warga desa di sisi lain.

Keempat, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memfasilitasi perbaikan pendekatan CSR yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan ekstraktif di desa-desa pedalaman, dalam rangka akselerasi pembangunan desa-desa pedalaman. Pendekatan CSR yang bersifat karitatif dan tidak memperdayakan perlu ditransformasikan kepada pendekatan yang holistik, partisipatif, dan memberdayakan masyarakat desa. Jika upaya perbaikan pendekatan CSR ini bisa dilakukan, maka perbaikan secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat desa akan mudah diukur di satu sisi, dan perbaikan status IDM akan bisa dicapai oleh desa-desa pedalaman ini. Tentu saja, perbaikan status IDM ini membutuhkan perbaikan dalam banyak sisi, namun alangkah bagus jika CSR bisa berkontribusi secara lebih optimal.

Kelima, tantangan ketahanan ekologis yang masih dihadapi oleh desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini adalah bencana banjir dan konflik lahan antara warga desa dan perusahaan. Pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi banjir dengan pendekatan yang lebih bagus. Disadari bahwa perubahan tata guna lahan, di mana kawasan hutan dataran rendah berubah menjadi perkebunan sawit dan tambang, berdampak pada menurunnya kemampuan DAS untuk menampung air saat musim hujan. Tentu tidak mudah melakukan perbaikan tataguna lahan, karena keberadaan perusahaan-perusahaan ekstraktif sudah berjalan lama. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah upaya mitigasi banjir di desa-desa pedalaman sesuai dengan kondisi bentang alam.

⁴⁷ Desa Botuh Bosi di Kabupaten Ketapang adalah salah satu desa pedalaman yang tingkat ketergantungan warga desa kepada perusahaan sawit sangat tinggi. Lebih dari 90% warga desa menjadi buruh harian di perusahaan-perusahaan sawit. Sebagai buruh harian, warga desa mendapat share ekonomi terkecil dari potensi ekonomi yang beredar di desa.

Sementara itu, konflik-konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan ekstraktif masih terjadi di desa-desa pedalaman ini. Konflik-konflik lahan ini tentu saja tidak mudah ditangani dan diselesaikan, meskipun sudah masuk ke ranah hukum. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat kemitraan multipihak di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/provinsi, dalam rangka membangun kesepahaman semua pihak, sehingga semua potensi konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat bisa dideteksi sejak dini dan dicari solusinya secara bermartabat. Selama ini, konflik-konflik lahan ini cenderung tidak ditangani oleh pemerintah secara memadai, sehingga seringkali berujung terjadinya kekerasan.

4.3 KONDISI KETAHANAN DESA PESISIR DAN KIE

4.3.1 Kondisi Desa Pesisir dan KIE

Desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif (KIE)⁴⁸ adalah desa-desa yang terletak di wilayah pesisir Kalimantan Barat, yang dikelilingi oleh berbagai industri ekstraktif di wilayah desa. Desa-desa dengan tipologi ini sangat beragam di wilayah Kalimantan Barat. Kebetulan, desa yang diteliti ini (Desa Muara Jekak) terletak berbatasan dengan ibukota Kecamatan Sandai, sehingga dapat diakses lebih mudah dari ibukota kecamatan. Sementara secara umum, desa-desa pesisir yang dikelilingi oleh berbagai industri ekstraktif berada jauh dari ibukota kecamatan sehingga akses menuju desa menjadi lebih sulit. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, baik dari sisi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa.

Desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif cenderung menghadapi berbagai dinamika dalam pembangunan desa. Kehadiran industri ekstraktif di desa-desa pesisir ini, di satu sisi membawa berkah bagi pengembangan ekonomi desa, namun di sisi lain juga berpotensi melemahkan ketahanan ekologis desa untuk jangka panjang, jika dampak ekologis dari kehadiran berbagai industri ekstraktif tidak dikelola dengan baik. Karena itu, upaya percepatan pembangunan desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan berbagai industri ekstraktif di wilayah desa.

Meskipun demikian, sebagian desa pesisir dan wilayah industri ekstraktif ini cenderung bisa mengembangkan ekonomi desa secara mandiri dan tidak tergantung dari keberadaan industri-industri ekstraktif tersebut. Desa Muara Jekak misalnya, merupakan desa yang mempunyai aset ekonomi produktif, yakni lahan wawit desa seluas 150 ha. Dari aset produktif ini, desa bisa mengembangkan berbagai potensi ekonomi lainnya, baik yang dikelola oleh desa maupun warga masyarakat.

⁴⁸ Dalam penelitian ini, desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif yang diteliti adalah Desa Muara Jekak di Kabupaten Ketapang.

Tentu saja, tidak banyak desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif ini yang mempunyai aset desa seperti Desa Muara Jekak. Desa-desa yang belum mempunyai aset ekonomi produktif cenderung tergantung pada rantai ekonomi sebagai dampak multiplier dari kehadiran berbagai industri ekstraktif di wilayah desa. Ketergantungan ini tentu saja tidak bagus untuk jangka panjang. Jika industri-industri ekstraktif tersebut berhenti beroperasi di wilayah desa, maka kehidupan ekonomi desa akan kembali mundur ke belakang. Kemiskinan masyarakat desa akan kembali terjadi. Sementara sumberdaya alam yang selama ini menjadi sumber penghidupan penduduk desa sudah habis dieksploitasi oleh industri ekstraktif tersebut.

Karena itu, upaya untuk memaksimalkan keberadaan industri ekstraktif harus dilakukan oleh pemerintah desa dan warga desa untuk membangun kemandirian ekonomi desa. Jika kemandirian ekonomi desa bisa dicapai, maka dalam jangka panjang—ada atau tidak ada industri ekstraktif—warga desa tetap akan bisa mempertahankan tingkat kesejahteraan ekonominya secara wajar.

Tantangan yang dihadapi oleh desa-desa pesisir dan wilayah industri ekstraktif ini bukan saja dalam dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan ekologi. Kehadiran berbagai industri ekstraktif berdampak pada ketahanan sosial dan ekologi masyarakat desa. Untuk itu, diperlukan upaya percepatan pembangunan desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif ini secara seimbang dan holistik.

Isu strategis desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif umumnya sangat berkaitan erat dengan keberadaan berbagai industri ekstraktif di wilayah desa-desa pesisir ini. Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif ini lebih dari sekedar hubungan desa dengan industri ekstraktif. Tantangan yang dihadapi oleh desa-desa pesisir ini meliputi berbagai dimensi yang ada dalam IDM, baik ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, maupun ketahanan ekologi.

Desa yang diteliti, yakni Desa Muara Jekak, termasuk desa yang dekat dengan ibukota kecamatan yakni hanya berjarak 5 km.⁴⁹ Karena itu, akses ke layanan kesehatan di ibukota kecamatan (Puskesmas) dapat dijangkau dengan mudah. Namun untuk desa-desa yang jauh dari ibukota kecamatan, akses ke Puskesmas menjadi tantangan tersendiri bagi warga desa pesisir ini. Sementara akses ke RSUD di ibukota kabupaten bisa dijangkau dengan perjalanan darat sekitar 5 jam. Tantangan lain untuk ketahanan sosial di desa ini adalah akses BPJS Kesehatan yang jumlahnya masih dibawah 30%.⁵⁰

Mayoritas warga desa Muara Jekak bekerja sebagai petani. Desa Muara Jekak mempunyai potensi lahan yang luas, termasuk 723 ha sawah dan 507 ladang. Perkebunan rakyat mencapai

⁴⁹ Menurut data BPS (2019), Kecamatan Sandai mempunyai 13 desa. Desa terjauh berjarak 27 km dari ibukota kecamatan, yakni Desa Randau. Beberapa desa lainnya yang cukup jauh, berjarak sekitar 23 km sampai 24 km dari ibukota kecamatan, termasuk Desa Randau Jungkal, Desa Pendamar Indah, Desa Merimbang Jaya, dan Desa Alam Pakuan. Lihat Kecamatan Sandai Dalam Angka 2019, hal. 9.

⁵⁰ Wawancara Kepala Desa Muara Jekak, tanggal 18 Nopember 2020.

742,5 ha. Desa ini juga mempunyai hutan seluas 9.381 ha. Dengan potensi lahan yang luas ini, maka wajar jika mayoritas warga desa bekerja sebagai petani. Di desa ini, terdapat 524 orang sebagai petani, dan hanya 125 orang sebagai pegawai swasta yang bekerja di industri ekstraktif berbasis lahan, baik sawit maupun pertambangan bauksit dan emas.

Pemerintah Desa Muara Jekak mengelola lahan sawit seluas 150 ha⁵¹ yang menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) sampai 2,4 M rupiah tahun 2019. Dengan PAD sebesar ini, pemerintah Muara Jekak cukup mandiri dalam membangun desanya, baik untuk pembangunan infrastruktur desa, pengembangan ekonomi desa, maupun mendukung pengembangan kewirausahaan warga desa di berbagai sektor ekonomi.

Pemerintah Desa Muara Jekak juga mulai membangun potensi ekonomi lainnya, yakni pengembangan ekowisata lokal di sebuah pulau yang banyak dikunjungi warga saat akhir pekan. Jika pulau ini bisa dikembangkan berbagai fasilitas ekowisata, maka akan menjadi sumber PAD bagi desa di satu sisi, dan memberi dampak ekonomi secara multiplier kepada warga desa lainnya. Lokasi ekowisata ini adalah di Pulau Karang Luar seluas 3,5 ha. Lokasi ini bisa dikembangkan sebagai wisata pulau, taman laut, situs sejarah bahari, wisata pantai, dan sebagainya.

Pemerintah desa, melalui unit usaha pengelolaan sawit desa seluas 150 ha, juga memberi dukungan kepada warga desa. Sejauh ini, beberapa warga desa mulai mengembangkan perkebunan sawit mandiri yang permodalannya didukung oleh unit usaha desa. Sementara untuk sektor usaha lainnya masih belum berkembang karena warga desa cenderung tidak mau mengambil resiko terhadap bidang usaha yang tidak dikuasainya. Karena itu, hanya pengembangan sawit mandiri warga yang sudah berjalan.

Selain itu, pemerintah desa merencanakan pembangunan hotel di Sandai, selain karena belum adanya hotel yang representatif di kawasan pusat industri ekstraktif ini. Pembangunan hotel ini sangat startegis karena kebutuhan penginapan/hotel yang terus meningkat di wilayah ini.

Tantangan dari sisi ketahanan ekologi di desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif adalah pencemaran sungai dan tanah terjadi karena aktivitas tambang dalam bentuk pengupasan lahan. Desa Muara Jekak juga dikepung oleh perusahaan sawit dan tambang.

⁵¹ Kebun sawit desa seluas 150 ha tersebut ditanam tahun 2008 dan mulai dikelola secara aktif dari tahun 2001 oleh pemerintah desa melalui lembaga pengelola Kebun Sawit Desa yang di bentuk melalui SK Kepala Kesa Muara Jekak No 5 tahun 2019. Pada awalnya, perkebunan sawit milik desa tersebut dibangun berdasarkan hasil usaha kerjasama Pemerintah Desa Muara Jekak dengan perusahaan PT. Praksarsa Tani Sejati. Ketika akan melakukan penyerahan kembali lahan plasma dari pihak perusahaan kepada masyarakat, maka Pemerintah Desa bersama tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat melakukan musyawarah untuk menyepakati pengelolaan perkebunan sawit tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa Muara Jekak, sehingga hasilnya bisa dipergunakan bagi kepentingan masyarakat desa. PADes mulai diperoleh oleh desa setelah produksi kebun sawit desa meningkat dan cicilan kepada perusahaan telah lunas pada tahun 2008. Maka setelah tahun 2008, pendapatan dan penggunaan sumber dana yang berasal dari perkebunan sawit desa tersebut setiap tahun tercantum di dalam Perdes PAD dan Perdes APBDes Muara Jekak.

Terdapat tiga perusahaan sawit dan sejumlah perusahaan tambang bauksit dan emas yang beroperasi di wilayah desa ini.

Berdasarkan analisis isu strategis di atas, isu-isu strategis untuk desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif dapat diringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6. Isu strategis pembangunan desa pesisir dan KIE

No.	Dimensi Isu	Isu Strategis Desa Pesisir dan KIE
1.	Dimensi Ketahanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> – Akses Puskesmas warga Desa Muara Jekak cukup mudah. Namun, akses layanan kesehatan bagi desa-desa pesisir yang jauh dari Puskesmas di ibukota kecamatan masih terkendala. – Akses ke RSUD di ibukota kabupaten lebih dari 5 jam perjalanan. – Akses BPJS Kesehatan warga desa rendah, kurang dari 30%.
2.	Dimensi Ketahanan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> – Potensi lahan untuk pertanian dan perkebunan rakyat cukup luas untuk dikembangkan sebagai ekonomi potensial desa. – Kepemilikan lahan sawit desa seluas 150 ha membuat desa Muara Jekak mempunyai sumber PAD sampai 2,4 M setiap tahun, yang bisa digunakan untuk pembangunan desa dan pengembangan ekonomi desa. – Pemerintah desa mendorong warga untuk membangun usaha sawit mandiri yang dibantu desa. – Pemerintah desa juga sedang mengembangkan potensi wisata desa di sebuah pulau. – Pemerintah desa merencanakan pembangunan hotel di Sandai yang dikelola BUMDes.
3.	Dimensi Ketahanan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> – Desa Muara Jekak dikepung oleh perusahaan sawit dan tambang. Terdapat 3 perusahaan sawit dan sejumlah perusahaan tambang bauksit dan emas. – Pencemaran sungai dan tanah terjadi karena aktivitas tambang dalam bentuk pengupasan lahan, dan pencemaran sungai dan tanah karena zat kimia pemupukan sawit.

4.3.2 Revitalisasi CSR untuk Pembangunan Desa Pesisir dan KIE

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan di wilayah desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif adalah keberadaan berbagai industri ekstraktif di wilayah ini dan bagaimana kontribusi industri-industri ini dalam pembangunan desa. Bukan hanya pembangunan ekonomi desa, industri-industri ekstraktif tersebut juga harus memastikan tidak menurunkannya ketahanan sosial dan ketahanan ekologi di desa.⁵²

⁵² Penelitian ini tidak bisa mengakses semua informasi kinerja perusahaan-perusahaan ekstraktif tersebut karena berbagai limitasi, termasuk covid19.

Di antara perusahaan-perusahaan ekstraktif yang beroperasi di desa ini adalah tiga perusahaan sawit, yakni PT. Prakarsa Tani Sejati (PTS), PT. Lanang Agro Bersatu (LAB) Sampoerna Tbk., dan PT. Batu Mas Sejahtera (BMS). Sementara perusahaan ekstraktif tambang yang bekerja di desa ini antara lain tambang bauksit PT. Cita Mineral Investindo (CMI), kontraktor tambang bauksit PT. Jaga Usaha Sandai (JUS), kontraktor tambang bauksit PT. Patoka, tambang emas PT. Serinding Sumber Makmur (PTM), dan kontraktor tambang emas PT RPP Contractors Indonesia (RCI).

Meskipun sejumlah perusahaan ekstraktif bekerja di wilayah desa, namun kontribusi perusahaan-perusahaan ekstraktif terhadap pembangunan desa dan masyarakat desa, selama ini lebih banyak berbentuk *karitatif*, yakni sebagai berikut:

1. Peran perusahaan-perusahaan ekstraktif dalam pembangunan desa sekedar memberikan bantuan yang dibutuhkan desa, misalnya membantu pembangunan jalan desa, membantu kegiatan sosial di desa, membantu kegiatan posyandu, dan sejenisnya.
2. Perusahaan-perusahaan ekstraktif tidak mempunyai program CSR yang terintegrasi dengan perencanaan desa. Karena kegiatan CSR perusahaan-perusahaan ekstraktif ini cenderung karitatif tersebut, maka upaya pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan dana CSR cenderung tidak terjadi. Dengan kata lain, CSR tidak berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
3. Perusahaan-perusahaan ekstraktif merasa sudah berkontribusi dalam pembangunan desa saat bisa menyerap sejumlah tenaga kerja di desa untuk menjadi karyawan dan buruh di berbagai perusahaan tersebut.⁵³

Melihat kondisi dan kecenderungan kinerja CSR perusahaan-perusahaan ekstraktif ini, maka dibutuhkan pendekatan yang lebih bagus dalam revitalisasi CSR untuk percepatan pembangunan desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ekstraktif yang bekerja di desa-desa pesisir melaksanakan perintah UU (khususnya Perda Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016) untuk menjalankan CSR dengan dukungan pendanaan sebesar 2,5% dari keuntungan perusahaan.⁵⁴
2. Perusahaan-perusahaan ekstraktif perlu membangun kemitraan strategis dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa untuk pencapaian indikator-indikator dalam IDM, baik untuk ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan

⁵³ Padahal hanya 125 orang warga Desa Muara Jekak yang menjadi karyawan di perusahaan ekstraktif di desa ini. Jumlah penduduk Desa Muara Jekak adalah 2.804 jiwa (BPS, 2019).

⁵⁴ Sesuai dengan pasal 15 ayat 1(d) Perda Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kalimantan Barat.

ketahanan ekologi. Selain itu, saat ini pemerintah (melalui Kementerian Desa PDTT) sedang menggalakkan pencapaian indikator SDGs desa, yang mempunyai 18 tujuan.⁵⁵

3. Pemerintah perlu melakukan peningkatan kapasitas perusahaan-perusahaan ekstraktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR yang berorientasi pemberdayaan, bukan karitatif. Pemerintah bisa mendorong perusahaan-perusahaan ekstraktif bekerjasama dengan pihak ketiga (perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan lain-lain) dalam pengembangan program CSR berbasis pemberdayaan dan memberi dampak jangka panjang dan kemandirian masyarakat desa.
4. Untuk desa-desa yang cenderung mandiri secara ekonomi⁵⁶, seperti Desa Muara Jekak, maka program CSR perusahaan bisa diarahkan untuk memperbesar volume ekonomi desa/meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, yang akan berdampak pada peningkatan PADes di satu sisi, dan peningkatan pendapatan warga desa di sisi lain.
5. CSR perusahaan-perusahaan ekstraktif perlu memperkuat ketahanan sosial dan ekologi desa secara berkelanjutan. Karena itu, perusahaan-perusahaan ekstraktif perlu membangun kerjasama dengan pemerintah desa secara kolaboratif untuk melakukan pemetaan kondisi ketahanan sosial dan ketahanan ekologi desa secara partisipatif, sebelum CSR dilaksanakan di tingkat desa.

4.3.3 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pesisir dan KIE

Desa Muara Jekak merupakan desa pesisir yang dikelilingi oleh berbagai industri ekstraktif di Kabupaten Ketapang. Desa ini cenderung mandiri dalam pengembangan ekonominya, terutama sejak mempunyai lahan sawit desa seluas 150 ha, yang mulai berproduksi tahun 2008 sampai saat ini. Sebagai desa yang mandiri dalam PADes dan pengembangan ekonomi desa, desa ini cenderung tidak bergantung pada perusahaan-perusahaan ekstraktif yang ada di desa ini, baik perusahaan sawit maupun perusahaan tambang bauksit dan emas. Pemerintah desa mencoba mengembangkan ekonomi desa dan ekonomi rakyat secara mandiri berbasis pada sumberdaya yang ada.

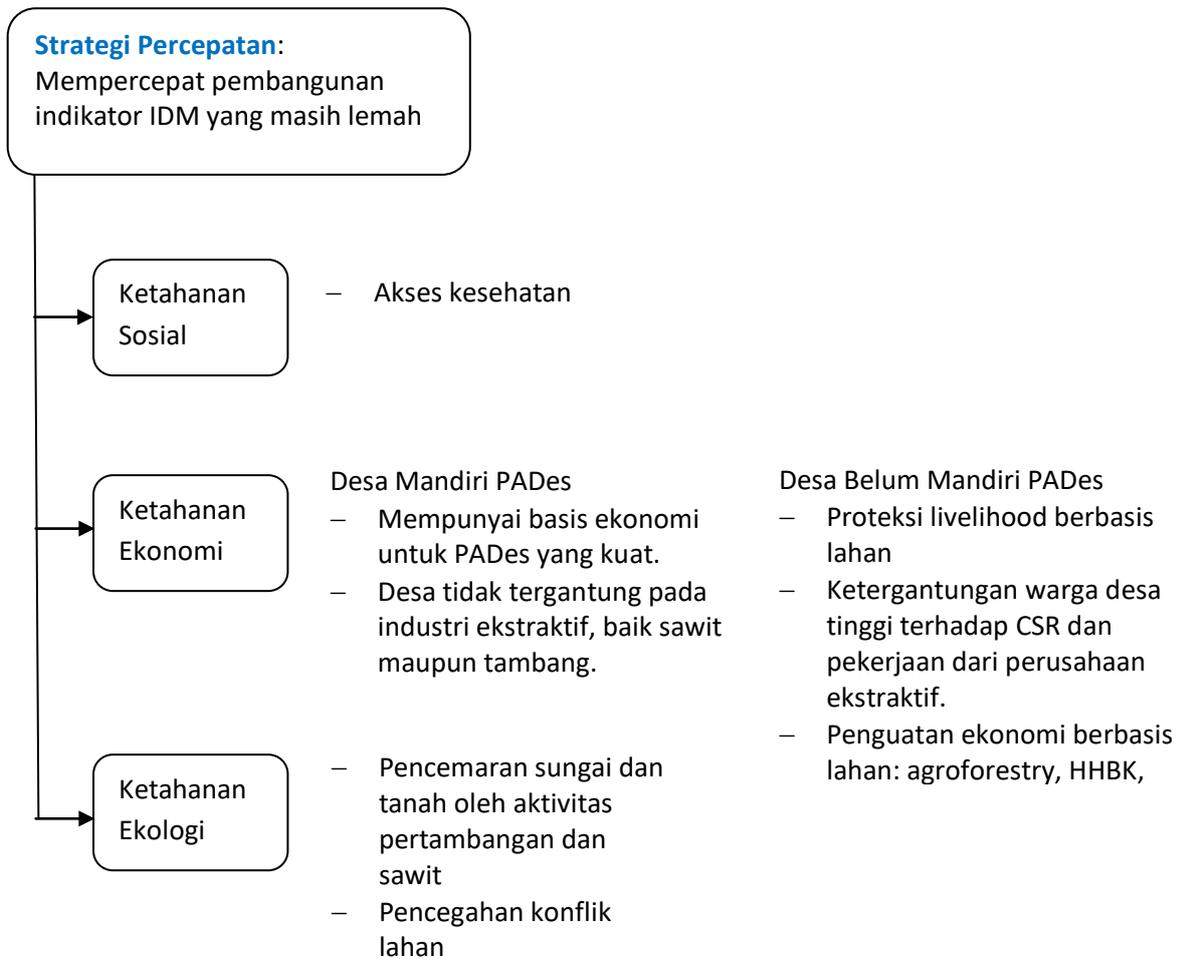
Desa-desa pesisir yang dikelilingi oleh industri ekstraktif berbasis lahan ini tentu saja tidak semua mempunyai aset ekonomi mandiri seperti Desa Muara Jekak. Karena itu, untuk desa-desa yang belum mempunyai sumber PADes mandiri, perlu mengoptimalkan potensi desa di satu sisi, dan merevitalisasi CSR perusahaan-perusahaan ekstraktif untuk memperkuat pembangunan desa di sisi lain. Untuk itu, strategi bagi desa-desa yang belum mandiri secara

⁵⁵ SDGs Desa merupakan upaya pemerintah untuk membumikan SDGs di tingkat desa yang diundangkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2020. Jika SDGs mempunyai 17 tujuan, maka SDGs Desa menambah satu tujuan ke 18, yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

⁵⁶ Desa Muara Jekak mandiri secara ekonomi sejak mempunyai kebun sawit desa seluas 150 ha yang berproduksi sejak tahun 2008.

PADes akan berbeda dengan strategi untuk desa yang sudah mandiri secara PADes, seperti Desa Muara Jekak ini.

Gambar 7. Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pesisir dan KIE



Menghadapi kondisi dan isu strategis yang ada di desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif seperti Desa Muara Jekak ini, maka pemerintah perlu membangun strategi percepatan pembangunan desa sebagai berikut:

Tabel 7. Strategi pembangunan desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif

No.	Desa Mandiri PADes (Muara Jekak)	Desa-Desa Belum Mandiri PADes
1.	Ketahanan sosial desa-desa ini cenderung sudah bagus, sehingga pemerintah perlu fokus pada sejumlah indikator yang masih lemah, seperti akses ke RSUD yang cukup jauh dan akses BPJS Kesehatan yang masih dibawah 30%.	Desa-desa yang belum mandiri secara PADes mempunyai ketahanan sosial yang berbeda-beda, baik akses kesehatan, akses pendidikan, maupun kondisi perumahan warga desa. Pemerintah perlu memberi perhatian pada indikator-indikator ketahanan sosial yang masih lemah di desa-desa ini.
2.	Desa-desa yang mandiri secara PADes ini cenderung mempunyai kekuatan untuk membangun ekonomi desa secara mandiri, termasuk dalam pengembangan	Desa-desa yang belum mandiri secara PADes, perlu mengoptimalkan dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi desa, berbasis pada potensi desa, baik di sektor

<p>potensi ekonomi desa lainnya, seperti pengembangan wisata pulau, dan pembangunan hotel di pusat kota Sandai. Pemerintah perlu memberi dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, fasilitas transportasi, dan sebagainya.</p>	<p>pertanian, perdagangan, pariwisata, dan sebagainya. Penguatan ekonomi berbasis lahan perlu dilakukan, termasuk agroforestry dan HHBK.</p> <p>Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi desa-desa ini dalam membangun keterhubungan antar desa dan kerjasama antar desa. Kerjasama antar desa ini sangat penting dilakukan supaya terjadi transfer pengetahuan dari desa-desa yang sudah mandiri kepada desa-desa yang masih tertinggal, baik dalam pengembangan ekonomi desa, peningkatan kapasitas SDM desa, maupun penguatan akses pasar, akses lembaga keuangan, dan lain-lain.</p>
<p>3. Kekuatan ekonomi yang dikelola unit bisnis desa bisa diarahkan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan masyarakat desa secara mandiri. Di Desa Muara Jekak, sejumlah warga desa sudah mengembangkan kebun sawit mandiri yang didukung pendanaannya dari unit usaha desa.</p> <p>Sayangnya, kewirausahaan di sektor lain, baik jasa, perdagangan, dan sektor riil, belum berkembang bagus. Warga desa dan pemerintah desa belum berani memberi dukungan untuk bisnis warga desa yang belum berpengalaman dan resiko tinggi.</p> <p>Ruang ini bisa diisi oleh pemerintah melalui kebijakan dan penganggaran yang mendukung pengembangan kewirausahaan desa dan perluasan akses pasar bagi masyarakat desa.</p>	<p>-</p>
<p>4. Dalam kondisi desa sudah mandiri secara PADes, maka potensi CSR bisa diarahkan untuk peningkatan volume ekonomi desa di satu sisi, dan mendukung program pemerintah dalam pencapaian SDGs di sisi lain.</p>	<p>Desa-desa yang belum mandiri secara PADes, maka dana CSR merupakan potensi penting yang perlu diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi desa di berbagai sektor potensial. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ekstraktif menjalankan program CSR untuk pemberdayaan masyarakat desa dan mendukung ketahanan desa secara sosial, ekonomi dan ekologi.</p>
<p>5. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memastikan upaya perlindungan terhadap sumber-sumber penghidupan masyarakat desa, baik lahan sawah, kebun, dan hutan adat, secara berkelanjutan.</p>	

4.4 KONDISI KETAHANAN DESA PESISIR DAN KISN

4.4.1 Kondisi Desa Pesisir dan KISN

Desa pesisir dan kawasan industri strategis nasional (KISN)⁵⁷ merupakan desa-desa yang terletak di wilayah pesisir dan berada dalam kawasan industri strategis nasional. Industri strategis nasional merupakan sebuah kawasan industri terpadu yang dibangun oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan berbagai fasilitas dan infrastruktur pendukungnya, termasuk pelabuhan laut, transportasi jalan, pergudangan/logistik, fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Provinsi Kalimantan Barat mempunyai sejumlah kawasan industri strategis nasional, salah satunya adalah di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.

Kawasan industri strategis nasional Mempawah merupakan proyek yang sedang dalam pembangunan. Berbagai perusahaan akan membangun pabrik pengolahan di wilayah ini. Saat ini, pemerintah sedang membangun pelabuhan internasional di pantai Kijing, di wilayah industri strategis Mempawah ini. Pelabuhan internasional ini akan menjadi salah satu terminal lalu lintas barang dan produk industri dari dan ke Kalimantan Barat, khususnya untuk keperluan ekspor berbagai produk industri yang dihasilkan dari kawasan industri strategis nasional ini.

Terdapat lima desa yang terdampak langsung dari pembangunan kawasan industri strategis nasional Sungai Kunyit ini, yakni Desa Bukit Batu, Desa Sungai Duri, Desa Sungai Limau, Desa Sungai Bundung Laut, dan Desa Mendalu.⁵⁸ Desa yang diteliti dalam riset ini adalah Desa Bukit Batu. Dalam status IDM, Desa Bukit Batu mempunyai status sebagai desa maju pada tahun 2019 dan 2020. Di desa ini, sedang dibangun industri pengolahan bauksit menjadi nikel oleh PT Borneo Alumina Indonesia (BAI). Perusahaan sedang melakukan proses pembangunan infrastruktur industri dan juga dalam proses pembebasan lahan-lahan masyarakat di dalam Desa Bukit Batu. Proses pembebasan lahan dilakukan melalui mekanisme jual beli antara pemilik lahan dengan perusahaan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa di kawasan industri strategis nasional ini adalah ketidakjelasan masa depan desa dan warga desa. Desa-desa di wilayah ini masih dalam proses menunggu kemana arah pembangunan kawasan industri strategis nasional ini dan ruang apa yang bisa dimanfaatkan oleh desa dan warga desa untuk pengembangan ekonomi mereka di masa yang akan datang. Di sisi lain, kehadiran berbagai perusahaan di wilayah ini juga berdampak secara sosial dan ekologi kepada masyarakat desa.

Karena itu, kita harus menganalisis secara hati-hati strategi pembangunan desa-desa di kawasan industri strategis nasional ini. Karena, di satu sisi kehadiran kawasan industri strategis nasional ini akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi di wilayah ini, dan dalam konteks

⁵⁷ Dalam penelitian ini, desa pesisir dan berada dalam kawasan industri strategis nasional adalah Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.

⁵⁸ Hasil survey tim peneliti di Kecamatan Sungai Kunyit tanggal 16-17 Nopember 2020.

yang lebih luas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Namun disisi lain, terdapat potensi marjinalisasi desa-desa dan masyarakat desa di wilayah industri strategis nasional ini jika tidak dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi dampak kehadiran berbagai industri bagi warga desa. Jika marjinalisasi ini berlanjut, maka masyarakat desa-desa di wilayah ini hanya akan menjadi tamu di rumah sendiri, dan tersisih dari proses industrialisasi yang terjadi.

Tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa di kawasan industri strategis Sungai Kunyit adalah bagaimana mereka harus berkompromi, beradaptasi, dan mempertahankan sumber penghidupan warga desa, di tengah proses industrialisasi di wilayah ini. Kondisi ini tentu saja tidak mudah ditangani oleh pemerintah desa dan warga desa. Pemerintah desa dan warga desa menjadi pihak *powerless* di tengah perubahan yang sangat cepat di wilayah ini: menunggu dan melihat apa yang akan terjadi.

Pemerintah kabupaten sepertinya kurang memberikan sosialisasi secara mendalam kepada desa-desa dan masyarakat desa tentang bagaimana masa depan desa-desa ini saat proses industrialisasi berjalan nanti. Walaupun ada sosialisasi, lebih banyak penjelasan normatif tentang dampak positif kehadiran kawasan industri strategis nasional ini kepada warga desa, seperti penciptaan lapangan kerja, dan sebagainya. Sayangnya, sampai penelitian ini dilakukan, belum ada persiapan yang memadai terhadap masyarakat desa oleh pemerintah dalam rangka menyambut kehadiran berbagai industri di wilayah ini.⁵⁹

Pemerintah desa dan masyarakat desa-desa yang terdampak proyek kawasan industri strategis nasional ini, seperti dibiarkan bertarung sendiri dalam menentukan ke mana arah masa depannya. Desa dibiarkan menangani sendiri konflik-konflik sosial yang muncul sebagai dampak kehadiran industri ini. Tokoh-tokoh desa di satu sisi merasa optimis, namun di sisi lain pesimis bahwa warga desa mereka akan bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran industri di wilayah ini. Apalagi, sumberdaya manusia desa hanya bisa digunakan sebagai buruh kasar di perusahaan-perusahaan tersebut. Kondisi ini tentu saja akan membuat warga desa tidak mampu bersaing dengan pendatang yang akan mengisi berbagai kebutuhan sumber daya manusia di wilayah ini seiring dengan berkembangnya industrialisasi.

Tentu saja, tantangan ketahanan desa menjadi perhatian semua pihak di desa, baik ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Apakah kehadiran industri strategis nasional ini akan membawa dampak pada penguatan semua ketahanan desa ini, atau justru sebaliknya. Karena itu, isu-isu strategis di desa-desa di kawasan industri strategis nasional ini juga perlu kita petakan dengan baik.

Dari sisi ketahanan sosial, tidak ada kendala bagi masyarakat desa-desa pesisir dan kawasan industri strategis nasional ini. Akses kesehatan bagus, akses pendidikan juga mudah. Demikian juga modal sosial masyarakat desa-desa ini yang masih cenderung kuat di dalam kemajemukan

⁵⁹ Diskusi dengan sejumlah tokoh Desa Bukit Batu, tanggal 16-18 Nopember 2020.

warga desa dari segi etnis dan agama. Namun yang perlu diantisipasi adalah dampak industrialisasi kepada ketahanan sosial masyarakat desa ke depan. Kehadiran berbagai industri dengan infrastruktur pendukungnya, perubahan kawasan menjadi areal industri yang diisi oleh mayoritas tenaga kerja luar desa, akan berdampak secara sosial.

Industrialisasi dan urbanisme (budaya kota) akan semakin kuat menancap di desa-desa kawasan ini. Jika kondisi ini berkembang, kemungkinan terjadinya *cultural shock* (keterkejutan budaya) akan dialami oleh warga desa. Keterkejutan budaya ini akan melahirkan mental patah semangat dan tidak mau bersaing dengan pendatang yang dianggap lebih mampu dan lebih maju dalam semua hal, dan lebih wajar untuk berada di wilayah industri dibandingkan dengan warga desa. Kondisi ini akan menyebabkan tersisihnya warga desa dari proses industrialisasi di wilayah ini.

Dari sisi ketahanan ekonomi, Desa Bukit Batu dan sejumlah desa terdampak industri strategis nasional ini merupakan desa pesisir dan pertanian. Mayoritas warga desa-desa di wilayah ini bekerja sebagai petani.⁶⁰ Dari sisi pendidikan, mayoritas warga desa hanya lulus SMP, dan sebagian lagi lulus SMA.⁶¹ Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi tokoh-tokoh desa bahwa para pemuda desa cenderung tidak akan mampu bersaing dalam perkembangan industrialisasi di wilayah ini. Sejumlah pemuda desa yang melanjutkan pendidikan tinggi, umumnya tidak mengambil pendidikan yang berhubungan dengan teknik dan industri. Kebanyakan melanjutkan ke perguruan tinggi guru dan agama.⁶² Karena itu, saat perusahaan di desa ini membuka lowongan berbagai posisi dengan syarat sarjana, tidak ada satupun warga desa yang memenuhi kualifikasi ini.

Jika mengharapkan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan industri tidak mudah dilakukan, maka pemerintah desa dan warga desa, tentu saja, harus berfikir kreatif untuk memajukan ekonomi desa. Dari sisi letak wilayah, desa-desa pesisir ini mempunyai akses yang bagus kepada semua ruang ekonomi, termasuk akses kepada pasar, akses lembaga keuangan, wilayah yang terbuka dan berada dekat dengan jalur Trans Kalimantan, dan sebagainya.

Salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi desa di desa-desa ini adalah potensi desa berbasis sumberdaya alam yang sangat terbatas. Satu-satunya potensi ekonomi desa adalah pertanian tadah hujan. Pertanian ini menjadi penopang ekonomi utama warga desa. Sejumlah pabrik pengolahan padi berdiri di desa-desa ini. Belum ada potensi ekonomi lain berbasis lahan yang bisa dikembangkan oleh warga desa. Potensi kelautan sebenarnya cukup bagus di wilayah

⁶⁰ Profil Desa Bukit Batu (2019) menyebutkan bahwa dari 2.115 warga desa ini, sebanyak 1,234 orang bekerja sebagai petani yang mengelola lahan sawah tadah hujan seluas 292 ha. Hanya 5 orang yang bekerja sebagai nelayan, 23 orang pedagang dan 40 orang sebagai peternak.

⁶¹ Profil Desa Bukit Batu tidak mempunyai data berapa jumlah warga desa berdasarkan pendidikan yang mereka jalani. Namun, Sekdes Bukit Batu kepada tim peneliti mengatakan bahwa mayoritas warga desa ini hanya lulus SMP. Sebagian lainnya lulus SD dan SMA.

⁶² Diskusi dengan Kepala Desa Bukit Batu, Harianto, tanggal 17 Nopember 2020.

ini. Hanya saja, pembangunan kawasan industri strategis ini mematikan akses masyarakat nelayan ke pantai karena sebagian wilayah pantai sudah dijadikan wilayah pelabuhan Kijing.

Karena itu, pemerintah desa melalui BUMDes Bukit Batu mencoba memanfaatkan peluang kehadiran perusahaan-perusahaan strategis nasional dengan cara membangun peluang bisnis bersama perusahaan-perusahaan tersebut. Beberapa persiapan yang dilakukan oleh BUMDes Bukit Batu adalah membangun basis bisnis catering dan laundry yang akan ditawarkan kepada PT Borneo Alumina Industri (BAI). Jika tawaran ini diterima, maka BUMDes akan mempunyai kerjasama yang bisa menyerap tenaga kerja di desa.⁶³

Dari sisi ketahanan ekologi, tantang utama yang dihadapi desa adalah pencemaran udara dari asap pabrik berbagai industri yang sudah berdiri dan akan dibangun di wilayah ini. Salah satu desa yang mengalami pencemaran udara dan mengotori air bersih masyarakat yang bersumber dari tadah hujan, adalah Desa Sungai Limau. Di wilayah tetangga Desa Bukit Batu ini berdiri perusahaan pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO), yakni PT. Energi Unggul Persada (EUP), yang masuk dalam wilayah industri strategis nasional ini. Pencemaran udara ini dan masalah lain yang berkaitan dengan kehadiran EUP menyebabkan beberapa kali warga desa berdemo dan harus berhadapan dengan aparat kepolisian.⁶⁴

Di Desa Bukit Batu sendiri, pencemaran yang terjadi adalah pencemaran udara dari aktivitas penambangan batu dan galian C di wilayah desa untuk keperluan pembangunan kawasan industri strategis ini. Aktivitas pengangkutan batu dan galian C ini melewati jalan-jalan utama desa, yang berdampak pada polusi udara (debu) dan kerusakan jalan-jalan desa. Konflik lahan di Desa Bukit Batu umumnya sebagai dampak dari proses jual beli lahan oleh masyarakat kepada pihak perusahaan.

Melihat berbagai tantangan yang dianalisis di atas, maka isu-isu strategis untuk desa-desa pesisir dan kawasan industri strategis ini adalah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8. Isu strategis pembangunan desa pesisir dan KISN

No.	Dimensi Isu	Isu Strategis Desa Pesisir dan KISN
1.	Dimensi Ketahanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> – Dampak industrialisasi kepada perubahan sosial di desa. Kehadiran banyak pekerja luar ke wilayah industri yang membawa budaya luar, akan berpengaruh pada perubahan nilai-nilai masyarakat desa. – Lahirnya cultural shock bagi warga desa, yang berdampak pada menurunnya semangat masyarakat untuk bersaing dengan pendatang, yang menyebabkan mereka termarginalkan.
2.	Dimensi Ketahanan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> – Warga desa tidak mempunyai sumberdaya manusia yang memadai untuk terlibat dalam proses industrialisasi di wilayah ini. Warga desa berpotensi mengalami marginalisasi.

⁶³ Diskusi dengan Ketua BUMDes Bukit Batu, M. Syafaat Thoyib, tanggal 18 Nopember 2020.

⁶⁴ Dskusi dengan Kepala Desa Sungai Limau, Munjuri, tanggal 27 Nopember 2020.

	<ul style="list-style-type: none"> – Keragaman produksi desa terbatas. Produksi utama desa adalah beras/padi dari sawah tadah hujan. – BUMDes perlu mempersiapkan diri dalam membangun peluang kerjasama dengan berbagai perusahaan di kawasan industri strategis nasional ini. – Karena tidak semua warga desa akan bisa beradaptasi dengan industrialisasi, maka sumber-sumber penghidupan masyarakat desa seperti sawah dan kebun, perlu tetap dipertahankan.
3. Dimensi Ketahanan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> – Aktivitas industri (yang sudah berdiri) menyebabkan terjadinya polusi udara dan membuat air minum warga dari air hujan menjadi tercemar dan tidak bisa dikonsumsi. – Aktivitas transportasi material batu dan galian C untuk pembangunan kawasan industri strategis ini menyebabkan polusi udara di desa Bukit Batu dan kerusakan jalan-jalan desa. – Potensi konflik antara masyarakat desa dengan perusahaan mulai terbuka.

4.4.2 Revitalisasi CSR untuk Pembangunan Desa Pesisir dan KISN

Sebagai desa-desa yang terletak di wilayah industri strategis nasional, maka kehadiran berbagai industri besar di wilayah ini diharapkan bisa membawa dampak kemajuan secara ekonomi kepada warga desa. Dampak ekonomi ini akan terjadi jika proses *engagement* dan program CSR yang diterapkan oleh berbagai perusahaan di kawasan ini sesuai dengan kebutuhan warga desa di satu sisi, dan diarahkan untuk membangun kemandirian desa. Dalam konteks ini, revitalisasi CSR harus dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan, bukan karitatif.

Belajar dari penyaluran skema CSR yang sudah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan ekstraktif di wilayah lain Kalimantan Barat, pendekatan yang digunakan cenderung karitatif atau bagi-bagi bantuan kepada warga desa, bukan proses pemberdayaan untuk kemandirian ekonomi warga desa. Pendekatan karitatif ini akan menciptakan ketergantungan warga desa kepada perusahaan-perusahaan tersebut secara terus-menerus. Dampaknya, jika perusahaan ini selesai beroperasi, maka warga desa kembali menjadi miskin karena sumber penghidupan mereka tidak ada lagi dan mereka tidak siap membangun dengan kemampuan sendiri.

Karena itu, mengingat masih dalam proses pembangunan, dan kehadiran berbagai industri di wilayah ini juga masih baru, maka upaya untuk mendorong penerapan CSR secara lebih bagus bisa dilakukan. Dalam konteks ini, peran pemerintah provinsi dan kabupaten sangat menentukan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan CSR secara benar, tidak sekadar sebagai alat keamanan investasi dan menggugurkan kewajiban.

Untuk itu, revitalisasi CSR di wilayah ini perlu dibangun proses sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten yang mempunyai kawasan industri strategis nasional seperti Kabupaten Mempawah perlu memastikan

kepatuhan semua perusahaan di wilayah industri ini untuk menjalankan perintah UU (khususnya Perda Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016) untuk menjalankan CSR dengan dukungan pendanaan sebesar 2,5% dari keuntungan perusahaan.⁶⁵

2. Perusahaan-perusahaan di kawasan ini perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam membangun *engagement* dengan masyarakat lokal. Beberapa konflik yang sudah muncul ke permukaan di wilayah ini adalah karena lemahnya kapasitas *engagement* perusahaan dengan masyarakat desa. Pihak perusahaan lebih cenderung membangun pola relasi konfliktual dibandingkan dengan konsensual. Misalnya dengan menggunakan aparat keamanan dalam menghadapi keluhan dan protes masyarakat. Lemahnya kemampuan *engagement* ini berdampak pada terjadinya pembelahan dalam masyarakat desa. Kondisi ini tidak bagus dalam upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa.⁶⁶
3. Pendekatan dalam CSR yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan di wilayah ini harus sesuai dengan berbagai aturan dan pendekatan nasional dan internasional, seperti ISO 26000, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Perda No. 4/2016, dan lain sebagainya. Jika perusahaan-perusahaan menggunakan pendekatan ini, maka implementasi CSR akan bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi lapangan memperlihatkan bahwa pendekatan CSR yang cenderung lebih bagus adalah yang dilakukan oleh perusahaan BUMN di wilayah ini.⁶⁷ Sementara sejumlah perusahaan swasta cenderung tidak menerapkan CSR secara baik dan bahkan cenderung membangun hubungan konfliktual dengan masyarakat desa.
4. Selagi industrialisasi di wilayah ini baru dimulai, maka pemerintah provinsi dan kabupaten seharusnya membangun mekanisme pengawasan yang bagus kepada semua perusahaan dalam penerapan CSR secara benar dan memberi dampak pemberdayaan dan keberlanjutan kepada masyarakat desa.

4.4.3 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pesisir dan KISN

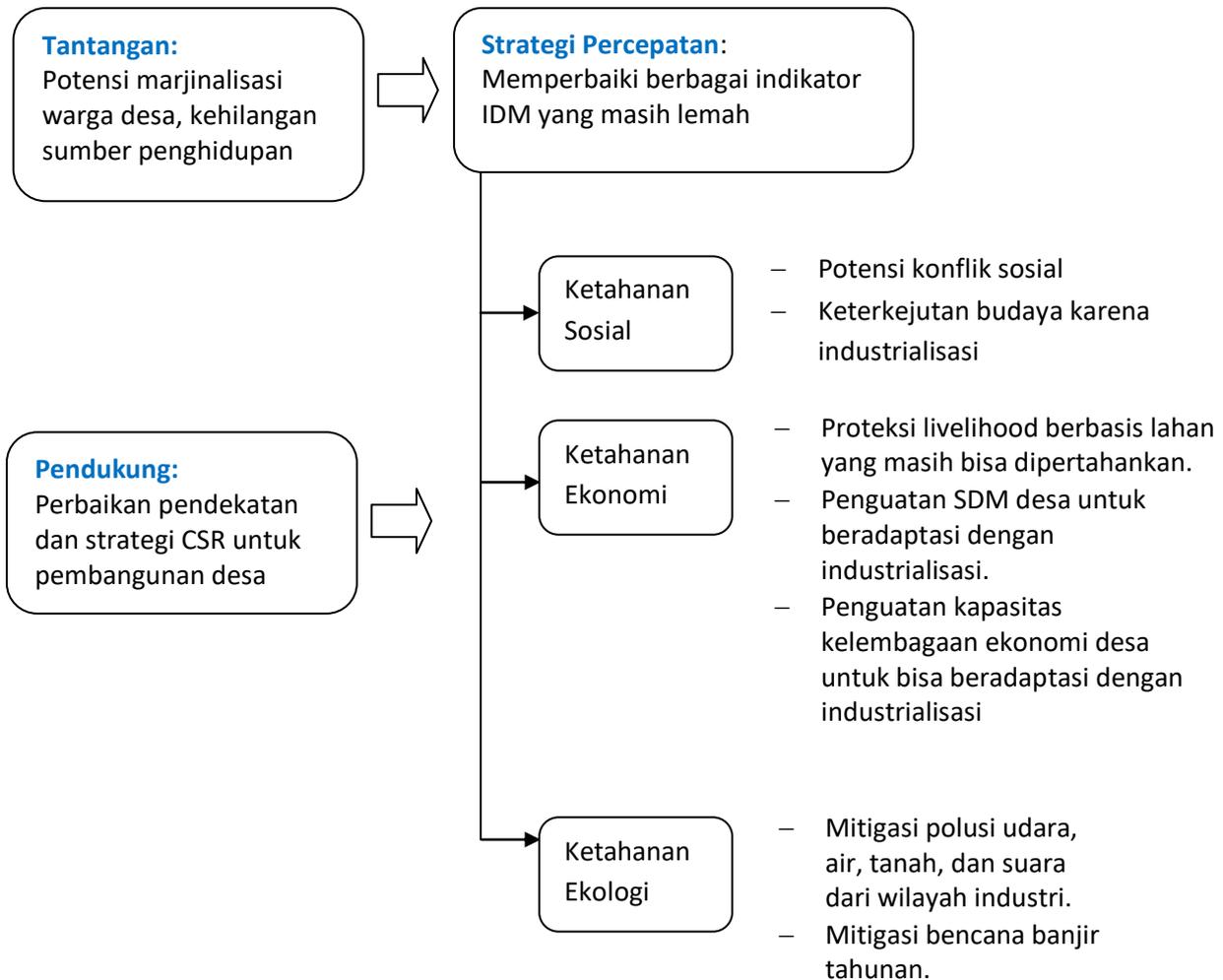
Menghadapi perubahan yang sangat cepat karena hadirnya proyek strategis nasional di wilayah ini, membuat desa-desa terdampak harus cepat berbenah. Jika tidak, mereka akan tersisih dan tersingkirkan dari proses pembangunan yang sedang berjalan. Kehadiran pekerja dari luar yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan lebih bagus membuat warga desa hanya bisa mengisi ceruk pekerjaan kasar di wilayah industri ini. Ceruk pekerjaan kasar ini tentu saja merupakan ruang yang memberikan nilai ekonomi paling kecil kepada warga desa.

⁶⁵ Sesuai dengan pasal 15 ayat 1(d) Perda Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Kalimantan Barat.

⁶⁶ Kejadian di Desa Sungai Limau, sesuai informasi dari Kepala Desa Sungai Limau, Munjiri.

⁶⁷ Diskusi dengan tim PT BAI di Mempawah tanggal 18 Nopember 2020.

Gambar 8. Strategi Percepatan Pembangunan Desa Pesisir dan KIE



Melihat kecenderungan ini, yang perlu dibangun di desa-desa pesisir dan KISN ini adalah mengoptimalkan potensi kehadiran kawasan industri strategis nasional untuk warga desa di satu sisi dan mempersiapkan kemandirian desa secara ekonomi di sisi lain. Karena itu, strategi percepatan pembangunan desa-desa pesisir dan kawasan industri strategis nasional ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memberi informasi secara terbuka kepada desa-desa terdampak proyek industri strategis nasional ini, baik dampak sosial, ekonomi, dan ekologi. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi warga desa dalam merumuskan masa depan mereka di wilayah ini. Informasi ini juga akan membantu desa-desa untuk mempersiapkan transisi dari desa pertanian menuju desa industri.
2. Desa-desa terdampak KISN ini perlu mempersiapkan perencanaan desa menuju desa industri, dengan cara:

- a. Semua desa terdampak KISN perlu memperbaiki rencana pembangunan desa, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang berdurasi enam tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun menuju desa industri. Untuk itu, kerangka transformasi ini perlu diperkuat untuk desa-desa ini berbasis pada informasi yang benar tentang rencana pembangunan kawasan industri strategis nasional ini.
 - b. Desa-desa terdampak perlu mempersiapkan sumberdaya manusia (SDM) desa dalam rangka memenuhi kebutuhan industri di kawasan ini. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu membuat kebijakan afirmatif untuk penguatan SDM desa-desa terdampak KISN di wilayah ini.
 - c. Desa-desa terdampak perlu memperkuat basis kelembagaan ekonomi desa, baik BUMDes atau lainnya, untuk menyambut peluang kerjasama dengan berbagai perusahaan di kawasan ini. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu membantu desa-desa ini dalam peningkatan kapasitas BUMDes dan asupan informasi yang benar tentang peluang kerja sama ke depan.
3. Mitigasi dan adaptasi risiko sosial, ekonomi, dan ekologi perlu dirumuskan sejak awal, sehingga desa-desa di kawasan ini bisa mempersiapkan diri untuk memperkuat ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi di tengah proses industrialisasi di wilayah ini. Khusus untuk strategi ketahanan sosial dan ekologi adalah sebagai berikut:
- a. Masyarakat desa perlu mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan dari proses perubahan sosial di wilayah ini. Industrialisasi, pembukaan bentang alam, kehadiran orang-orang luar dalam jumlah banyak, beroperasinya berbagai pabrik pengolahan barang, meningkatnya arus lalu lintas, dan sebagainya, akan membawa dampak sosial kepada masyarakat desa, yang harus dipersiapkan sejak dini supaya tidak terjadi *cultural shock*. Konflik-konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat desa juga sudah mulai terjadi.
 - b. Masyarakat desa perlu mempersiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan dampak ekologis di wilayah ini yang berpengaruh secara ekologis pada kehidupan warga desa. Pencemaran udara, pencemaran suara (kebisingan), pencemaran air dan tanah, dan sebagainya sangat mungkin terjadi dan berdampak pada warga desa.
4. Meskipun proses industrialisasi akan berjalan di wilayah ini, tentu saja tidak semua warga desa-desa terdampak KISN akan mendapatkan manfaat dari kehadiran KISN ini. Karena itu, sumber-sumber penghidupan masyarakat yang selama ini menjadi penopang hidup mereka, perlu tetap dijaga. Misalnya, lahan sawah, kebun agroforestry, dan sebagainya, harus tetap dipertahankan untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa. Jika

sumber-sumber penghidupan ini tidak bisa dipertahankan, maka kekhawatiran bahwa warga desa akan tersingkir dari kehidupan desa, semakin membesar.

4.5 KONDISI KETAHANAN DESA TERPENCIL DAN PERBATASAN

4.5.1 Kondisi Desa Terpencil dan Perbatasan

Desa terpencil dan perbatasan⁶⁸ merupakan desa-desa di Kalimantan Barat yang terletak di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, serta berada dekat dengan perbatasan negara tetangga Malaysia. Penelitian ini tidak melakukan studi lapangan di desa yang termasuk dalam tipologi terpencil dan perbatasan. Namun demikian, karena keberadaan desa-desa terpencil dan perbatasan cukup signifikan di Kalimantan Barat, maka dengan menggunakan data sekunder, analisis tetap dilakukan, meskipun lebih terbatas.

Di sisi lain, tidak semua desa perbatasan dengan negara tetangga Malaysia merupakan desa terpencil, yang biasanya ditandai oleh keterbatasan dalam akses transportasi dan berbagai akses lainnya. Sejumlah desa yang berada di perbatasan dan pada jalur transportasi kedua negara, dan dekat dengan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)⁶⁹ merupakan desa-desa yang sangat mudah diakses. Karena itu, kategorisasi ini hanya untuk desa-desa yang masuk dalam tipologi terpencil, baik di wilayah perbatasan maupun bukan perbatasan.

Seperti sudah disebutkan di atas, kondisi utama yang dihadapi oleh desa-desa terpencil dan perbatasan adalah aksesibilitas wilayah yang sangat terbatas. Desa Nanga Jelundung yang terletak di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang misalnya. Desa ini merupakan desa terpencil namun bukan di perbatasan dengan negara tetangga. Untuk menuju ke desa tersebut, kita harus melalui jalur air selama sekitar 3 jam menuju Kecamatan Serawai. Atau bisa juga dengan jalur darat menuju Kecamatan Serawai dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Dari ibukota kecamatan menuju desa, kita harus memperhatikan kondisi pasang surut air sungai. Kita tidak bisa menuju desa pada sore hari karena aliran air di anak sungai menuju desa biasanya surut dan tidak memungkinkan perahu menuju desa.

Karena itu, cara yang paling rasional dilakukan banyak orang adalah dengan menginap semalam di Serawai, dan keesokan harinya berangkat ke desa Nanga Jelundung dengan menggunakan

⁶⁸ Penelitian ini tidak melakukan studi lapangan untuk desa terpencil dan perbatasan karena beberapa limitasi, termasuk covid19. Karena itu, untuk tipologi desa ini, digunakan data sekunder dari berbagai sumber.

⁶⁹ Menurut data BPS (2020), panjang perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak adalah 966 km di lima kabupaten, dan sudah memiliki 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), masing-masing di Aruk (Kabupaten Sambas), Entekong (Kab. Sanggau), dan Badau (Kab. Kapuas Hulu). Sementara dua PLBN lainnya yakni di Sungai Kelik (Kab. Sintang) dan Jagoi Babang (Kab. Bengkayang) sedang dirintis proses pembangunannya. Perbatasan dengan negara tetangga ini di satu sisi menjadi peluang pengembangan pemasaran produk daerah di perbatasan melalui PLBN yang sudah ada di Aruk, Entekong, dan Badau, namun di sisi lain juga sangat rawan terjadinya kasus penyelundupan berbagai barang, termasuk narkoba yang sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa serta kualitas generasi muda Indonesia.

perahu kayu bermesin atau ketinting. Dengan menggunakan moda transportasi ketinting ini, kita membutuhkan waktu sekitar tujuh jam menuju desa. Kondisi aksesibilitas wilayah inilah yang membuat desa-desa seperti ini menjadi sangat terpencil.

Desa-desa terpencil dan perbatasan ini cenderung terisolasi dari wilayah luar. Akses transportasi yang jauh dan mahal melalui jalur sungai, berdampak pada meningkatnya berbagai harga di desa ini, khususnya harga berbagai barang dan jasa yang dibawa dari luar desa atau dari kota. Sebaliknya, karena biaya transportasi yang mahal, menyebabkan produksi ekonomi desa tidak mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sebagai contoh, Desa Nanga Jelundung di Kabupaten Sintang mempunyai produk getah karet dan durian. Namun, produk-produk ini tidak bisa dijual ke pasar di ibukota kabupaten karena kalah bersaing dengan produk dari daerah lain yang harganya lebih murah.

Tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa terpencil dan perbatasan adalah keterisolasian dan keterbukaan wilayah yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat akses ke wilayah desa menjadi tidak mudah dilakukan oleh warga desa dan orang luar yang akan masuk ke desa. Biaya transportasi menuju desa menjadi berlipat ganda dan sangat mahal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Karena itu, jika akses transportasi menuju desa bisa dibuka, maka semua aspek lain akan mudah diperbaiki. Namun, jika keterisolasian wilayah ini tidak bisa ditangani, maka akan berdampak pada berbagai dimensi ketahanan desa lainnya, termasuk ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi.

Dari sisi ketahanan sosial, tantangan utama yang dihadapi desa terpencil dan perbatasan adalah terbatasnya akses layanan kesehatan di desa dan di luar desa. Di desa hanya terdapat bidan desa dan posyandu yang layanan kesehatannya sangat terbatas. Sementara untuk mengakses Puskesmas di ibukota kecamatan membutuhkan biaya besar dan waktu lebih dari 7 jam perjalanan air/sungai. Demikian juga akses ke RSUD di ibukota kabupaten yang membutuhkan waktu lebih lama.

Keterisolasian wilayah desa juga berdampak pada akses pendidikan yang terbatas. Di desa hanya terdapat Sekolah Dasar (SD) Negeri. Untuk mengakses SMP dan SMA/SMK, warga desa harus pindah dan tinggal di ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten. Beberapa warga desa yang mempunyai basis ekonomi kuat, mereka akan menyekolahkan anak-anaknya ke kota terdekat dan anaknya tinggal di kota.

Keterisolasian wilayah desa juga membuat warga desa tidak mempunyai akses ke listrik dan komunikasi. Untungnya, khusus untuk listrik, terdapat proyek *Millennium Challenge Account* (MCA) Indonesia yang membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) pada tahun 2018. Namun untuk telekomunikasi, tidak ada satupun jaringan telekomunikasi seluler yang bisa diakses di desa ini.

Dari sisi ketahanan ekonomi, mayoritas warga desa hidup subsisten berbasis lahan. Ladang bergilir menjadi sumber ekonomi utama yang menghasilkan padi ladang sebagai sumber

pangan utama warga desa. Namun demikian, padi ladang ini cenderung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga di desa ini, sehingga mereka harus membeli beras dari kota yang harganya tinggi.

Kebun-kebun warga dikembangkan dalam bentuk agroforestry, di mana semua jenis tanaman keras, tanaman buah, dan tanaman lainnya terdapat di kebun, yang menjadi sumber penghidupan secara ekonomi dan sosial budaya masyarakat desa. Produk utama kebun yang mempunyai nilai ekonomi adalah karet dan durian. Sayangnya, mahalnya transportasi membuat produk-produk desa tidak cukup ekonomis jika dijual ke pasar (di kota).

Sungai menjadi urat nadi ekonomi, transportasi, dan sumber air bersih. Secara ekonomi, sungai sudah dieksploitasi oleh sejumlah pihak sebagai ladang pertambangan emas tanpa izin (PETI). Kondisi ini membuat pencemaran air raksa di sungai menjadi sangat tinggi.

Dari sisi ketahanan ekologi, ancaman terbesar kondisi ekologis di desa-desa ini adalah pencemaran sungai oleh merkuri untuk PETI. Padahal, sungai merupakan sumber utama air bersih bagi warga desa. Potensi bencana di desa-desa terpencil dan perbatasan ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Tidak ada potensi konflik sosial berbasis lahan antar penduduk desa, kecuali dengan perusahaan ekstraktif yang berada di dekat desa, terkait dengan okupasi lahan hutan adat milik desa.

Mengacu pada kondisi dan kecenderungan desa-desa terpencil dan perbatasan di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa-desa terpencil dan perbatasan ini dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 9. Isu strategis pembangunan desa terpencil dan perbatasan

No.	Dimensi Isu	Isu Strategis Desa Terpencil dan Perbatasan
1.	Dimensi Ketahanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> – Terbatasnya akses layanan kesehatan di desa dan di luar desa. – Keterisolasian wilayah desa juga berdampak pada akses pendidikan yang terbatas. Di desa hanya terdapat Sekolah Dasar Negeri. – Untungnya, khusus untuk listrik, terdapat proyek MCAI yang membangun micro hydro tahun 2018. – Untuk telekomunikasi, tidak ada satupun jaringan telekomunikasi seluler yang bisa diakses di desa.
2.	Dimensi Ketahanan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> – Mayoritas warga desa hidup subsisten berbasis lahan. Ladang bergilir menjadi sumber ekonomi utama yang menghasilkan padi ladang sebagai sumber pangan utama warga desa. – Kebun-kebun warga dikembangkan dalam bentuk agroforestry, di mana semua jenis tanaman keras, tanaman buah, dan tanaman lainnya terdapat di kebun, yang menjadi sumber penghidupan secara ekonomi dan sosial budaya masyarakat desa. – Sungai menjadi urat nadi ekonomi, transportasi, dan sumber air bersih.
3.	Dimensi Ketahanan	<ul style="list-style-type: none"> – Ancaman terbesar kondisi ekologis di desa-desa ini adalah pencemaran sungai oleh merkuri untuk PETI.

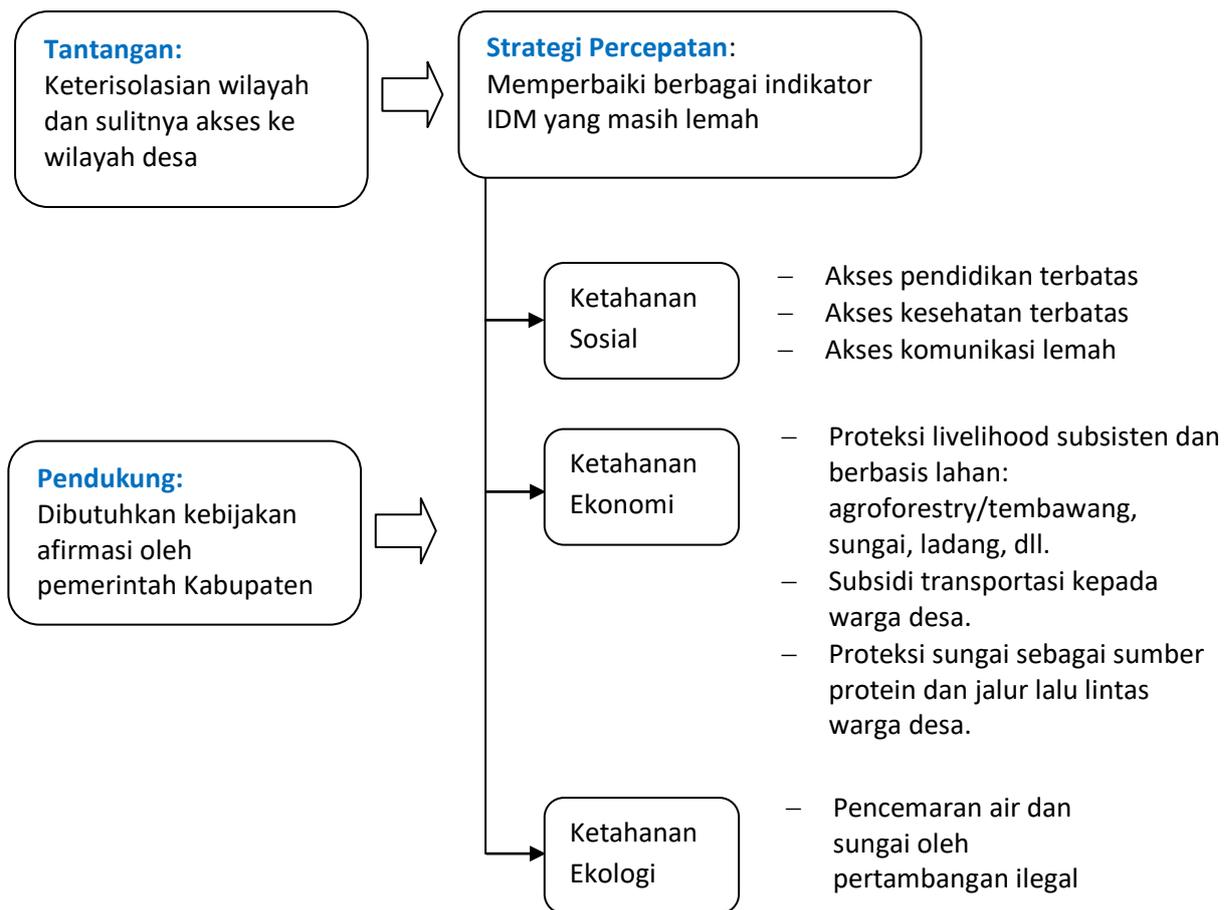
Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> – Potensi bencana di desa-desa terpencil dan perbatasan ini adalah kebakaran hutan dan lahan. – Potensi konflik sosial berbasis dengan perusahaan ekstraktif yang berada di dekat desa.
---------	--

4.5.2 Strategi Percepatan Pembangunan Desa Terpencil dan Pedalaman

Menghadapi kondisi dan kecenderungan desa-desa terpencil dan perbatasan di Kalimantan Barat, maka pilihan strategi prioritas dalam pembangunan desa-desa dengan tipologi ini harus mengacu pada penyelesaian tantangan utama yang dihadapi warga desa, yakni keterisolasian wilayah desa, yang berdampak pada ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Karena itu, penelitian ini memberikan prioritas percepatan pembangunan desa-desa terpencil dan perbatasan sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus berupaya membuka kondisi keterisolasian desa-desa terpencil dan perbatasan ini. Secara ekonomi, biaya untuk membangun jalan menuju desa-desa terpencil di Kalimantan Barat sangat besar dan tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang diakses oleh jalan tersebut. Karena itu, bisa dimaklumi jika pemerintah sampai saat ini belum berupaya membangun jalan darat menuju desa-desa terpencil. Namun demikian, pemerintah sebenarnya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ekstraktif berbasis lahan yang berada di wilayah menuju desa-desa terpencil dan perbatasan tersebut dalam membangun infrastruktur jalan.
2. Jika akses terhadap keterbukaan wilayah desa-desa terpencil dan perbatasan ini tidak mudah dilakukan, maka pemerintah provinsi dan atau kabupaten harus membuat **kebijakan afirmatif** untuk memastikan bahwa ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan dengan mendekatkan layanan sosial dasar, khususnya layanan kesehatan dan pendidikan ke desa.
 - a. Mendekatkan layanan kesehatan bisa dilakukan dengan cara membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah desa-desa terpencil dan perbatasan ini, dengan tenaga kesehatan yang memadai. Mendekatkan layanan kesehatan ini termasuk memfasilitasi akses jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) yang masih rendah di desa-desa terpencil dan perbatasan. Selain itu, perlu diprogramkan kunjungan tim medis secara rutin untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa, seperti pemberian nutrisi dan vitamin, pengobatan atau operasi gratis untuk berbagai jenis penyakit yang umum dihadapi masyarakat. Karenanya, penguatan pangkalan data (*database*) kondisi dasar masyarakat ini menjadi penting sebagai dasar pertimbangan program-program “jemput bola” seperti ini.

Gambar 9. Strategi Percepatan Pembangunan Desa Terpencil dan Perbatasan



- b. Sedangkan mendekatkan layanan pendidikan kepada warga desa terpencil dan perbatasan ini bisa dilakukan dengan menyediakan infrastruktur pendukung kepada warga desa terpencil dan perbatasan ini. Misalnya, membangun asrama di perkotaan terdekat, khusus untuk anak-anak desa terpencil dan perbatasan, sehingga mereka bisa mengakses pendidikan menengah (SMP dan SMA). Opsi lain adalah mengembangkan kelas terbuka di desa-desa tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sekolah secara online melalui program internet desa, dan di desa ditempatkan tenaga guru yang bisa berasal dari rekrutmen program guru ke desa terpencil atau membuka kerja sama dengan lembaga filantropi yang menaruh kepedulian di bidang pendidikan yang berfungsi rangkap sebagai guru, fasilitator, dan mentor bagi masyarakat.
- c. Pengadaan pusat pengetahuan dan informasi desa, seperti sarana perpustakaan dan mengaktifkan unit Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan materi atau bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan pada masing-masing desa. Ini dimaksudkan agar diseminasi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat seperti keterampilan hidup (*life skill*) bagi masyarakat desa bisa berkembang dengan baik.

3. Jika akses terhadap keterbukaan wilayah desa-desa terpencil dan perbatasan ini belum mampu diwujudkan oleh pemerintah, maka warga desa akan tetap bisa bertahan hidup dengan pola sumber penghidupan (*livelihood*) subsisten berbasis lahan di desa. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan beberapa hal:
 - a. Menjaga dan memastikan sumber-sumber *livelihood* masyarakat desa-desa terpencil dan perbatasan tetap terjaga dan berkelanjutan. Sumber utama *livelihood* masyarakat desa-desa ini adalah ladang bergilir sebagai sumber padi, kebun *agroforestry*, sungai sebagai sumber ikan dan air bersih, serta hutan adat sebagai penyangga sosial dan budaya masyarakat. Jika sumber-sumber penghidupan ini bisa terjaga dengan baik, maka masyarakat desa akan tetap bisa hidup secara wajar dari alam.
 - b. Pemerintah bisa memberi subsidi transportasi untuk kebutuhan warga desa terhadap pangan dan sandang yang harus didatangkan dari kota, sehingga harganya tetap tidak terlalu mahal di desa.
4. Ketahanan ekologis di desa-desa terpencil dan perbatasan cenderung rentan karena pengawasan yang lemah. Praktek pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah sungai desa misalnya, cenderung luput dari pengawasan karena akses yang sangat jauh dari pusat kekuasaan di perkotaan. Demikian juga potensi konflik lahan dengan perusahaan ekstraktif cenderung tidak terpantau oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Menghadapi kondisi ini, dibutuhkan kolaborasi multipihak untuk memastikan ketahanan ekologi desa-desa terpencil dan perbatasan bisa berjalan bagus, ketika pemerintah sendiri juga mempunyai keterbatasan.

Jika prioritas strategi di atas bisa diterapkan dengan baik oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, maka upaya mempercepat pembangunan desa-desa terpencil dan perbatasan tetap bisa dilakukan. Namun harus diakui bahwa tidak mudah untuk menaikkan status IDM desa-desa ini yang umumnya sangat tertinggal karena keterpencilannya. Meskipun demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa ketahanan warga desa secara sosial, ekonomi, dan ekologi tetap terpenuhi. Dengan kata lain, meskipun dengan status desa tertinggal menurut IDM, namun desa-desa terpencil dan perbatasan ini bisa memenuhi semua kebutuhan dasarnya, baik dari dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi secara bagus dan wajar.

BAB 5

PERTUMBUHAN HIJAU, PPI, DAN PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan desa menjadi semakin terarah sejak diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa menjadi bagian dari proses pembangunan yang didukung oleh pendanaan dari APBN yang dinamakan dengan dana desa. Pemerintah desa menjadi pemerintah tingkat terbawah yang mempunyai otonomi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pihak juga terus mendorong percepatan pembangunan desa dari berbagai arena. Seperti sudah dibahas dalam Bab 3, bahwa pemerintah pusat dan daerah saat ini menggunakan dua pendekatan dalam pembangunan desa, yakni:

1. Pendekatan Desa Membangun.
2. Pendekatan SDGs Desa.

Pendekatan Desa Membangun sudah digunakan pemerintah dalam menilai capaian pembangunan desa dalam tiga aspek utama, yakni ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Pemerintah membuat indeks yang dinamakan Indeks Desa Membangun (IDM) tahunan untuk menilai peningkatan kualitas pembangunan desa. Terdapat 52 indikator untuk menilai kemajuag desa dari ketiga aspek tersebut. Sementara pendekatan SDGs desa merupakan pendekatan baru yang digunakan sejak tahun 2020.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga membuat kebijakan pertumbuhan hijau (*green growth*) untuk memperbaiki pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa yang akan datang. Pendekatan pertumbuhan hijau ini sebenarnya tidak ditujukan secara spesifik untuk pembangunan desa, melainkan untuk mengendalikan pendekatan pembangunan yang berbasis pada *business as usual* (BAU). Untuk mendukung kebijakan pertumbuhan hijau ini, IDH membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui pendekatan PPI (Produksi, Proteksi, dan Inklusi) berbasis lansekap. Pendekatan PPI ini juga tidak secara khusus diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan desa.

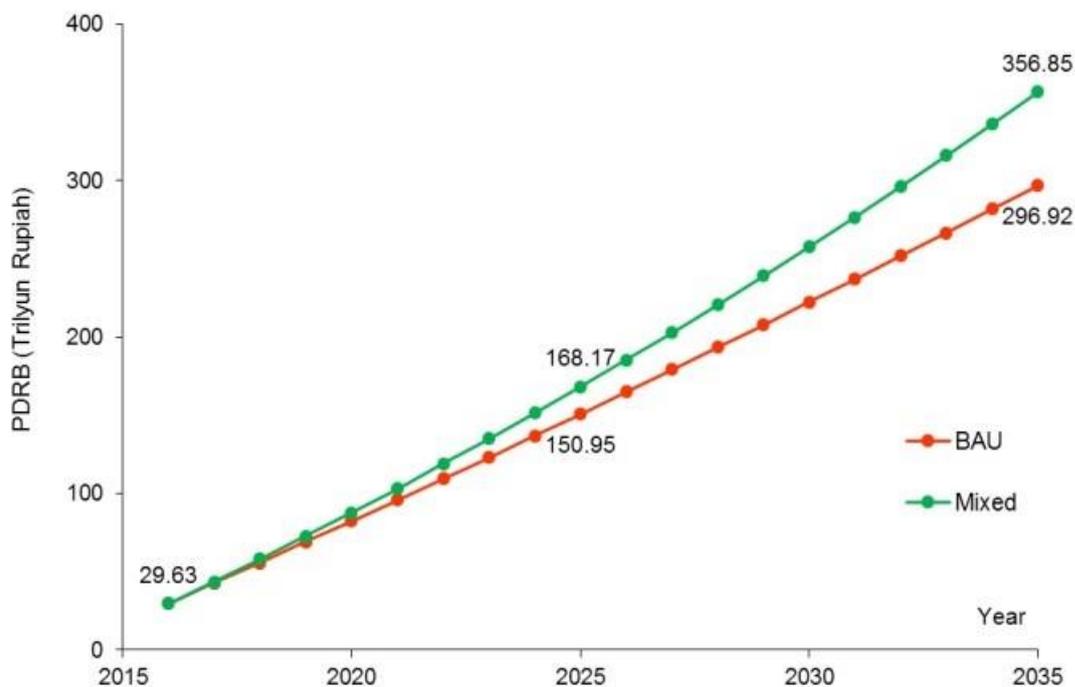
Karena itu, analisis dalam bagian ini mencoba menganalisis ruang sinergi antara pendekatan pembangunan desa yang sudah ada, khususnya pendekatan Desa Membangun dengan pendekatan pertumbuhan hijau dan PPI. Ruang sinergi ini menjadi penting di mana pembangunan desa bisa diintegrasikan untuk mendukung pertumbuhan hijau di satu sisi, dan memperkuat pendekatan PPI di tingkat desa di sisi lain.

Pertumbuhan hijau (*green growth*) berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan rendah karbon, di mana target pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan upaya mengurangi produksi emisi karbon. Di tingkat nasional, kebijakan pembangunan rendah karbon ini menysasar dua

sektor yang berkontribusi besar dalam emisi karbon, yakni energi dan kehutanan dan penggunaan lahan. Sementara di tingkat provinsi, terutama di Kalimantan Barat, kebijakan pertumbuhan hijau dikaitkan dengan upaya penurunan deforestasi dan sektor-sektor berbasis lahan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menetapkan skenario pertumbuhan hijau sampai tahun 2035, seperti terlihat dalam grafik di bawah ini.

Gambar 10. Skenario Pertumbuhan Hijau Kalimantan Barat



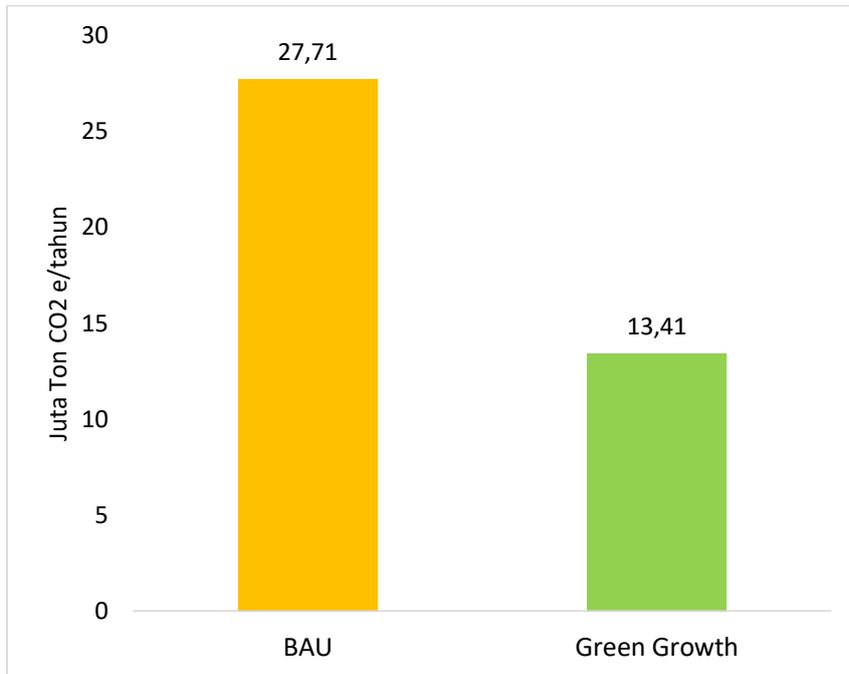
Sumber: Rencana Pertumbuhan Hijau Kalimantan Barat, 2018

Grafik di atas memperlihatkan target pertumbuhan hijau Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2035, di mana skenario pertumbuhan hijau diprediksi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 20,18% atau Rp 59,93 Triliun pada tahun 2035 dibandingkan dengan pendekatan business as usual (BAU). Skenario pertumbuhan hijau ini merupakan yang mencoba mencari keseimbangan antara produksi dan proteksi (*mixed*). Sedangkan BAU merupakan pendekatan produksi yang sudah berlangsung tanpa ada intervensi apapun untuk melakukan proteksi lingkungan hidup.

Pemerintah Kalimantan Barat juga telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2035 sebesar 43% dengan pendekatan campuran produksi-proteksi. Dengan pendekatan BAU, Kalimantan Barat akan menghasilkan emisi karbon sebesar 23,71 juta ton CO₂e per tahun. Sementara dengan pendekatan pertumbuhan hijau (*mixed* produksi dan proteksi), maka provinsi ini akan menghasilkan emisi karbon sebesar 13,41 juta ton CO₂e per tahun sampai tahun 2035. Target penurunan emisi sampai 43% ini merupakan sebuah target

ambisius yang perlu didukung oleh pendekatan dan kebijakan yang mendukung target penurunan emisi ini.

Gambar 11. Proyeksi Emisi Karbon Kalimantan Barat, 2015-2035



Sumber: Rencana Pertumbuhan Hijau Kalimantan Barat, 2018

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pembangunan desa bisa mendukung pertumbuhan hijau di satu sisi, dan bagaimana pertumbuhan hijau bisa menyejahterakan masyarakat desa di sisi lain. Dengan demikian, terdapat saling keterhubungan antara pembangunan desa dengan pertumbuhan hijau. Keterhubungan inilah yang harus dilihat secara holistik, sehingga bisa pertumbuhan hijau bisa memberi dampak positif pada masyarakat desa.

Kalau kita mengacu pada peta jalan (*roadmap*) pertumbuhan hijau yang dikembangkan Bappenas (2016), ruang lingkup pertumbuhan hijau yang direncanakan pemerintah mencakup sejumlah aspek sebagai berikut:

1. Pengurangan emisi gas rumah kaca.
2. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
3. Ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.
4. Jasa ekosistem yang sehat dan produktif.
5. Pertumbuhan yang adil dan inklusif.

Jika kita merujuk pada ruang lingkup pertumbuhan hijau yang dikembangkan oleh Bappenas tersebut, maka keterhubungan pertumbuhan hijau dengan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Saling keterhubungan antara pertumbuhan hijau dan pembangunan desa

No.	Ruang Lingkup Pertumbuhan Hijau	Keterkaitan dengan Pembangunan Desa
1.	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)	<p>Pembangunan desa belum secara langsung diarahkan untuk mendukung pengurangan emisi GRK, karena kontribusi GRK di tingkat pedesaan cenderung sangat kecil. Saat ini, kontribusi GRK yang sangat besar adalah di sektor energi dan FOLU (<i>Forestry dan Other Land Use</i>).</p> <p>Penggunaan energi di Kalimantan Barat masih mengandalkan energi fosil, yakni 90,1% minyak bumi, 8,3% gas bumi, 1,2% batubara, dan 0,3% energi terbarukan (Rencana Umum Energi Daerah Kalbar 2019, berdasarkan data tahun 2015). Di sisi lain, tingkat elektrifikasi di Kalbar menurut Statistik Ketenagalistrikan (2018) masih cenderung rendah, yakni 81,25% dibandingkan dengan rasio elektrifikasi nasional sebesar 95,35%.</p> <p>Tingkat elektrifikasi yang masih rendah ini umumnya terjadi di desa-desa pedalaman yang masih belum terhubung dengan jaringan listrik.</p> <p>Sementara untuk FOLU, kontribusi desa dalam GRK juga cenderung kecil. Selama ini, kontribusi emisi GRK sektor FOLU dilakukan oleh berbagai industri berbasis kehutanan dan lahan.</p>
2.	Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	<p>Pembangunan desa di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi berbasis lahan (pertanian dan perkebunan) bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Desa adalah wilayah produksi berbagai komoditas berbasis lahan yang sangat besar di Kalimantan Barat. Karena itu, pembangunan desa bisa diperkuat dengan strategi pertumbuhan hijau ini.</p>
3.	Ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi	<p>Memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi merupakan tujuan utama dari pembangunan desa. Karena itu, pemerintah menggunakan konsep Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mengukur tingkat ketahanan desa dari tiga aspek: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi.</p> <p>Pertumbuhan hijau juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, dari ruang lingkup ini, maka pertumbuhan hijau mempunyai hubungan saling mendukung dengan pembangunan desa.</p>
4.	Jasa ekosistem yang sehat dan produktif	<p>Jasa ekosistem merupakan jasa yang disediakan oleh sebuah ekosistem dalam bentuk udara bersih, air bersih, oksigen, dan jasa lingkungan lainnya kepada masyarakat secara keseluruhan, baik dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi.</p> <p>Desa merupakan wilayah yang mempunyai ekosistem penting untuk menyediakan jasa ekosistem tersebut guna mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah yang lebih luas. Karena itu, bisa ditegaskan bahwa percepatan pembangunan desa selaras dengan pertumbuhan hijau di Provinsi Kalimantan Barat.</p>

5. Pertumbuhan yang adil dan inklusif	Pertumbuhan ekonomi yang adil, sebagian harus menguntungkan dan dinikmati oleh masyarakat desa, yang diukur dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara pertumbuhan yang inklusif harus diarahkan untuk menjangkau sebesar-besarnya masyarakat desa dan tidak boleh ada yang tersisihkan atau tertinggal dalam proses pertumbuhan hijau yang berlangsung.
---------------------------------------	---

Dari ruang lingkup pertumbuhan hijau yang dijelaskan dalam tabel di atas, penurunan emisi GRK di tingkat desa merupakan salah satu aspek yang bisa melibatkan masyarakat desa secara inklusif untuk mendukung pertumbuhan hijau di Kalimantan Barat, meskipun kontribusi desa terhadap penurunan emisi GRK cenderung kecil dibandingkan dengan sektor swasta berbasis lahan. Kontribusi desa dalam penurunan emisi GRK untuk mendukung pertumbuhan hijau dapat dilihat dalam grafis di bawah ini.

Gambar 12. Kontribusi Desa dalam Pengurangan Emisi GRK untuk Pertumbuhan Hijau



Jika dikembangkan secara lebih strategis melalui pendekatan PPI Compact untuk mendukung pertumbuhan hijau di Kalimantan Barat, maka skema yurisdiksi di tingkat kabupaten dan lansekap bisa diterapkan juga berbasis desa. Namun demikian, pendekatan ini tidak bisa diterapkan di semua desa karena kondisi dan tipologi desa yang berbeda-beda di Kalimantan Barat. Desa-desanya yang bisa dikembangkan pendekatan yurisdiksi adalah desa-desanya yang mempunyai industri ekstraktif, yakni desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif, dan desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

Penelitian ini merupakan sebuah riset yang diarahkan untuk menjadi *evidence* dalam percepatan pembangunan desa di Kalimantan Barat. Sebanyak enam desa yang terletak di empat kabupaten menjadi lokasi studi, yang mewakili lima tipologi desa yang ada di provinsi ini. Kelima tipologi desa yang diteliti adalah desa urban, desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif, desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif, desa pesisir dan kawasan industri strategis nasional, serta desa terpencil dan perbatasan.

Dinamika ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi cenderung dinamis dan berbeda-beda untuk setiap desa dan tipologi desa. Desa urban, misalnya, mempunyai kondisi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berbeda dengan desa pedalaman dan desa pesisir. Perbedaan dinamika ketahanan desa ini menjadi masukan penting bagi para pemangku kepentingan bahwa pembangunan desa tidak boleh dilakukan secara seragam, melainkan berbasis pada kondisi masing-masing tipologi desa.

Yang menarik juga adalah bahwa untuk semua tipologi desa, modal sosial masyarakat desa-desa di Kalimantan Barat cenderung masih sangat kuat. Kohesifitas sosial, peran institusi sosial, solidaritas sosial, dan toleransi masih sangat kuat di berbagai desa. Kalaupun terjadi perubahan, misalnya penurunan solidaritas sosial, lebih disebabkan karena adanya perubahan pola kerja masyarakat desa karena masuknya industri-industri ekstraktif ke wilayah desa. Misalnya, sejumlah desa yang sebagian warganya bekerja di industri sawit, budaya gotong-royong cenderung melemah. Namun, secara keseluruhan, modal sosial masyarakat desa-desa di provinsi ini masih sangat kuat.

Secara lebih khusus berbasis pada konsep IDM yang menilai pembangunan desa dari dimensi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi, dapat disimpulkan sejumlah kondisi berdasarkan tipologi desa, sebagai berikut:

1. Desa urban merupakan desa-desa yang cenderung pembangunannya lebih maju, karena lokasinya dekat dengan kota, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai kebutuhan pembangunan desa. Tantangan utama yang dihadapi desa-desa urban adalah menguatnya urbanisme, yakni berkembangnya budaya kota di desa-desa, yang berdampak pada perubahan perilaku masyarakatnya.
 - a. Dari sisi ketahanan sosial, desa-desa urban cenderung bagus. Akses kesehatan, akses pendidikan, dan modal sosial masih cukup kuat dalam masyarakat urban ini.

- b. Dari sisi ketahanan ekonomi, desa-desa urban menghadapi tekanan yang cukup kuat dari perkembangan kota. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, dan lain-lain. Alih fungsi lahan pertanian ini akan memberi dampak jangka panjang terhadap keamanan pangan masyarakat desa di satu sisi, dan dukungan kepada kota di sisi lain. Apalagi, desa-desa urban ini merupakan penyangga kota untuk berbagai kebutuhan bahan pangan masyarakat kota.
 - c. Dari sisi ketahanan ekologi, tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa urban adalah potensi konflik lahan karena terjadinya tumpang tindih kepemilikan lahan. Selain itu, ancaman bencana banjir masih menjadi permasalahan besar yang belum ada solusi komprehensif sampai saat ini.
2. Desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif merupakan desa-desa yang terletak di wilayah pedalaman Kalimantan Barat yang dikelilingi oleh berbagai industri ekstraktif di wilayah desa. Tantangan utama yang dihadapi oleh desa-desa pedalaman ini adalah akses dan keterbukaan wilayah desa. Sejumlah desa pedalaman yang terletak di jalur Trans Kalimantan, mempunyai kemudahan akses dan keterbukaan wilayah. Sementara desa-desa pedalaman yang tidak terletak di jalur Trans Kalimantan ini menghadapi kendala akses ke wilayah desa. Kendala akses ini berdampak pada pembangunan desa di semua dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun ekologi.
 - a. Dari sisi ketahanan sosial, desa-desa pedalaman (kecuali yang berada di jalur Trans Kalimantan) mengalami hambatan akses kepada layanan kesehatan dan pendidikan. Hambatan akses ini berdampak pada kondisi sumberdaya manusia di desa-desa pedalaman ini. Desa-desa pedalaman ini juga menghadapi jarak akses ke layanan kesehatan yang lebih tinggi (RSUD) yang berada di ibukota kabupaten. Umumnya, warga desa membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 4 jam untuk mengakses RSUD.
 - b. Ketimpangan penguasaan lahan merupakan tantangan dalam ketahanan ekonomi di desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini. Desa Teraju, 84% lahan dikuasai perusahaan ekstraktif, sementara di Desa Sungai Deras seluas 65,77% dikuasai oleh perusahaan sawit. Ketimpangan penguasaan lahan ini berdampak pada terbatasnya akses warga desa dalam pengembangan ekonominya di masa yang akan datang, mengingat penduduk desa yang terus bertambah. Apalagi, mata pencaharian utama mayoritas warga desa pedalaman ini adalah pertanian dan perladangan.
 - c. Dari sisi ketahanan ekologis, tantangan utama desa-desa pedalaman dan kawasan industri ekstraktif ini adalah pencemaran air dan tanah karena aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit. Konflik lahan antara masyarakat desa dan

perusahaan masih menjadi persoalan ke depan. Demikian juga bencana banjir karena alih fungsi lahan menjadi tambang dan sawit yang terjadi setiap tahun.

3. Desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif merupakan desa-desa yang terletak di kawasan pesisir Kalimantan Barat dan dikelilingi oleh berbagai industri ekstraktif di wilayah desa. Desa-desa pesisir ini umumnya tidak mempunyai kendala dalam akses dan keterbukaan wilayah. Desa-desa pesisir ini cenderung mudah diakses. Tantangan yang dihadapi oleh desa-desa ini dari sisi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi adalah sebagai berikut:
 - a. Desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif ini cenderung tidak mempunyai masalah serius dalam ketahanan sosial. Modal sosial desa-desa ini cenderung bagus. Demikian juga akses layanan kesehatan dan pendidikan yang sudah memadai. Masalah utama desa-desa pesisir ini adalah akses ke RSUD di ibukota kabupaten yang memakan waktu lama, bahkan lebih dari 5 jam.
 - b. Dari sisi ketahanan ekonomi, desa-desa pesisir dan kawasan industri ekstraktif ini terbagi dua, yakni desa-desa yang mempunyai aset ekonomi bagus, dan desa-desa yang tidak mempunyai aset ekonomi. Desa-desa yang mempunyai aset ekonomi, cenderung lebih maju dalam pembangunan desanya. Sementara desa-desa yang tidak mempunyai aset ekonomi, maka pembangunan desa sangat bergantung pada keberadaan industri ekstraktif.
 - c. Dari sisi ketahanan ekologi, pencemaran tanah dan air karena aktivitas industri ekstraktif merupakan masalah yang masih terus terjadi di desa-desa ini.
4. Desa pesisir dan kawasan industri strategis nasional merupakan desa-desa yang terletak di kawasan pesisir Kalimantan Barat dan berada dalam kawasan industri strategis nasional (KISN). Desa-desa di wilayah KISN ini, menghadapi ketidakpastian masa depan. Masyarakat desa belum disiapkan oleh pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan proses industrialisasi di wilayah ini yang sedang terjadi. Akibatnya, warga desa-desa ini menjadi gagap dan hanya sebagai penonton dari proses industrialisasi ini. Kondisi ini secara langsung berpengaruh pada ketahanan masyarakat desa untuk jangka panjang.
 - a. Desa-desa pesisir dan KISN ini umumnya mengalami keterkejutan budaya (*cultural shock*) dengan hadirnya berbagai industri modern di wilayah ini. Hanya sedikit warga desa yang mampu diserap sebagai pekerja kasar di industri-industri, baik yang sedang dibangun maupun yang sudah beroperasi. Jika keterkejutan budaya ini tidak direspon oleh pemerintah dengan baik, maka akan menjadi energi negatif yang akan melahirkan konflik sosial di masa yang akan datang, apabila kehadiran KISN memarjinalkan warga desa.
 - b. Dari sisi ketahanan ekonomi, desa-desa pesisir dan KISN ini umumnya merupakan desa pertanian tadah hujan. Mayoritas warganya bekerja sebagai

petani. Sebagian kecil yang berprofesi sebagai nelayan. Pembangunan KISN menyebabkan kawasan pantai yang menjadi akses warga ke laut, menjadi tertutup.

- c. Dari sisi ketahanan ekologi, konflik sosial antara masyarakat desa dengan perusahaan di KISN mulai terjadi dan berpotensi terus berkembang jika tidak dilakukan upaya mitigasi yang memadai sejak dini. Pencemaran udara dan air sebagai akibat dari aktivitas pabrik-pabrik di KISN merupakan dampak lingkungan yang mulai dirasakan oleh masyarakat desa.
5. Desa terpencil dan perbatasan merupakan desa-desa di Kalimantan Barat yang terletak di wilayah sangat pedalaman, terpencil, dan sebagian berada di perbatasan dengan Malaysia. Masalah utama desa-desa ini adalah keterpencilan wilayah desa dengan wilayah di sekitarnya. Desa Nanga Jelundung di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang misalnya, perjalanan menuju desa ini memakan waktu lebih dari satu hari melalui jalur air/sungai. Keterpencilan ini berdampak pada semua dimensi pembangunan desa.
- a. Tantangan ketahanan sosial di desa-desa terpencil ini adalah terbatasnya akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Warga desa membutuhkan waktu lebih dari 7 jam menuju Puskesmas terdekat dengan biaya transportasi air yang sangat mahal. Demikian juga akses pendidikan yang tidak mudah dijangkau oleh warga desa. Karena itu, mayoritas warga desa terpencil biasanya hanya lulus sekolah dasar.
 - b. Dari sisi ketahanan ekonomi, mayoritas warga desa hidup secara subsisten dan mengandalkan sumber penghidupan pada alam: ladang, tembawang, dan sungai. Keterpencilan desa membuat produk-produk desa seperti karet misalnya, tidak bisa dijual ke kota karena biaya transportasi yang sangat mahal.
 - c. Ancaman ekologis terbesar di desa-desa terpencil ini adalah pencemaran sungai yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Keterpencilan wilayah desa menyebabkan pengawasan dari otoritas pemerintah terhadap aktivitas illegal ini menjadi sangat terbatas.
6. Selain itu, desa-desa yang terletak di kawasan industri ekstraktif dan kawasan industri strategis nasional, cenderung belum mendapatkan manfaat yang bagus dari kehadiran berbagai industri ekstraktif di desa-desa ini. CSR perusahaan cenderung dilaksanakan dengan pendekatan karitatif. Pendekatan ini tidak memberi dampak pemberdayaan kepada masyarakat desa, melainkan justru menciptakan ketergantungan masyarakat desa kepada bantuan perusahaan. Namun demikian, sejumlah perusahaan BUMN sudah mempunyai pendekatan yang lebih baik dan terarah dalam program CSR mereka. Perusahaan-perusahaan BUMN ini sudah menggunakan pendekatan SDGs, ISO 26000, dan lain-lain. Sayangnya, pelaksanaan program CSR BUMN ini belum terintegrasi dengan

perencanaan desa, dan masih berbasis pada beberapa kelompok saja. Kondisi ini menyebabkan upaya pembangunan desa belum didukung dengan baik oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif ini.

7. Pembangunan desa di Kalimantan Barat bisa diintegrasikan dengan kebijakan pertumbuhan hijau yang sudah dijalankan oleh pemerintah provinsi ini. Pendekatan Produksi, Proyeksi dan Inklusi (PPI) untuk mendukung pertumbuhan hijau di tingkat desa bisa dikembangkan. Sejumlah aspek yang bisa dijalankan di tingkat desa untuk mendukung pertumbuhan hijau adalah sebagai berikut:
 - a. Livelihood: pengembangan praktek livelihood berbasis lahan dengan cara non-bakar
 - b. Proteksi: pengembangan *High Conservation Value/ High Carbon Stock* di wilayah desa
 - c. Wilayah Kelola: pengembangan perhutanan sosial untuk produksi dan proteksi di wilayah kelola masyarakat.
 - d. Energi: pengembangan energi terbarukan skala mikro dan rumah tangga di desa.
 - e. Reforestasi: penambahan stok karbon di wilayah kelola masyarakat melalui reforestasi.

6.2 REKOMENDASI

Melihat kecenderungan kondisi desa-desa di Kalimantan Barat dari berbagai tipologi yang ada, terdapat kecenderungan bahwa pembangunan desa selama ini belum berjalan secara optimal. Berbagai indikator dalam konsep IDM, baik ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi, masih terdapat sejumlah celah kelemahan yang perlu diperbaiki ke depan. Karena itu, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kepada sebagai berikut:

Pertama, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu melakukan pemetaan kondisi desa secara mendalam dari berbagai tipologi desa yang ada di Kalimantan Barat. Pemetaan kondisi desa secara mendalam ini akan berguna untuk membantu pemerintah merumuskan strategi yang tepat untuk masing-masing tipologi desa yang berbeda. Penelitian ini hanya mampu melakukan analisis untuk enam desa dan lima tipologi.

Kedua, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu merumuskan strategi pembangunan desa secara berbeda dan tidak seragam di Kalimantan Barat. Penyeragaman pembangunan desa tidak akan memberi dampak percepatan. Bab 4 laporan ini memberikan pilihan-pilihan strategi yang berbeda untuk masing-masing tipologi desa yang diteliti.

Ketiga, pemerintah provinsi dan kabupaten perlu mengoptimalkan pengelolaan dana CSR perusahaan-perusahaan ekstraktif untuk pembangunan desa. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan CSR berbagai perusahaan ekstraktif masih bersifat karitatif, di mana pendekatan

CSR dilakukan dengan cara bagi-bagi bantuan. Karena itu, diperlukan adanya transformasi pendekatan CSR dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan.

Keempat, pembangunan desa di Kalimantan Barat bisa diarahkan untuk mendukung pertumbuhan hijau (*green growth*), dengan pendekatan PPI (Produksi, Proteksi, dan Inklusi) berbasis lansekap dan yurisdiksi. Khusus untuk desa-desa yang berada dalam kawasan industri ekstraktif berbasis lahan, maka pendekatan PPI ini menjadi penting untuk dilaksanakan untuk memastikan adanya keseimbangan antara produksi dan proteksi di satu sisi, dan inklusi kepada masyarakat desa dan petani di sisi lain dalam rantai pasok komoditas berbasis lansekap.

Kelima, penelitian ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan berkaitan dengan percepatan pembangunan desa di Kalimantan Barat, khususnya untuk tipologi-tipologi desa lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini. Selain itu, diperlukan juga penelitian lanjutan tentang CSR secara mendalam, karena penelitian ini menjadikan aspek CSR hanya sebagian kecil dari proses penelitian. Jika memungkinkan, penelitian ini juga merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan terhadap dimensi-dimensi IDM yang lebih spesifik. Misalnya, penelitian tentang ketahanan sosial saja, penelitian tentang ketahanan ekonomi saja, atau penelitian ketahanan ekologi saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- _____. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. United Kingdom: Sage Publications.
- Giddens, Anthony. (2006). *Sociology (Fifth Edition)*. Cambridge: Polity Press.
- Kusnoto, Yuver. (2016). Eksistensi Istana Kerajaan di Kalimantan Barat sebagai Sumber Belajar Sejarah, *Jurnal Historia*, Vol. 4, No. 1, hal. 19-28.
- Neuman, W. Laurence. (2007). *Basic of Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education.
- Prior, Lindsay. (2008). Repositioning Document in Social Research. *Sociology*, Volume 42(5): 821–836.

Dokumen

- Bappenas. (2016). *Delivering Green Growth for a Prosperity Indonesia: A Roadmap for Policy, Planning, and Investment*. Jakarta: Bappenas
- BPS. (2020). *Kalimantan Barat Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
- BPS. (2020). *Simpang Hulu Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- BPS. (2019). *Sandai Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- BPS. (2020). *Sungai Kakap Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- BPS. (2019). *Teluk Pakedai Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- BPS. (2020). *Sungai Kunyit Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
- BPS. (2020). *Toba Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
- BPS. (2019). *Serawai Dalam Angka 2019*. Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- Kementerian Desa PDTT. (2019). *Status Indeks Desa Membangun: Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan Tahun 2019*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa PDTT. (2020). *Peringkat Status Indeks Desa Membangun: Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa Tahun 2020*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Barat*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Pemprov Kalbar. (2018). *Rencana Pertumbuhan Hijau Kalimantan Barat dengan Analisis Rinci pada Kabupaten Ketapang, Kayong Utara dan Kubu Raya*. Pontianak: Dinas Perubahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalbar.

Profil Desa

Profil Desa Botuh Bosi Tahun 2020, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Profil Desa Muara Jekak Tahun 2020, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Profil Desa Sungai Rengas Tahun 2020, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Profil Desa Sungai Deras Tahun 2020, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Profil Desa Bukit Batu Tahun 2019, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.

Profil Desa Teraju Tahun 2020, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

RPJM Desa Bukit Batu tahun 2020-2026.

RPJM Desa Teraju tahun 2017-2023.